

**KAJIAN KOMUNIKASI KEPRESIDENAN (STUDI KOMUNIKASI
KEPRESIDENAN MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN K.H. ABDURRAHMAN
WAHID (GUS DUR) 1999-2001)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Minat Utama Public Relations

Oleh:

Dafindra Ghifary Kresnadi

145120207111044



JURUSAN ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG 2018

LEMBAR PENGESAHAN

**KAJIAN KOMUNIKASI KEPRESIDENAN (STUDI KOMUNIKASI
KEPRESIDENAN PADA MASA PEMERINTAHAN K.H.
ABDURRAHMAN WAHID (GUS DUR) PERIODE 1999-2001)**

SKRIPSI

Disusun oleh:

Dafindra Ghifary Kresnadi

NIM. 145120207111044

Telah diuji dan dinyatakan **LULUS** dalam ujian sarjana pada tanggal 07 Juni 2018

Dosen Pembimbing



Dr. Antoni S.Sos., M.Si
NIP/NIK. 19721010 20050110 02

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya,**



Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak.
NIP. 196908141994021001

LEMBAR DAFTAR PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji oleh tim penguji pada tanggal 7 Juni 2018 dengan daftar penguji sebagai berikut:

TELAH DIREVISI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI

No.	Nama	Jabatan Penguji
1.	Dr. Antoni, S.Sos., M.Si NIP/NIK. 19721010 2005011002	Ketua Majelis Sidang
2.	Nisa Alfira, S.I.Kom., M.A NIP/NIK. 2013048808312001	Anggota Majelis Sidang 1
3.	Bayu Indra Pratama, S.I.Kom., M.A NIP/NIK. 2013098808081001	Anggota Majelis Sidang 2

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut:

Nama : Dafindra Ghifary Kresnadi
Nomor Induk Mahasiswa : 145120207111044
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Peminatan : Public Relations

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

Kajian Komunikasi Kepresidenan (Studi Komunikasi Kepresidenan Pada Masa Pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Periode 1999-2001)

Adalah benar-benar karya saya sendiri di bawah bimbingan Pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala resiko, akibat, dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Brawijaya.

Malang, Juni 2018

Dafindra Ghifary Kresnadi

NIM. 14512020711104



Dafindra Ghifary Kresnadi

Public Relations Student

Phone: 085722832085 | Email: dafindragk@gmail.com | Instagram : @dafindra
Address: Jl. Purnawirawan IV No.7 RT01/RW10 Komp. Pharmindo, Cimahi Selatan

Education

Elementary School

SDN. Banjarsari III Bandung
Jl. Merdeka No. 22 Bandung

Junior High School

SMP Negeri 44 Bandung
Jl. Cimanuk No.1 Bandung

Senior High School

SMA Negeri 5 Bandung
Jl. Belitung No. 8 Bandung

University

Brawijaya University, Faculty Of Social
& Political Science, Major in
Communication Studies
Jl. Veteran No.1 Malang.

Experience

ORGANIZATION

Ketua Bidang 5 OSIS SMA Negeri 5 Bandung
Ketua Sanggar Sastra SMA Negeri 5 Bandung
Vice President of Five English Club
Media Planner MiXth Event Organizer FISIP UB
Sekretaris II MiXth Event Organizer FISIP UB
Bendahara Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa FISIP UB

ACHIEVEMENT

Juara 1 Lomba Debat Hukum Antar SMA Tingkat Nasional Padjadjaran Law Fair 2012 & 2013
Juara 2 Lomba Debat Sanitasi Tingkat Nasional FTSL Trisakti 2014
Best Speaker Lomba Debat Sanitasi Tingkat Nasional FTSL Trisakti 2014
Juara 3 Lomba Debat Politik Tingkat Regional Jawa Barat FISIP UNPAD 2014

Juara 1 Lomba Debat Bela Negara KODAM III Siliwangi 2011
Juara 1 Lomba Debat PCTA Kementerian Pertahanan Tingkat Jawa Barat 2013

VOLUNTEER

FiveLive Battlefield
FiveLive Surawisesa
Indonesia Youth Forum 2013
Forum Pelajar Indonesia 5
Brawijaya Fashion Week 2015
Brawijaya Fashion Week 2016
Kanelop 2016
Hail MiXth 10 : Komat Kamit Knalpot 2016
Viva La Communication 2015
Seminar Internasional Membangun Indonesia Dari Pinggir
Dies Natalis Universitas Brawijaya 54 : Artjuno Festival 2017
Heaven On Earth Tour Malang : Dian Pelangi & Fatih Severagic



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dan tersusun dengan baik. Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dan dorongan serta doa dari berbagai pihak yang membantu memotivasi agar terselesaikan nya penelitian ini. Pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini.
2. Keluarga terutama orang tua penulis Bapak Budi Kresnadi dan Ibu Ade Lucy Andryani serta Adik saya Vanya, yang selalu mendukung dan memberikan doa sehingga penulis dapat melaksanakan program PKN dengan baik.
3. Keluarga Besar penulis Eyang Papih, Uwa Ibu, Uwa Asep, Uwa Eni, Uwa Nung serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Dosen pembimbing skripsi saya bapak Dr. Antoni, S.Sos., M.Si yang selalu sabar memberikan saya masukan dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga saya dapat menyusun skripsi saya dengan sangat baik, dan juga membantu saya mendapatkan gelar sarjana tepat waktu, atas segala bimbingan dan ilmu nya, terimakasih Bapak Antoni sudah selalu menginspirasi setiap langkah akademik saya.
5. Sahabat-sahabatku terkasih dan tersayang yang ada di Bandung, SWDYH. Yang selalu menyemangati penulis (selalu) dan menghibur penulis dengan candaan-candaannya. Terimakasih sudah mewarnai hidup penulis dengan hinaan-hinaan kalian yang katanya sebagai tanda kasih sayang kepada penulis, untuk babe, nunu, dera,

nidih mendidih, nana, iti, koji, dan syifa hijabers bandung penulis saying banget sama kalian hehe.

6. Kepada Anugrah Tri Juharsi, teman satu kos penulis yang selalu menyemangati dan mendengarkan keluh kesah penulis serta selalu membantu penulis dalam menyiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk mendukung skripsi ini. Sarjana Desember 2018 ya Ju.
7. Kepada PIKA SQUAD, Ka Della, Ka Madun, Ka Tiwi, dan Ka Ica yang selalu memberikan inspirasi kepada penulis dan membantu penulis dalam penyusunan naskah skripsi ini. Semoga kita sukses selalu.
8. Kepada Rizka Nabila Putri Amran, teman diskusi dan satu bimbingan bersama Pak Antoni. Terimakasih sudah selalu setia menjadi teman diskusi penulis dalam berbagai hal.
9. Kepada Latifah Amanda Zulfi, teman mengerjakan skripsi dan mengurus semua urusan akademik bersama.
10. RUMINGKANG, Chika, Nabila, Ifa, Aiai, Macu, Sheila, dan Huninuna. Yang selalu bercengkrama dan bersenda gurau bersama.
11. THE SIBLINGS, keluarga penulis di Kota Malang. Terimakasih sudah selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan naskah skripsi ini. Bakal kangen sama kalin (Apis, Adam, Aiai, Aji, Akmal, Aldy, Bandang, Chika, Egar, Farhan, Huninuna, Ifu, Macu, Napnap, Okke, Pije, Sheila & Ramzy)
12. Dosen penguji, Ibu Nisa Alfira, dan Pak Bayu Indra Pratama terimakasih atas saran dan masukan nya sehingga dapat menambah kredibilitas skripsi saya.
13. Kepada informan dalam penelitian ini yang sudah bersedia membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan naskah ini sehingga membuat naskah skripsi ini tersusun dengan baik. Terimakasih kepada perwakilan keluarga besar Gus Dur, Mbak Inayah

Wahid & Mbak Alissa Wahid. Kepada staf pribadi Gus Dur Bapak Priyo Sambodho dan Dr. Ngatawi Al Zastrouw, kepada tim juru bicara kepresidenan Gus Dur, Pak Wimar, Pak Adhie Massardi dan Gus Yahya Staquf, kepada K.H. Arifin Junaidi, kepada anggota kabinet Persatuan Nasional, Pak Wahyu Muryadi, Pak Dharmawan Ronodipuro, Pak Rizal Ramli, Pak Alwi Shihab, terimakasih kepada Romo Benny sebagai sahabat Gus Dur serta Ketua DPR-RI 1999-2004, Bapak Akbar Tandjung.

14. Teman-teman MiXth 2014 Kabinet Barakuda. Terimakasih sudah mewarnai kehidupan perkuliahan penulis selama 1 tahun penuh dari 2015-2016.
15. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis baik dalam penulisan skripsi sehingga penulis dapat menjalani nya dengan baik.
16. Keluarga besar Ilmu Komunikasi dari FISIP Universitas Brawijaya angkatan 2014, yang telah menjadi bagian dari perjalanan kuliah saya di malang.

Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, dan ketidaksempurnaan dalam penulisan penelitian ini. Semoga penulisan penelitian skripsi ini dapat memiliki manfaat dan juga dapat menambah pemahaman literatur pada jurusan Ilmu Komunikasi.

Malang, Juni 2018

Abstrak

Dafindra Ghifary Kresnadi. (2018). ‘Kajian Komunikasi Kepresidenan (Studi Komunikasi Kepresidenan Masa Pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 1999-2001)’. Dosen Pembimbing: Dr. Antoni.

Komunikasi kepresidenan saat ini telah menjadi pusat perhatian media massa baik cetak, elektronik maupun online. Dalam kajian komunikasi kepresidenan yang dilakukan selama ini fokus pada dua pertanyaan besar, (1). Faktor apa yang mempengaruhi gaya komunikasi kepresidenan?, (2). Seefektif apa komunikasi kepresidenan yang dilakukan?. Penelitian ini dijadikan sebagai salah satu upaya dari peneliti untuk menambahkan kajian komunikasi kepresidenan di Indonesia, karena selama ini kajian komunikasi kepresidenan lebih banyak berkembang di Amerika Serikat, termasuk di dalamnya pembahasan mengenai komunikasi kepresidenan di Amerika Serikat yang terdapat dalam jurnal *Presidential Studies Quarterly* yang sudah memasuki *volume* ke 47. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan eksploratif dengan paradigma interpretatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian fenomenologi Moustakas.

Gus Dur merupakan presiden yang menjabat di masa transisi pasca runtuhnya orde baru, selain itu Gus Dur juga memiliki latar belakang sebagai seorang kyai dan berasal dari keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU), sebuah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, hal tersebut berpengaruh pada cara Gus Dur berkomunikasi baik dengan staf, anggota kabinet, kepala Negara sahabat, parlemen bahkan sampai dengan masyarakat, komunikasi Gus Dur tersebut dijalin dengan menyelipkan humor untuk mempermudah pesan yang ingin Gus Dur sampaikan dipahami oleh lawan bicaranya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi kepresidenan yang dijalankan oleh Gus Dur dipengaruhi oleh latar belakangnya yang berasal dari kalangan pesantren Nahdlatul Ulama lewat ajaran Ahlusunnah Wal Jamaah. Gus Dur menjadikan ulama memiliki peran sentral dalam pemerintahan Gus Dur. Dalam melakukan penanganan konflik separatis di berbagai daerah seperti Papua dan Aceh, Gus Dur mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan pendekatan kebudayaan, hal ini dinilai efektif untuk meredam keinginan dua daerah tersebut untuk merdeka dari Indonesia. Gus Dur juga menggunakan pendekatan barat untuk mendukung proses komunikasinya saat menjadi presiden, salah satunya dengan menghadirkan juru bicara kepresidenan yang merupakan juru bicara pertama dalam institusi kepresidenan Indonesia. Gus Dur dikenal sebagai seorang yang humoris, hal itu ia bawa dalam diplomasi yang ia lakukan saat ia menjabat sebagai Presiden. Humor-humor yang Gus Dur lemparkan merupakan salah satu strategi untuk mencairkan suasana agar tercipta suasana keakraban sehingga lebih mudah untuk menyampaikan tujuan diplomatik.

Secara garis besar, komunikasi yang dilakukan oleh Gus Dur selama menjabat sebagai Presiden efektif dan berhasil membangun suasana yang harmonis baik di lingkungan Istana maupun di lingkungan masyarakat. Gus Dur memberikan pelajaran betapa pentingnya komunikasi kepresidenan dengan menghadirkan juru bicara sebagai salah satu instrument dalam pemerintahannya.

Kata Kunci: Gus Dur, Humor Politik, Kajian *non-western*, Komunikasi Kepresidenan.

Abstract

Dafindra Ghifary Kresnadi. (2018). *Presidency Communication Study (Presidency Communication Study on Term of Government K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 1999-2001)* Supervisor: Dr. Antoni

Nowadays presidency communication has been the center of attention in any kind of form of mass media such as press, electronic, and online. There are two big questions that focused on presidency communication study, (1). What are the factors that influence presidency communication style?, (2). How effective the presidency communication has been done?. This research will be used for one of the attempt from researcher to contribute presidency communication study in Indonesia, because all this time presidency communication study is more developed in United States of America rather than in Indonesia, including the discussion about United States of America in presidency communication study which found in *Presidential Studies Quarterly* journal that has entered the 47th volume. This research is using the qualitative research method and explorative with interpretative paradigm. This research is using phenomenology research method by Moutsakas.

Gus dur is one of the President of Indonesia in the era after the collapsed of the new order, despite of that Gus Dur is also has a background as a moslem scholar and came from a large family of Nahdlatul Ulama (NU), the largest religious organization in Indonesia, which influenced the way Gus Dur communicate well with staff, cabinet members, heads of friendly countries, parliament even up to the community, Gus Dur's communication is woven by humor to facilitate the message that Gus Dur wants to convey to his interlocutor.

The results of this study indicate that the presidential communication carried out by Gus Dur is influenced by his background that comes from the Nahdlatul Ulama pesantren through the teachings of Ahlusunnah Wal Jamaah. Gus Dur made the cleric a central role in Gus Dur's government. In handling separatist conflicts in various regions such as Papua and Aceh, Wahid put forward humanitarian values and cultural approaches, it is considered effective to dampen the desire of the two regions to be independent from Indonesia. Abdurrahman also used a western approach to support his communication process as president, one of which is by presenting a presidential spokesman who is the first spokesman in the Indonesian presidential institution. Abdurrahman is known as a humorist, it is he takes in diplomacy that he did when he served as President. The humor that Gus Dur threw was one strategy to dilute the atmosphere to create an atmosphere of intimacy that made it easier to convey diplomatic goals.

Broadly speaking, the communication made by Gus Dur during his tenure as an effective President and succeeded in establishing a harmonious atmosphere both within the Palace and in the community. Gus Dur gave a lesson on the importance of presidential communication by presenting the spokesman as one of the instruments in his government.

Keyword: Gus Dur, Political Humour, Non-western Study, Presidency Communication

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
LEMBAR ORISINALITAS.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
1.2 Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.3 Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	Error! Bookmark not defined.
1.4.2 Manfaat Praktis.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
2.1. Komunikasi Politik.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.1. Perkembangan Komunikasi Politik.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.2. Komunikasi Politik Perspektif Non-Western.....	Error! Bookmark not defined.
2.2. Humor Politik Sebagai Komunikasi Politik.....	Error! Bookmark not defined.
2.3. Penelitian Terdahulu.....	Error! Bookmark not defined.
2.4. Kerangka Berpikir.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
3.1 Jenis dan Paradigma Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.2 Metode Penelitian Fenomenologi.....	Error! Bookmark not defined.
3.3 Fokus Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.4 Subjek Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.6 Teknik Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.7. Keabsahan Data.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV LAPORAN HASIL.....	Error! Bookmark not defined.
4.1 Profil K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).....	Error! Bookmark not defined.
4.2. Gus Dur di Mata Keluarga.....	Error! Bookmark not defined.
4.3. Hubungan Gus Dur dengan Media.....	Error! Bookmark not defined.
4.4. Hubungan Gus Dur dengan Kabinet.....	Error! Bookmark not defined.

4.4.1. Hubungan Gus Dur dengan Wakil Presiden	Error! Bookmark not defined.
4.4.2 Hubungan Gus Dur dengan Anggota Kabinet	Error! Bookmark not defined.
4.5. Juru Bicara Kepresidenan Gus Dur.....	Error! Bookmark not defined.
4.6. Gus Dur dan Masyarakat.....	Error! Bookmark not defined.
4.7. Proses Pengambilan Keputusan Gus Dur	Error! Bookmark not defined.
4.8. Hubungan Gus Dur dengan Parlemen.....	Error! Bookmark not defined.
4.9. Diplomasi Gus Dur	Error! Bookmark not defined.
4.10. Cara Menghadapi Konflik Ala Gus Dur.....	Error! Bookmark not defined.
4.11. <i>Jokes</i> Gus Dur.....	Error! Bookmark not defined.
4.12. Prinsip Kepemimpinan Gus Dur	Error! Bookmark not defined.
BAB V DISKUSI	Error! Bookmark not defined.
5.1. Komunikasi Kepresidenan K.H. Abdurrahman Wahid	Error! Bookmark not defined.
5.2. Nilai-nilai Nahdlatul Ulama dalam Komunikasi Kepresidenan K.H. Abdurrahman Wahid	Error! Bookmark not defined.
5.3. <i>Jokes</i> Sebagai Komunikasi Kepresidenan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)	Error! Bookmark not defined.
5.4. Temuan Menarik dalam Penelitian Komunikasi Kepresidenan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)	Error! Bookmark not defined.
BAB VI SIMPULAN & SARAN	Error! Bookmark not defined.
6.1 Simpulan	Error! Bookmark not defined.
6.2 Proposisi.....	Error! Bookmark not defined.
6.3 Saran	Error! Bookmark not defined.
6.3.1 Saran Akademis	Error! Bookmark not defined.
6.3.2 Saran Praktis	Error! Bookmark not defined.
Daftar Pustaka.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Kajian Komunikasi Politik.....	26
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Komunikasi Politik.....	31
---	----



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Grafik Angka Komunikasi Kepresidenan Amerika Serikat Dengan Publik.....	32
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi politik memainkan peran penting dalam sebuah sistem politik. Kegagalan dalam melakukan komunikasi politik akan berdampak pada krisis kepercayaan terhadap pemimpin sebuah sistem politik. Salah satu bentuk komunikasi politik adalah komunikasi yang dilakukan oleh seorang Presiden dalam menjalankan pemerintahannya (Baldoni, dalam Kaban, 2009).

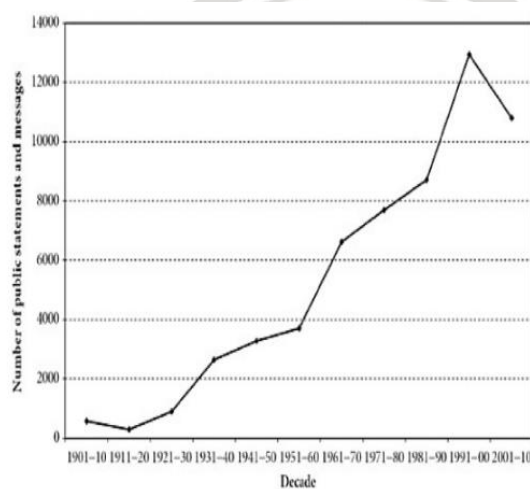
Salah satu presiden yang pernah mengalami krisis karena keagalannya dalam melakukan komunikasi politik kepada publiknya adalah Presiden Amerika Serikat Bill Clinton. Clinton yang saat itu mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat Amerika Serikat karena skandalnya dengan salah satu staf gedung putih, Monica Lewinsky. Publik Amerika Serikat antipasti terhadap Clinton karena dalam pernyataannya kepada publik, Clinton selalu menyangkal skandalnya tersebut, padahal disaat yang sama bukti-bukti *affair* Clinton dengan Lewinsky menunjukkan kebenaran skandal tersebut, sesuai dengan argumen Benoit (dikutip dari Moran, 2012) bahwa dengan melakukan penyangkalan pada sebuah skandal yang diketahui publik dapat berdampak pada reputasi buruk.

Clinton merubah strateginya menggunakan strategi *apologia* dengan mengakui skandal tersebut dan meminta maaf kepada publik Amerika Serikat atas perbuatannya, tidak hanya itu, Clinton juga meminta maaf kepada keluarga Monica Lewinsky atas perilaku buruknya terhadap perempuan muda tersebut, keadaan menjadi berubah, Clinton yang sempat terancam dimakzulkan karena skandal tersebut berhasil mempertahankan kekuasaannya hingga akhir periode, publik pun menerima pernyataan Clinton tersebut (Briscoe, 2013). Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi politik berperan penting dalam sebuah sistem politik, kesalahan strategi komunikasi politik akan berdampak pada krisis kepemimpinan sistem politik.

Komunikasi kepresidenan merupakan elemen penting dalam politik kepresidenan di dunia tak terkecuali di Amerika Serikat, tempat berkembangnya kajian komunikasi kepresidenan. Di era modern, dari tahun ke tahun lebih peduli pada komunikasi dibandingkan era sebelumnya. Sejak kepemimpinan Franklin D. Roosevelt terutama pasca perang dunia kedua, Roosevelt memperhatikan aspek komunikasi dalam pemerintahannya. Saat ini setiap aktifitas oleh presiden selalu memperhatikan aspek komunikasi, tidak heran apabila kajian komunikasi kepresidenan berkembang di Amerika Serikat. Komunikasi kepresidenan saat ini telah menjadi pusat perhatian media massa baik cetak, elektronik maupun online (Ryfe, 2015, h.1-h.2)

Gaya komunikasi kepresidenan tergantung pada seorang presiden berusaha berkomunikasi dengan publiknya. Dalam kajian komunikasi kepresidenan yang dilakukan selama ini fokus pada dua pertanyaan besar, (1). Faktor apa yang

mempengaruhi gaya komunikasi kepresidenan?, (2). Seefektif apa komunikasi kepresidenan yang dilakukan? Setiap tahun sejak tahun 1901-2010 presiden di Amerika Serikat semakin terbuka kepada publik, dibuktikan dengan grafik yang dibuat oleh Cohen terkait angka komunikasi kepresidenan dengan publik di Amerika Serikat.



Grafik 1. Grafik angka komunikasi kepresidenan Amerika Serikat dengan publik.

Dikutip dari Cohen (2014)

Konferensi pers pertama lewat siaran televisi dilakukan pertama kali oleh John F Kennedy. Setelah mulai terbuka dengan publiknya, wartawan menjadi lebih agresif dalam memberikan pertanyaan kepada presiden. Hal tersebut menjadi awal semakin terbukanya presiden Amerika Serikat kepada publiknya. Keterbukaan pemerintah Amerika Serikat kepada publiknya tersebut mendukung perkembangan kajian komunikasi kepresidenan di Amerika Serikat, hal tersebut

dibuktikan dengan peran dari kantor komunikasi di Gedung Putih yang memerankan peran penting dalam kepresidenan di Amerika Serikat.

Studi tentang komunikasi kepresidenan di Amerika Serikat beragam, beberapa diantaranya adalah tentang pembelajaran tentang komunikasi kepresidenan yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat yang belajar dari komunikasi kepresidenan yang dilakukan oleh presiden sebelumnya dan penggunaan humor oleh presiden dalam melakukan komunikasi kepresidenannya selain itu adapula kajian komunikasi kepresidenan di Negara Cile, yang melihat pengaruh penasihat informal dalam kabinet di Negara yang menganut sistem multi partai.

Dalam jurnal yang ditulis Martha Joynt Kumar (2007) terkait dengan operasi komunikasi di White House pada masa pemerintahan Jimmy Carter. Jimmy Carter merupakan Presiden Amerika Serikat yang memiliki program komunikasi yang ambisius selama masa pemerintahannya. Jimmy Carter memberikan tiga pelajaran terkait operasi komunikasi di Gedung Putih, pertama adalah bahwa seorang *chief executive* harus membangun serta menjaga hubungan dengan publik, mendengar dan merespon masalah-masalah publik. Seorang *chief executive* membutuhkan disiplin ilmu terkait operasi komunikasi yang fokus memberikan perhatian kepada publik. Mendengar apa kata masyarakat sangat penting salah satu saluran yang menghubungkan antara publik dengan pemerintah adalah lewat pidato kepresidenan serta kegiatan-kegiatan yang didesain khusus untuk menyampaikan pesan-pesan spesifik. Kedua adalah elemen utama dari tugas seorang sekretaris adalah melakukan monitoring terhadap pemberitaan-pemberitaan yang berkaitan dengan pemerintahan serta perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan

masyarakat, Jimmy Powel sebagai sekretaris Gedung Putih di masa pemerintahan Carter dipercaya oleh awak media yang meliput di Gedung Putih memahami pemikiran Jimmy Carter dan selalu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh awak media. Dan yang terakhir, Kumar (2007) menyatakan bahwa dari pemerintahan Carter hal yang dapat dipelajari bahwa penting untuk memiliki komunikasi organisasi untuk kegiatan sehari-hari media. Komunikasi adalah dasar fungsi Gedung Putih untuk merespon kritik, rencana jangka panjang, dan koordinasi organisasi pemerintahan Amerika Serikat. Usaha-usaha Carter tersebut dilakukan pasca perang antara Amerika Serikat dengan Vietnam dan *Watergate* yang membuat kepercayaan publik kepada pemerintah menurun.

Don Waisanen (2015) dari University of New York membuat jurnal penelitian terkait penggunaan humor oleh Presiden Amerika Serikat untuk mengatasi krisis, Waisanen (2015) menyatakan bahwa humor kepresidenan dapat digunakan sebagai strategi persuasif untuk mengatasi sebuah krisis. *White House Correspondent Dinner (WHCD)* digunakan oleh presiden Amerika Serikat untuk menjawab hal-hal tabu atau hal-hal yang sulit diungkapkan secara langsung, sehingga Waisanen (2015) berpendapat bahwa dengan menggunakan humor-humor dalam pidato saat WHDC efektif untuk meminimalisir isu-isu yang berkembang serta kritik-kritik terhadap pemerintah.

Sementara itu kajian terkait komunikasi kepresidenan lainnya adalah terkait penasihat informal dalam kabinet di Negara dengan sistem multi partai. Jurnal tersebut ditulis oleh Peter M Siavelis tahun 2016. Siavelis (2016) menulis bahwa seorang presiden membutuhkan informasi, keahlian dan orang-orang

kepercayaannya. Di Chile setiap presiden menyelesaikan ketegangan di dalam pemerintahannya secara berbeda-beda dengan mengandalkan penasihat-penasihat untuk mengeluarkan sebuah kebijakan. Dalam sebuah Negara multi partai tensi yang terjadi lebih unik dibandingkan Negara dengan sistem satu atau dua partai. Di Negara dengan sistem multi partai, kabinet yang dibangun lebih riskan terjadi konflik karena adanya pembagian kekuasaan yang akan menurunkan efektifitas pemerintahan.

Sementara itu disatu sisi, orang-orang kepercayaan presiden memiliki hubungan lebih intim dengan presiden yang dapat melindungi presiden untuk mewujudkan tujuan presiden, tetapi orang-orang terdekat presiden akan diberikan posisi yang dekat dengan presiden dan lebih mudah mengakses informasi yang berkaitan dengan presiden, di Chile presidennya lebih percaya pada penasihat informal dibandingkan dengan penasihat formalnya. Di Amerika Serikat juga terdapat penasihat informal, namun strategi yang digunakan oleh presiden dalam berhadapan dengan tensi diantara penasihat formal (kabinet) dengan penasihat informal serta dampaknya terhadap pembuatan kebijakan akan berbeda dengan sistem multipartai (Siavelis, 2016).

Komunikasi politik juga dilakukan oleh seorang komunikator politik untuk mewujudkan tujuan politiknya. Soekarno, Presiden pertama Indonesia tersebut menjalankan strategi mercusuar, sebuah strategi dengan menjadikan Indonesia sebagai pusat dari Negara-negara berkembang dan menjalankan pembangunan dalam negeri secara besar-besaran (Suzanna, 2016), dalam strategi menjalankan strategi mercusuar, Soekarno menggenarkan komunikasi politiknya lewat

pertemuan-pertemuan yang beliau gagas dengan mengundang Negara-negara berkembang. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan tujuan Soekarno untuk menjadikan Indonesia sebagai pelopor Negara non-blok yang tidak berpihak pada blok barat dan blok timur.

Tulis dalam risetnya (dikutip dari Larace, 2009) menjelaskan bahwa di masa sebelum abad ke -20 (*pre-modern*) berdasarkan pendekatan komunikasi kepada publiknya, Presiden dapat diklasifikasikan dalam empat tipe yaitu, *open communicator*, *veiled communicator*, *patriotic cheerleaders* & *silent head*. Dalam *open communicator* seorang presiden menggunakan namanya sendiri dalam setiap pidato maupun surat resminya, sedangkan *veiled communicator* menunjukkan masalah kebijakan melalui komentar anonim yang ditulis oleh Presiden tersebut, tetapi lebih sering oleh orang lain namun atas nama Presiden dalam koran resmi kepresidenan yang secara umum dipahami untuk merefleksikan pandangan admisnitratif. *Patriotic cheerleaders* membuat banyak pidato publik yang fokus pada kesatuan nasional dan prinsip dari mkebijakan yang spesifik, sementara itu *silent head* membuat publisitas hanya sesekali melalui komunikasi tertulis dengan kongres.

Di abad 20, dalam jurnal *The Contemporary Presidency: The Carter White House Communication Operation: Lessons for his successor* (Martha, 2007) dijelaskan bahwa terdapat tiga pembelajaran yang didapat melalui operasi komunikasi di gedung putih di masa kepemimpinan Jimmy Carter. Pertama, penting bagi *chief executive* untuk mengembangkan dan menjaga hubungan dengan publik. Kedua, elemen utama dalam pekerjaan seorang sekretaris pers

adalah mengedepankan perubahan yang subsekuen dalam publisitas. Dan yang terakhir adalah presiden perlu untuk memiliki organisasi komunikasi untuk kegiatan pers sehari-hari.

Perkembangan komunikasi kepresidenan di Amerika Serikat terjadi seiring dengan pergantian kepemimpinan, hal ini juga terjadi di Indonesia. Hingga saat ini Indonesia sudah dipimpin oleh tujuh presiden mulai dari Soekarno hingga saat ini dibawah kepemimpinan Joko Widodo. Terdapat beberapa penelitian yang mengkaji tentang aspek komunikasi yang dilakukan oleh presiden-presiden Indonesia, Wejak (2000) menulis tentang presiden Soekarno, Wejak menulis tentang sikap dan metode komunikasi yang dijalankan oleh Soekarno lewat penjelasan tentang Soekarno serta membandingkannya dengan cara komunikasi Soeharto, suksesor kepemimpinan Soekarno. Hooker (dikutip dari Wejak, 2000) menulis tentang perbedaan gaya komunikasi yang bertolak belakang antara Soekarno & Soeharto, Soekarno dinilai lebih puitis dan kharismatik sedangkan Soeharto memiliki karakter yang lebih keras yang militeristik dalam penyampaian pesan baik secara formal maupun impersonal. Wejak menjabarkan contoh terkait pidato di hari kemerdekaan, Soeharto dalam pidato kemerdekaan berbicara tentang produktivitas, industri serta perkembangan ekonomi, Soeharto juga memotivasi bangsa Indonesia menuju kesuksesan di era orde baru.

Sementara itu, Soekarno, lebih memperhatikan kebijakannya dibandingkan kebijakan nasional. Soeharto dalam pidatonya sering menggunakan kata “kita”, Soeharto berbicara dengan otoritas tanpa kedekatan dengan audiensnya dengan menggunakan nada yang menunjukkan kepercayaan dirinya. Soekarno membawa

audiens dekat dengannya melalui berbagi pengalaman hidupnya. Soekarno dalam penyampaian orasinya lebih menggunakan pendekatan dialog kepada audiensnya sementara Soeharoto lebih monolog. Soekarno dalam pidatonya tidak hanya mengajak serta menginspirasi masyarakat tetapi juga melibatkan emosional dan menarik perhatian audiens, Soekarno juga lebih mengutamakan negosiasi dan mempersilahkan argumentasi sementara Soeharto tidak. Dari perbedaan gaya penyampaian pidato dari kedua presiden tersebut juga memperlihatkan cara memimpin keduanya saat memimpin Indonesia.

Sementara itu Dhani (2004) menyatakan bahwa terdapat perubahan dalam manajemen komunikasi kepresidenan saat kepemimpinan Habibie yang melanjutkan kepemimpinan Soeharto, dari rezim sebelumnya yang cenderung otoriter berubah menjadi rezim yang lebih terbuka dan menerima perbedaan pendapat lewat tindakan akomodatif Habibie. Habibie juga mulai memberikan kebebasan pers dengan mencabut peraturan menteri penerangan nomor 1/1984 dan peraturan baru yang lebih memudahkan izin penerbitan, meskipun SIUPP tetap ada namun persyaratannya dikurangi dari 16 menjadi hanya 3 syarat saja. Habibie juga melakukan komunikasi dengan para menterinya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yaitu melalui *e-mail*.

Dhani (2004) menulis bahwa keterbukaan Habibie kepada pers juga ditunjukkan dengan sering hadirnya Habibie dalam konferensi pers dengan awak media, hal ini juga menjadikan pertukaran informasi Presiden dengan pers menjadi lebih intens, Habibie juga mempersilahkan para wartawan yang ingin mewawancarainya secara khusus di hari Sabtu-Minggu di kediaman pribadinya.

Di era Habibie juga peran sosialisasi kebijakan dan informasi pemerintah tidak lagi sepenuhnya dipegang Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Penerangan, tetapi terdapat dua orang yaitu Arnold Baramuli dan Dewi Fortuna Anwar yang masing-masing menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan asisten presiden urusan luar negeri yang memegang peran sebagai juru bicara kepresidenan walaupun keduanya tidak diangkat secara resmi seperti tiga juru bicara presiden di era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (Dhani, 2004).

Di era presiden Megawati Dhani (2004) menulis bahwa diam adalah bagian dari komunikasi yang dilakukan oleh Presiden Megawati, walaupun di awal pemerintahannya, Megawati sempat membuka diri kepada awak media, namun tak berselang lama ia kembali menutup diri pada para wartawan. Beberapa perubahan terjadi, mulai dari pembatasan akreditasi kepada wartawan, penghapusan jabatan juru bicara kepresidenan hingga larangan kepada para wartawan untuk melakukan *doorstop*. Komunikasi presiden dengan anggota kabinet pun ikut berubah, di pemerintahan Megawati seorang menteri tidak dapat berkomunikasi langsung dengan presiden tetapi harus melewati Menteri Koordinator terlebih dahulu. Di era pemerintahan Megawati juga dibentuk Kementerian Komunikasi & Informasi, Anwar (dalam Dhani, 2004) mengatakan bahwa pembentukan kementerian tersebut untuk membantu penyebaran informasi pemerintah.

Di pemerintahan Megawati, jabatan juru bicara kepresidenan dihapuskan dan perannya digantikan oleh tiga menteri koordinator untuk hal-hal yang berkaitan

dengan kebijakan pemerintah, sedangkan untuk hal-hal yang menyangkut kepresidenan dijalankan oleh Menteri Sekretaris Negara. Masalah yang kemudian terjadi dalam pemerintahan Megawati adalah tidak kompaknya pernyataan yang disampaikan oleh anggota kabinet, terkadang pernyataan anggota kabinet saling bertentangan hal tersebut menunjukkan koordinasi yang kurang baik dalam pemerintahan Megawati. Kelemahan yang dimiliki oleh Megawati tersebut berusaha ditutupi oleh Taufik Kiemas sebagai *first gentleman*, bahkan Taufik Kiemas secara tidak langsung bertindak sebagai juru bicara presiden sekaligus penasihat presiden. Peran yang dijalankan oleh Taufik Kiemas yang pada saat itu juga merangkap sebagai anggota legislatif dinilai janggal dan tidak sesuai dengan aturan, apalagi dalam berbagai kesempatan, Taufik Kiemas mewakili Presiden dalam berbagai pertemuan bilateral (Dhani, 2004).

Kuswandari (2005) melakukan penelitian tentang komunikasi politik di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Penelitian Kuswandari tersebut mengangkat tentang penggunaan bahasa militer dalam pemerintahannya, penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh trauma masyarakat terhadap budaya militer di pemerintahan. Penelitian Kuswandari menggunakan analisis wacana kritis yang fokus pada wacana dan teks yang digunakan oleh SBY untuk mempromosikan ideologinya dengan tujuan memelihara kekuasaan. Fokus penelitian ini adalah melihat SBY merepresentasikan ideologi militerisme dalam teks-teks pidato lisannya, menemukan nilai-nilai baru yang SBY ciptakan dalam ideologi yang ditularkan kepada masyarakat lewat teks pidatonya. Teks pidato yang digunakan dalam analisis penelitian Kuswandari tersebut adalah transkrip

pidato dari Oktober hingga Desember 2004 dengan mempertimbangkan arahan yang berkaitan dengan kepentingan nasional serta kedekatan konteks penelitian.

Dengan menggunakan model Norman Farielough, Kuswandari menyimpulkan SBY terbukti membawa ideologi baru melalui teks-teks pidato yang disampaikan, ideologi yang disampaikan oleh SBY tersebut termasuk nilai-nilai militer yang ditekankan pada makna positif secara hegemoni, hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya nilai-nilai militer yang dimaknai positif oleh SBY yaitu loyalitas, kedisiplinan, kejantanan sedangkan ideologi baru yang dibawa oleh SBY yaitu perdamaian, profesionalisme dan konsolidasi. Selain itu terdapat perubahan makna dalam nilai-nilai yang sempat dibawah oleh horde baru yaitu pada kata-kata seperti normalisasi, demokrasi dan pembangunan (Kuswandari, 2005).

Sementara itu penelitian Harahap (2013) melakukan penelitian tentang penggunaan PO-BOX DAN sms 9949 sebagai saluran komunikasi yang digunakan di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Penggunaan PO BOX & SMS tersebut merupakan bentuk jalinan komunikasi yang dilakukan SBY dengan rakyat lewat penggunaan pesan persuasive dengan metode yang informative dan persuasif dengan tujuan mempengaruhi khalayak dengan cara memberi penerangan dengan menyampaikan pesan yang sesuai dengan kepentingan politik SBY.

Tujuan SBY membuka jalur komunikasi lewat SMS & PO BOX 9949 adalah untuk menampung masyarakat dengan cara yang lebih mudah, melalui PO BOX 9949 SBY menggunakan metode penyampaian pesan yang persuasif dan

informatif yaitu bentuk dan isi pesan yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi khalayak dalam hal ini masyarakat dengan memberi penerangan lewat penyampaian fakta, data dan pendapat yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan. SMS & PO BOX 9949 menurut Harahap (2013) adalah bentuk komunikasi interpersonal yang dijalankan oleh SBY, hal tersebut merupakan usaha pengelolaan citra diri atau pencitraan SBY sebagai presiden terpilih, hal tersebut dapat dilihat dari surat jawaban dari Staf Khusus Presiden kepada pengirim surat yang persuasif serta menggiring opini bahwa presiden sudah bekerja sesuai dengan harapan rakyat. Penggunaan hal tersebut juga digunakan untuk mecitrakan diri SBY dihadapan masyarakat bahwa SBY adalah pemimpin yang peduli dengan rakyat lewat penyampaian bahwa SBY sudah memperhatikan SMS masyarakat yang masuk kepadanya. Presidenb Soeharto atas usul dari Wakil Presiden saat itu, Soedharmono juga pernah melakukan hal yang hampir mirip dengan yang dilakukan oleh SBY dengan nama Kotak Pos Tromol 5000. Kotak Pos Tromol 5000 tersebut dirancang untuk menerima aduan masyarakat sebagai bentuk pengawasan kepada pemerintah.

Staf Khusus Presiden dalam pengelolaan SMS & PO-BOX 9949 adalah sebagai *spin doctor*. Hal tersebut dilakukan untuk mempengaruhi opini publik yang berkembang di masyarakat dengan cara penyampaian infomrasi yang bias agar menyenangkan hati masyarakat, hal tersebut juga dilakukan untuk menahan opini negatif tidak berkembang. Dalam konteks komunikasi kepresidenan, unsur *attention, desire & interest* sudah terpenuhi dalam penggunaan SMS & PO-BOX 9949, namun pada aspek *decision & action* berjalan tidak optimal sehingga tidak

menimbulkan dampak politik yang tinggi kepada masyarakat. Harahap (2013) memberikan saran bahwa selain membuka saluran komunikasi dengan rakyat, presiden harus menunjukkan keputusan dan tindakan yang optimal lewat tindakan nyata yang meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Selain itu presiden juga harus melakukan evaluasi serta pengawasan kepada para pembantunya yang berperan sebagai perantara dalam menjalankan komunikasi politik dengan rakyat.

Media memiliki kekuatan dalam membentuk opini publik, Djelantik (2016) melakukan penelitian tentang strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh presiden Indonesia saat ini, Joko Widodo. Dalam penelitiannya Djelantik (2016) menyatakan bahwa Joko Widodo menggunakan media untuk meningkatkan citra positifnya di mata masyarakat, Joko Widodo juga mengkampanyekan dirinya sebagai *media darling*. Djelantik melakukan analisis SWOT dalam komunikasi politik yang dilakukan oleh Jokowi, kekuatan Joko Widodo ada pada sosoknya yang sederhana sehingga membuat masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat menyukai sosok Joko Widodo. Meskipun mendapatkan sedikit dukungan dari parlemen, namun Joko Widodo mendapatkan banyak dukungan dari *grass root*.

Tim komunikasi Joko Widodo harus terus mendorong komunikasi politik yang efektif untuk menjaga stabilitas dukungan dari parlemen. Joko Widodo harus mengatur dan menjaga saluran komunikasi politik untuk tetap mendapatkan dukungan dari rakyat, Djelantik (2016) menyatakan bahwa bekerja keras untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan harus diikuti dengan mengatur strategi manajemen media dan membentuk opini positif dari publik dalam negeri

maupun publik internasional. Dukungan internasional untuk Joko Widodo dapat membantu Joko Widodo mewujudkan tujuan dari kepemimpinannya serta memperkuat posisi Joko Widodo dalam isu-isu global. Artikel dalam media-media internasional, khususnya saat pemilihan umum berlangsung berhasil membentuk citra positif Indonesia di mata dunia.

Dari tujuh presiden yang pernah memimpin Indonesia terdapat perbedaan mencolok antara kepemimpinan Soeharto dan Gus Dur dalam berbagai aspek, pada masa pemerintahan Soeharto, untuk melakukan peliputan di lingkungan Istana diharuskan melalui *screening* yang dilakukan oleh pihak militer, selain itu dwi fungsi ABRI yang membolehkan ABRI untuk berpolitik juga berdampak pada pemerintahan Soeharto yang didukung kuat oleh kekuatan militer, sedangkan pada pemerintahan Gus Dur, media diberi kelonggaran dengan hanya mensyaratkan surat rekomendasi pemimpin redaksi untuk mendapat tanda pengenal yang mengizinkan melakukan peliputan di Istana, selain itu akses untuk berkomunikasi dengan Gus Dur pun, para staf jauh lebih mudah dibandingkan saat pemerintahan Soeharto.

Gus Dur juga menjadi salah satu dari sedikit presiden Indonesia yang berkenan untuk di *doorstop* oleh awak media. Di pemerintahan Gus Dur pula, Kyai berperan penting sebagai *informal advisor* bagi Presiden Gus Dur contohnya adalah saat Gus Dur mengeluarkan dekrit presiden sesaat sebelum Gus Dur dimakzulkan dari posisi presiden Indonesia, dekrit tersebut merupakan usulan dari para Kyai yang berkumpul di Batu Ceper.

Gus Dur terpilih sebagai Presiden pada tahun 1999 setelah mengalahkan Megawati Soekarnoputri dalam pemilihan yang dilakukan oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI). Gus Dur didampingi oleh Megawati Soekarnoputri yang mengalahkan Hamzah Haz dalam pemilihan wakil presiden yang dilakukan sehari setelah pemilihan presiden. Kabinet Gus Dur dinamai kabinet persatuan nasional yang diisi oleh berbagai kalangan dari berbagai latar belakang baik latar belakang politik, sosial maupun agama sehingga kabinet persatuan nasional ini tak jarang dinamai kabinet pelangi. Pemerintahan Gus Dur berjalan dengan cukup baik di awal, namun seringkali Gus Dur melakukan pergantian formasi kabinet membuat pemerintahannya goyah, hubungan dengan wakil presiden, Megawati Soekarnoputri pun menjadi renggang setelah Laksmana Sukardi, menteri dari PDI-Perjuangan diganti oleh Gus Dur.

Pemerintahan Gus Dur berada pada masa transisi pasca turunnya Soeharto yang telah memimpin selama 32 tahun, munculnya gerakan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI menjadi salah satu permasalahan dalam pemerintahan Gus Dur, untuk menyelesaikan hal tersebut, Gus Dur menggunakan pendekatan kebudayaan dan pendekatan kemanusiaan, misalnya saja dengan mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua serta banyak memberikan bantuan kemanusiaan untuk warga Aceh. Selain itu Gus Dur juga dikenal sebagai pemimpin yang sering melakukan lawatan ke luar negeri, hal tersebut dilakukan untuk memperbaiki citra Indonesia pasca krisis 1998.

Gus Dur merupakan satu-satunya presiden Indonesia yang memiliki latar belakang santri, apalagi Gus Dur merupakan cucu pendiri organisasi Islam

terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), K.H. Hasyim Asyari, hal tersebut berdampak pada cara Gus Dur memimpin Indonesia, Istana dibuka seluas-luasnya untuk rakyat dan akses informasi dibuka hal tersebut dilakukan lewat pembubaran Kementerian Penerangan dan Lembaga Sensor yang dinilai membatasi akses informasi masyarakat. Kedekatannya dengan banyak kalangan juga dipengaruhi oleh karakter Gus Dur yang sering melemparkan humor-humor untuk lawan bicaranya, hal ini dilakukan Gus Dur untuk mencairkan suasana.

Kepemimpinan Gus Dur sebagai presiden telah dijadikan penelitian oleh Dhani (2002) dari Universitas Indonesia, penelitian tersebut berisi mengenai manajemen komunikasi Gus Dur dalam menghadapi tiga kasus yaitu penonaktifan Jenderal Wiranto dari posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, isu penangkapan Kapolri Bimantoro dan polemik halal-haram Ajinomoto. Hasil penelitian Dhani tersebut menyatakan bahwa Presiden Gus Dur tidak menjalankan konsep manajemen komunikasi kepresidenan yang umumnya dijalankan oleh seorang Presiden, Dhani menyatakan bahwa dalam menyampaikan informasi Presiden Gus Dur tidak melakukan pengolahan informasi terlebih dahulu dan cenderung spontan dalam menyampaikan pendapat atau informasinya, menurut Dhani juga berkeyakinan bahwa gaya komunikasi Gus Dur tersebut dilatarbelakangi oleh latar belakang Gus Dur yang berasal dari pesantren yang memiliki bentuk komunikasi terbuka dalam menyelesaikan sebuah masalah, Dhani juga menambahkan bahwa karakter Gus Dur yang *extrovert* dan keterbatasan fisiknya menjadi salah satu hal yang berpengaruh terhadap gaya komunikasinya. Seringnya Gus Dur melontarkan ucapan-ucapan yang

kontroversial dinilai Dhani merupakan salah satu bentuk dari permainan politik presiden yang berupa percobaan dan hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam komunikasi politik, tetapi hal tersebut berdampak pada citra Gus Dur sebagai seorang presiden di mata masyarakat.

Rekomendasi yang diberikan Dhani adalah supaya Presiden membentuk sub organisasi di dalam tubuh kepresidenan yang dipimpin oleh kepala staf yang jabatannya setingkat menteri sehingga turut berperan dalam pengambilan keputusan yang memiliki dedikasi serta kemampuan analisis yang tinggi, Dhani juga memberikan rekomendasi agar presiden membentuk tim juru bicara kepresidenan yang kredibel dan secara berkala mengundang pimpinan media massa untuk bertemu, dari aspek juru bicara kepresidenan, Dhani menyarankan agar tim juru bicara kepresidenan meningkat efisiensi dan koordinasi kerja yang jelas.

Penelitian lain yang ditulis oleh Sari (2001) mengenai manajemen strategik juru bicara kepresidenan pada masa pemerintahan Gus Dur yang menggunakan metode kualitatif dalam bentuk evaluatif tersebut fokus pada manajemen strategik yang dilakukan oleh tim juru kepresidenan Gus Dur. Hasil penelitian Sari tersebut menyatakan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh tim juru bicara kepresidenan pada saat itu masih berjalan belum maksimal, hal tersebut menurut Sari disebabkan oleh kurangnya pengalaman yang dimiliki oleh tim juru bicara kepresidenan. Pada level institusi, Sari berpendapat bahwa institusi kepresidenan dan juru bicara kepresidenan lebih mempertanyakan masalah-masalah politik dibandingkan masalah-masalah yang sifatnya substansif.

Sari juga melihat bahwa pemilihan tim juru bicara kepresidenan lebih mementingkan kedekatan emosional antara Presiden Gus Dur dengan anggota juru bicara kepresidenan dibandingkan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki, hal tersebut berbeda dengan pemilihan tim juru bicara kepresidenan di Amerika Serikat, biasanya seorang juru bicara kepresidenan dipilih berdasarkan pengalamannya saat melakukan kampanye pemilihan presiden yang telah terbukti berhasil, di Amerika Serikat juru bicara kepresidenan biasanya dipilih dari kalangan akademisi universitas. Sari juga menyatakan bahwa struktur administrasi, birokrasi, dan substansi dalam tim juru bicara kepresidenan tidak jelas, hal ini ditambah tidak adanya dukungan dana maupun infrastruktur yang memadai dari sekretariat kepresidenan yang membuat ruang gerak juru bicara menjadi terbatas. Karena pembagian kewenangan yang tidak jelas membuat koordinasi antar anggota tim juru bicara tidak terkoordinir dengan baik dan jelas.

Rekomendasi yang diberikan oleh Sari (2001) terkait tim juru bicara kepresidenan adalah dalam hal pemilihan anggota juru bicara kepresidenan, Sari menyarankan agar melakukan pemilihan berdasarkan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki anggota juru bicara tersebut dibandingkan kedekatan personal juru bicara dengan presiden, selain itu Sari juga menyarankan agar tim juru bicara kepresidenan bersikap sebagai partisipan dan benar-benar mewakili presiden, dibandingkan bersikap independen.

Terbatasnya penelitian Dhani yang melihat Gus Dur hanya dari tiga isu saja dan penelitian Sari yang fokus pada aspek juru bicara kepresidenan saja menjadi salah satu latar belakang peneliti dalam membuat penelitian ini berdasarkan

perspektif yang lebih luas yaitu meliputi komunikasi politik Gus Dur dengan berbagai pihak dalam posisi sebagai Presiden Indonesia. Selain itu penelitian ini dijadikan sebagai salah satu upaya dari peneliti untuk menambahkan kajian komunikasi kepresidenan di Indonesia, karena selama ini kajian komunikasi kepresidenan lebih banyak berkembang di Amerika Serikat, termasuk di dalamnya pembahasan mengenai komunikasi kepresidenan di Amerika Serikat yang terdapat dalam jurnal *Presidential Studies Quarterly* yang sudah memasuki *volume* ke 47.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, pendekatan fenomenologi dipilih oleh peneliti karena data yang disajikan oleh peneliti berasal dari pengalaman langsung orang-orang terdekat Gus Dur seperti keluarga, staf, menteri hingga juru bicara kepresidenan pada masa pemerintahannya. Selain itu untuk mengkaji komunikasi yang dilakukan oleh Gus Dur yang didapat dari pengalaman-pengalaman informan penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan yaitu humor politik dan perspektif *non-western*.

Humor politik adalah strategi yang dilakukan oleh komunikator politik untuk menyampaikan pesan-pesan politik agar mudah dipahami oleh komunikan atau publiknya, terutama untuk membuat komunikasi yang disampaikan menjadi lebih interaktif (Graham, Papa, dan Brooks, dalam Waisanen, 2015). Humor politik dapat berfungsi juga untuk mengurangi ketegangan antara elit politik dengan publiknya atau antar para elit politik, selain itu humor politik juga pada umumnya digunakan sebagai media kritik rakyat kepada pemerintah lewat karikatur ataupun media kreatif lainnya. Pendekatan humor politik digunakan oleh peneliti untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan cara Gus Dur berkomunikasi dengan banyak

pihak yang sering melemparkan humor-humor politik. Humor-humor tersebut Gus Dur lemparkan untuk mengurangi ketegangan dan mencairkan suasana, misalnya saat bertemu awak media, bertemu dengan kepala Negara-negara sahabat, sampai saat berdialog dengan masyarakat.

Sementara itu perspektif *non-western* adalah sudut pandang yang digunakan dengan menggunakan cara pandang timur, yang bersumber pada risalah-risalah klasik Asia, konsep budaya asia, perpaduan antara perspektif barat dan timur (Kaid, 2015, h.630). Kajian komunikasi perspektif *non-western* khususnya Asia juga hadir untuk menjawab berbagai fenomena yang tidak dapat dikaji dengan perspektif barat, terutama yang berkaitan dengan aspek budaya-budaya timur yang tidak sama dengan budaya barat. Perspektif *non-western* digunakan oleh peneliti untuk mengkaji aspek-aspek dalam komunikasi Gus Dur yang memiliki ciri khas budaya timur, seperti menggunakan kyai sebagai *informal advisor* dalam pemerintahannya, mengunjungi para kyai disela-sela kunjungan luar negeri sampai dengan dialog dengan masyarakat yang dilakukan setelah beribadah.

Selain untuk menambah studi tentang kajian komunikasi kepresidenan Indonesia, peneliti juga tertarik untuk melakukan penelitian yang fokus pada masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) karena Gus Dur merupakan presiden yang menjabat di masa transisi pasca runtuhnya orde baru, selain itu Gus Dur juga memiliki latar belakang sebagai seorang kyai dan berasal dari keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU), sebuah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, hal tersebut berpengaruh pada cara Gus Dur berkomunikasi baik dengan staf, anggota kabinet, kepala Negara sahabat, parlemen bahkan sampai dengan

masyarakat, komunikasi Gus Dur tersebut dijalani dengan menyelipkan humor untuk mempermudah pesan yang ingin Gus Dur sampaikan dipahami oleh lawan bicaranya. Melihat keunikan Gus Dur tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“KAJIAN KOMUNIKASI KEPRESIDENAN (STUDI KOMUNIKASI KEPRESIDENAN MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN K.H. ABDURRAHMAN WAHID (GUS DUR) 1999-2001)”**.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji komunikasi yang dilakukan oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dalam masa jabatannya sebagai presiden dari tahun 1999-2001.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana komunikasi kepresiden di masa kepemimpinan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tahun 1999-2001?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan studi komunikasi kepresidenan di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi gambaran terkait komunikasi yang dilakukan oleh Presiden di Indonesia khususnya K.H.

Abdurrahman Wahid dalam konteks kepresidenan, baik itu dengan staf di Istana, parlemen, sampai dengan masyarakat dan dunia internasional.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi diantara empat fungsi *input* dalam sebuah sistem politik. Komunikasi politik merupakan faktor penting dalam sebuah proses politik yang dilakukan oleh komunikator politik dalam hal ini seorang aktor politik (Sulaiman, 2013). Lilleker (dalam Sulaiman, 2013) komunikasi antara pimpinan lembaga kekuasaan dengan rakyatnya merupakan hal penting dalam sebuah sistem politik. Tanpa komunikasi politik, sebuah sistem politik tidak akan berjalan dengan baik, perlu adanya komunikasi antara kedua belah pihak dalam hal ini penguasa atau elit politik kepada publik dalam hal ini masyarakat. Komunikasi politik juga dapat diartikan sebagai sarana penghubung antara pemegang kebijakan dengan rakyat. Mulyana, Arifin, & Cangara (2011, h.260) menulis bahwa komunikasi politik adalah proses komunikasi yang berdampak politik. Komunikasi politik tidak terletak pada sumber pesan melainkan pada isi dan tujuan dari pesan politik tersebut disampaikan yang dalam penyampaianya cenderung terdapat motif.

Bentuk komunikasi politik tidak hanya dalam bentuk komunikasi verbal melalui pidato ataupun pernyataan baik secara langsung maupun tertulis dari aktor politik, tetapi juga komunikasi non verbal, bahasa politik non verbal tersebut dalam bentuk tata busana, tata rias, gaya rambut yang disebut citra politik

(McNair, 2011, h.4) sementara Graber (dalam McNair, 2003, h.3) menyatakan bahwa bahasa paralinguistik seperti bahasa tubuh dan tindakan politik juga termasuk dalam bentuk komunikasi politik.

Mulyana (2013, h.12) menulis bahwa bentuk-bentuk komunikasi politik beragam bahkan bisa berupa penciptaan dan penyebaran mitos dan simbol Negara, dalam bentuk berita di media massa bahkan dapat juga melekat pada tayangan hiburan dan budaya populer. Bahkan sebuah museum menurut Teeger & Vinitzky-Seroussi (dalam Mulyana, 2013, h.12) sebuah museum dapat dijadikan sarana komunikasi politik seperti museum apartheid di Afrika Selatan yang menunjukkan bawah Afrika Selatan sudah terbebas dari penindasan kulit putih yang dibuktikan dengan kepemimpinan kulit hitam di Afrika Selatan.

Kajian tentang komunikasi politik berkembang dan banyak berorientasi pada kampanye politik dan opini publik. Graber (2005) menulis bahawa dalam rentan waktu tiga tahun (sejak tahun 2000 hingga 2003) terdapat 11 jurnal yang didalamnya terdapat 137 artikel dengan topik kajian utama komunikasi politik. 11 jurnal tersebut adalah *American Journal of Political Science*, *Harvard International Journal of Press/Politics*, *Communication Research*, *Journal of Communication*, *Journal of Mass Media Ethics*, *Journal of Media and Religion*, *Journal of Media Economics*, *New Media and Society*, *Political Communication*, *Popular Communication Television and New Media*. Dalam 137 artikel yang dipilih untuk analisis rinci yang berfokus pada materi pelajaran, desain penelitian, metode dan temuan. Sejumlah besar artikel berasal dari dua jurnal yang memfokuskan sebagian secara khusus pada sub bidang komunikasi politik. Tabel

dibawah ini menyajikan tema utama yang ditemukan di masing-masing artikel tersebut

Theme Categories	# article carrying theme	
Elections Campaign	21 (15,3%)	
New Media	14 (10,2%)	
Civic Engagement	13 (9,5%)	
International Relations	12 (8,7%)	
Information Processing	9 (6,5%)	
Public Opinion	9 (6,5%)	
Campaign Advertising	7 (5,1%)	
Political Actors & Rhetorics	7 (5,1%)	
Media Economics	7 (5,1%)	
Popular Culture	7 (5,1%)	
Journalism Practices	6 (4,4%)	
Framing	5 (3,6%)	
Media Bias	4 (2,9%)	
Agenda Setting	4 (2,9%)	
Comparative Politics	4 (2,9%)	
Elections	3 (2,1%)	
Talk Radio	3 (2,1%)	
Television	2 (1,4%)	
Total	137 (100%)	

Tabel 1. Daftar Kajian Komunikasi Politik

Sumber: Graber, 2005.

Dari tabel diatas, dapat dilihat gambaran kajian komunikasi politik hingga tahun 2003 lebih banyak fokus pada kampanye pemilihan umum, opini publik dan penggunaan media baru. Hal ini menunjukkan masih belum banyak ragam dalam

kajian komunikasi politik, tentu perlu adanya variasi dalam kajian komunikasi politik untuk membuat perkembangan kajian komunikasi politik didunia menjadi lebih beragam.

2.1.1. Perkembangan Komunikasi Politik

Perkembangan komunikasi politik di dunia diawali pasca perang dunia ke I khususnya di Amerika dan Eropa. Perkembangan studi komunikasi politik tidak akan lepas dari studi tentang komunikasi massa. Walter Lippman & Harold Lasswell memelopori penelitian yang akan menjadi akar dari perkembangan komunikasi politik. Lippman fokus pada penelitian yang berkaitan dengan propaganda dan opini publik, Lippman melihat konflik yang terjadi di perang dunia I menghasilnya banyak propaganda kepada masyarakat dengan teknik propaganda yang berbahaya, publik yang takut terhadap pengaruh propaganda politik tersebut menjadi awal Lippman melakukan kajian tentang propaganda dan opini publik. Kaid (2015, h.5) menyatakan bahwa studi komunikasi politik awalnya distimulasi oleh keprihatinan normatif tentang perlunya pers yang bebas dan publik yang melek informasi.

Sementara itu, Harold Lasswell fokus pada studi efek media. Lasswell melakukan penelitian terkait analisis isi terhadap dampak pesan propaganda yang dilakukan oleh Jerman saat melawan Prancis, Inggris, dan Amerika pada perang dunia I, propaganda yang dilakukan pada saat itu menggunakan media radio, hasil penelitian Lasswel tersebut menjadi dasar terhadap pemikiran Lasswel tentang model lima pertanyaan komunikasi, yaitu *‘who say what in which channel to whom with what effect’* (Kaid, 2015, h.5). Studi Erie County yang dilakukan oleh

Paul Lazarsfeld juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan komunikasi politik, Lazarsfeld melakukan penelitian tentang perilaku pemilih. Tujuan dari studi tersebut adalah untuk mengetahui efek langsung media terhadap bagaimana masyarakat memilih dalam pemilihan presiden, hasil dari penelitian tersebut adalah media memiliki efek minimal terhadap perilaku pemilih, hanya 54 dari 600 responden yang menyatakan berpindah pilihan, dan dari 54 responden tersebut, hanya sedikit yang menyatakan berubah pilihan karena dipengaruhi secara langsung oleh media (Converse, dalam Kaid, 2015).

Komunikasi politik telah berkembang di Eropa sejak tahun 1960, Josep Trenaman dan Denis McQuail mempelopori penelitian komunikasi politik di Eropa dengan melakukan penelitian tentang pengaruh televisi terhadap sikap pemilih di pemilihan umum Inggris 1959, dalam penelitiannya tersebut ditemukan bahwa siaran pemilu di televisi Inggris membantu menambah pengetahuan politik pemilih, meskipun siaran tersebut tidak berpengaruh terhadap sikap pemilih pada partai politik peserta pemilu (Kaid, 2015). Dalam perkembangan politik di Eropa setelah penelitian yang dilakukan Trenaman & McQuail, studi komunikasi politik Eropa fokus pada pengaruh televisi atau media terhadap opini publik, studi komunikasi politik Eropa juga fokus pada kampanye pemilu, hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh kajian komunikasi politik Amerika terhadap kajian komunikasi politik di Eropa. Studi komunikasi politik di Eropa selama ini hanya berorientasi pada studi nasional satu Negara saja, hal ini dikarenakan adanya hambatan bahasa karena Eropa terdiri dari 40 negara dengan bahasa yang beragam selain itu kurangnya peran serta jumlah asosiasi komunikasi di Eropa juga

menjadi penghambat dalam berkembangnya studi komunikasi di Eropa dalam lingkup regional (Kaid, 2015).

Perkembangan komunikasi politik di Asia dimulai sekitar tahun 1980 di Hongkong dan China, fokus dari studi komunikasi politik di Asia adalah pada interaksi antara media dan Negara (Kaid, 2015). Pasca peristiwa Tianamen di tahun 1989, studi komunikasi politik di Asia mulai mengarah pada studi tentang efek media dan pembentukan opini publik. Studi komunikasi politik pertama di China dilakukan oleh CC Lee yang melakukan penelitian tentang interaksi antara kebebasan pers dan gerakan demokrasi di Negara tersebut, hasil penelitian Lee menjelaskan bahwa media massa telah melakukan manipulasi informasi untuk membentuk opini publik, sementara itu terkait dengan aksi protes di Lapangan Tiananmen, Zhoue He yang pada tahun 1996 melakukan penelitian yang hasilnya adalah media nasional China melakukan legitimasi dan delegitimasi gerakan pada waktu yang berbeda, hasil tersebut didapat dengan melakukan wawancara mendalam serta analisis konten di Koran *people's daily* dan *voice of America*.. (Kaid, 2015).

Hongkong merupakan salah satu Negara di Asia yang banyak menghasilkan studi tentang komunikasi politik, meskipun fokus penelitian komunikasi politik Hongkong hanya pada isu pengembalian Hongkong ke China di tahun 1997. Studi komunikasi politik di Hongkong lebih peduli pada interaksi antara media dengan kekuasaan politik dibandingkan studi tentang efek media, kampanye dan pembentukan opini publik, di Negara tetangga Hongkong, Taiwan, isu yang diangkat dalam studi komunikasi politik lebih beragam, mulai dari isu

politik media hingga isu iklan politik. Salah satu penelitian yang dilakukan di Taiwan dilakukan oleh P. Kuo di tahun 1993 yang meneliti fungsi demokrasi media berita, hasil penelitiannya ditemukan bahwa media cetak di Taiwan tidak memiliki standar media dalam professional dalam lingkungan masyarakat demokratis. (Kaid, 2015).

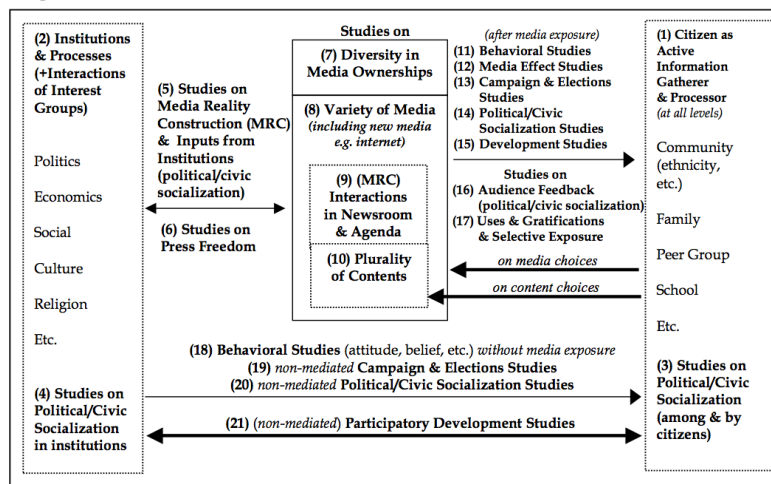
Jepang sebagai salah satu Negara yang banyak menghasilkan sarjana dibidang kajian media menurut Kaid (2015, h.643) studi komunikasi politiknya masih terbatas pada pendekatan teoritis dan kedalaman penelitian. Ito tahun 2000 melakukan penelitian tentang komunikasi politik yang terjadi di Jepang, ia menyatakan bahwa akan sulit menerapkan teori komunikasi barat di Jepang karena karakter budaya masyarakat Jepang yang unik, misalnya saja teori *spiral of silence*, teori tersebut akan sulit diterapkan di Jepang karena budaya masyarakat Jepang cenderung kohesif dan menghindari topik politik untuk menghindari perselisihan. Studi lain dilakukan oleh Feldman tahun 1993 yang meneliti tentang hubungan wartawan dengan anggota parlemen Jepang, hasil penelitian Feldman tersebut adalah interaksi antara anggota parlemen dengan wartawan sangat erat dan hal tersebut berdampak pada liputan politik (Kaid, 2015).

Studi komunikasi politik di Asia memberikan perhatian besar pada kajian mengenai kebebasan pers dan peristiwa politik, hal tersebut menyebabkan studi komunikasi politik di Asia kurang memberi perhatian pada kajian mengenai efek media dan pembentukan opini publik. Terbatasnya kajian mengenai komunikasi politik di Asia disebabkan oleh perbedaan kondisi sosial, politik, dan budaya di

masing-masing Negara, hal tersebut juga berdampak pada sulitnya menerapkan teori barat dalam kajian komunikasi politik di Asia.

Effendi Gazali dalam disertasinya memberikan sebuah model komunikasi politik Model ini mencakup pendekatan para ilmuwan politik abad ke-20. Salah satu pendekatan tersebut menyimpulkan bahwa esensi politik adalah tindakan, tetapi bukan tindakan individu karena tindakan individu dianggap tidak efektif dalam politik, namun tindakan kelompok. Dengan demikian, model ini memvisualisasikan arena tertentu untuk menganalisis berbagai institusi dan proses yang terjadi di sekitar mereka, apa yang disebut "interaksi kelompok kepentingan." Arena khusus tersebut terdiri dari lembaga pemerintah, ekonomi, budaya, agama, dll (Gazali, 2004).

Figure 6: A Political Communication Field Model



Gambar 1. Model Komunikasi Politik

Dikutip dari Gazali (2004).

Model Bidang Komunikasi Politik menghubungkan tempat khusus dengan warga negara (individu dan kelompok) sebagai pengumpul informasi dan pengolah informasi yang aktif di semua tingkat, seperti masyarakat, keluarga, kelompok sebaya, sekolah, dan lain-lain. Model Lapangan Komunikasi Politik mengingatkan kita bahwa beberapa daerah perlu dieksplorasi seperti studi penggunaan dan gratifikasi dengan penekanan pada peran aktif warga negara dalam hal paparan selektif, jenis media dan pilihan konten, dan umpan balik warga negara terhadap konten media.

Untuk memastikan bahwa warga memainkan peran pengumpul dan pengolah informasi aktif, Model Bidang Komunikasi Politik memerlukan tiga kondisi yang diperlukan: yaitu keragaman kepemilikan, keragaman media, dan pluralitas konten media.

2.1.2. Komunikasi Politik Perspektif Non-Western

Kajian komunikasi di dunia saat ini terbagi menjadi kajian komunikasi *western* dan *non-western*. Littlejohn & Foss (2009, h.48) memberikan penjelasan terkait kajian perspektif *western* yang memiliki ciri-ciri antara lain menekankan kajiannya pada individualisme, terdapat kontrol terhadap alam sekitar, melihat dunia dalam posisi pusat, pinggiran, dan keduanya, terikat dalam konsep ruang dan waktu, kajian *western* juga menyatakan bahwa pengetahuan merupakan suatu hal yang sifatnya atomistik dan deduktif. Berikut perbedaan kajian barat dan non-barat menurut Littlejohn.

Perspektif Barat	Perspektif Timur
Menekankan pada individualisme	Menekankan adanya saling tanggung – jawab antara individu dan masyarakat
Adanya kontrol terhadap alam sekitar	Terciptanya harmoni dengan alam sekitar
Melihat dunia dalam posisi pusat pinggiran dan diluar keduanya	Melihat dunia sebagai suatu kesatuan yang utuh
Terikat dalam konsep ruang dan waktu	Waktu dianggap sebagai sesuatu yang tidak terbatas
Pengetahuan merupakan sesuatu yang bersifat atomistis dan deduktif	Pengetahuan merupakan suatu sistim deduktif dimana ontologi, epistemplogi dan axiologi saling terkait satu sama lain

Sumber: Littlejohn & Fos, 2009: 48

Dissanayake (2003) menyatakan bahwa sebagian besar (71%) bahan ajar dalam pembelajaran teori-teori komunikasi berasal dari Amerika, hal ini membuktikan bahwa kajian tentang komunikasi didunia masih didominasi oleh paham dan pendekatan budaya barat dalam hal ini Amerika. Ada dua penyebab yang diutarakan oleh Dissanayake (2003) yang menjadi penghambat dalam berkembangnya kajian komunikasi perspektif Asia yaitu (1). Kebanyakan tokoh-tokoh atau ilmuwan komunikasi menuntut ilmu di barat, (2). Hingga saat ini tidak teori yang bersumber dari timur, hal tersebut membuat bahan ajar untuk teori komunikasi sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali yang menggunakan pespektif timur. Oleh karena itu kebutuhan untuk perkembangan kajian komunikasi di dunia dapat dipenuhi dengan mempelajari berbagai fenomena komunikasi menggunakan kajian perspektif non-barat.

Miike (2002, h.2) menyatakan bahwa kajian teori komunikasi di Asia harus bersumber pada budaya-budaya lokal (kearifan lokal) masyarakat setempat, sehingga budaya menjadi fokus kajian komunikasi dalam perspektif Asia, Dissanayake (2003) menyatakan bahwa terdapat empat hal yang dapat dikaji menggunakan perspektif Asia, yaitu: (1). Teks-teks klasik, (2). Tradisi dan praktik budaya, (3). Ritual dan pertunjukkan (misalnya upacara, tarian), (4). Perilaku sehari-hari masyarakat yang menjunjung tinggi budaya adat istiadatnya.

Untuk melengkapi kajian komunikasi di dunia, perspektif *non-western* hadir, perspektif baru tersebut terdiri dari perspektif non-barat seperti, Asia, Afrika, dan Islam. Littlejohn & Foss (2009, h.47) menyatakan bahwa perspektif Asia bersumber pada risalah-risalah klasik Asia, konsep budaya asia, perpaduan antara perspektif barat dan timur yang fokus pada filosofi-filosofi besar dari China dan India dan budaya yang terdapat di Asia. Chu (dalam Kaid, 2015, h.630) menyatakan bahwa perspektif barat pada umumnya mengabaikan struktur sosial dan memberikan perhatian yang sedikit terhadap fungsi sosial dari kajian komunikasi, perspektif barat juga tidak menganggap budaya sebagai variabel dalam penelitian. Kajian komunikasi perspektif *non-western* khususnya Asia juga hadir untuk menjawab berbagai fenomena yang tidak dapat dikaji dengan perspektif barat.

Salah satu jurnal yang mengangkat tentang kajian komunikasi politik dari perspektif asia adalah jurnal Looking Presidential: A Comparison of Newspaper Photographs of Candidates in the United States and Taiwan yang ditulis Tien-tsung Lee.,dkk (2004) menjelaskan tentang perbedaan pembentukan citra dari

fotografi kandidat antara Taiwan dan Amerika yang biasa dipajang di koran. Misalnya, kandidat Amerika biasanya ditampilkan sebagai pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, dengan gambaran ia yang dikelilingi oleh masyarakat yang antusias, berdiri dan berjalan di sekitar rakyatnya. Sementara itu, kandidat di Taiwan lebih sering digambarkan dengan pose '*glad-to-see-you*'. Tangannya melambai dengan sudut pandang kamera ke bawah, memperlihatkan bahwa kandidat ini memiliki kesetaraan kedudukan dengan kandidat lain yang berbeda dengan masyarakat.

Perbedaan ini dilihat dari foto yang dipublikasikan oleh New York Times dan China Times, dan menunjukkan bahwa proses di dalam peliputan berita di dua wilayah berbeda. Secara tidak langsung, dalam hal ini terkandung bahwa perspektif dua budaya ini tidak sama. Budaya Barat atau Amerika lebih senang bila pemimpinnya dipandang sebagai sosok yang ramah, rendah hati, dan menyatu dengan rakyatnya. Sedangkan, pada budaya Asia atau Taiwan, lebih senang bila pemimpinnya dipandang sebagai sosok yang berbeda dan menonjol.

Para peneliti di bidang kajian perspektif *non-western*, banyak memberikan perhatian pada perspektif kajian dengan pendekatan kebudayaan China, Korea, Jepang dan India (Gunaratne, dalam Wang, 2011). Namun kajian *non –western* masih kurang memberikan perhatian kepada perspektif kajian yang menggunakan pendekatan kebudayaan Islam (Gunaratne, dalam Wang, 2011). Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang majemuk memiliki peluang yang besar untuk berkontribusi dalam kajian perspektif *non-western*.

Salah satu fenomena komunikasi politik khas Indonesia adalah budaya sowan kyai, sowan kyai merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh politisi menjelang pemilihan umum untuk meminta restu kyai dengan tujuan akhir mendapatkan suara dari umat yang berada dibawah kyai yang didatangi tersebut. Fenomena sowan kyai dan peran kyai dalam politik di Indonesia serta perannya dalam mempengaruhi publik tentu hanya dapat dikaji dengan pendekatan non-barat. Salah satu penelitian yang mengangkat tentang budaya sowan kyai adalah penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Alfien Zuliansyah dari Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya. Zuliansyah (2015) memberikan dua proposisi terhadap penelitiannya, yaitu bahwa adanya hubungan spiritual pada perilaku sowan kyai dalam konteks komunikasi politik dengan menggunakan perintah dan ajaran islam sebagai pedoman misalnya perintah untuk menjaga hubungan silaturahmi. Prosisi selanjutnya adalah terdapat dimensi hubungan yang bersifat asimetris antara seseorang dengan orang lain yang memiliki ilmu spiritual lebih dalam konteks sowan kyai, seseorang akan memposisikan lebih rendah dari orang yang memiliki ilmu spiritual lebih serta memiliki usia yang lebih tua menjadi dimensi yang kuat dalam konteks sowan kyai, sehingga dalam praktik sowan kyai sangat kental akan etika.

Melihat contoh fenomena komunikasi politik dalam konteks Indonesia dalam hal ini budaya sowan kyai, tentu hal tersebut akan sulit untuk dikaji menggunakan teori-teori barat, terutama dengan melihat unsur kearifan lokal Indonesia serta perspektif budaya Islam dalam praktik sowan kyai. Chu (dalam Hair, 2014) menyatakan bahwa teori barat yang lebih bersifat individualistik dan

berbeda dengan budaya timur yang cenderung kolektif, sehingga kajian tentang sowan kyai sebagai sebuah fenomena komunikasi politik di Indonesia hanya dapat dikaji dengan pendekatan non-barat.

2.2. Humor Politik Sebagai Komunikasi Politik

Dalam praktik komunikasi politik terdapat pesan politik yang ingin disampaikan oleh komunikator politik. Untuk menyampaikan pesan politik tersebut tentu dibutuhkan strategi politik yang cermat agar pesan politik tersebut dapat diterima dan dipahami serta dimaknai oleh komunikan dalam hal ini publik atau masyarakat. Sebuah pesan politik harus dikemas sedemikian rupa agar menarik disertai dengan data yang akurat, hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan bahwa pesan politik yang disampaikan berdasarkan pada realitas politik yang ada bukan karangan belaka (Firmanzah, 2008, h.261).

Humor politik terbagi menjadi dua kelas, yaitu humor denigrasi dan humor *exposure*. Humor denigrasi terdiri dari humor tokoh politik, kelompok atau institusi politik, slogan politik dan gagasan politik, sedangkan humor *exposure* terdiri dari pemaparan yang sifatnya dalam lingkup nasional, represi politik, serta situasi politik (Raskin, dalam Hammoud, 2014). Hammoud (2014) menyatakan bahwa humor politik memiliki banyak fungsi, namun yang paling terkenal adalah fungsi subsersif yang menganggap humor politik sebagai bentuk protes terhadap penindasan, korupsi serta upaya dalam mencapai perubahan sosial dan politik.

Humor politik memiliki banyak fungsi sosial, dikutip dari Nilsen (1990) terdapat dua sudut pandang untuk melihat fungsi sosial dari humor politik, bila

dilihat dari sudut pandang politik itu sendiri, humor politik dapat berfungsi sebagai:

1. untuk mendefinisikan konsep politik.
2. mengkritik para kritikus
3. menetapkan suatu posisi
4. mengatasi hambatan
5. mengurangi ketegangan

Sedangkan dari sudut pandang kritik politik, humor politik dapat digunakan untuk:

1. mengekspos *chauvinism*
2. mengekspos kebodohan
3. mengekspos penindasan
4. mengekspos pretensi.

Sebagai Negara dengan *high context culture* hampir semua orang di Indonesia tidak suka dikritik secara langsung dan cenderung untuk dikritik secara tidak langsung, hal tersebut membuat humor politik menjadi salah satu media yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Humor dapat menjadi sarana dalam mencapai tujuan dari komunikasi politik, banyak politisi yang menggunakan humor sebagai “senjata” untuk menyerang lawan politik atau untuk melakukan diplomasi, humor juga dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat kesukaan publik pada tokoh atau dapat dijadikan pengalihan isu sebuah topik (Perelman and Olbrechts-Tyteca, dalam Waisanen, 2015). Dalam jurnalnya

terkait humor kepresidenan di Amerika Serikat, (Waisanen, 2015) menyatakan bahwa humor kepresidenan dapat digunakan sebagai strategi persuasif.

Humor dapat digunakan oleh aktor politik untuk mempengaruhi pemrosesan kognitif dan persuasi publik, publik cenderung lebih suka dan termotivasi untuk memproses humor sebagai sebuah pesan politik (Nabi, Moyer-Guse, dan Byrne, dalam Waisanen, 2015). Humor politik yang disampaikan oleh seorang presiden dapat memperluas batas diskursif untuk pribadi presiden, dengan menggunakan humor, seorang presiden dapat menggabungkan antara garis fakta dengan fiksi. Humor merupakan sebuah cara strategis untuk mencapai tujuan komunikasi yang interaktif (Graham, Papa, dan Brooks, dalam Waisanen, 2015).

2.3. Penelitian Terdahulu

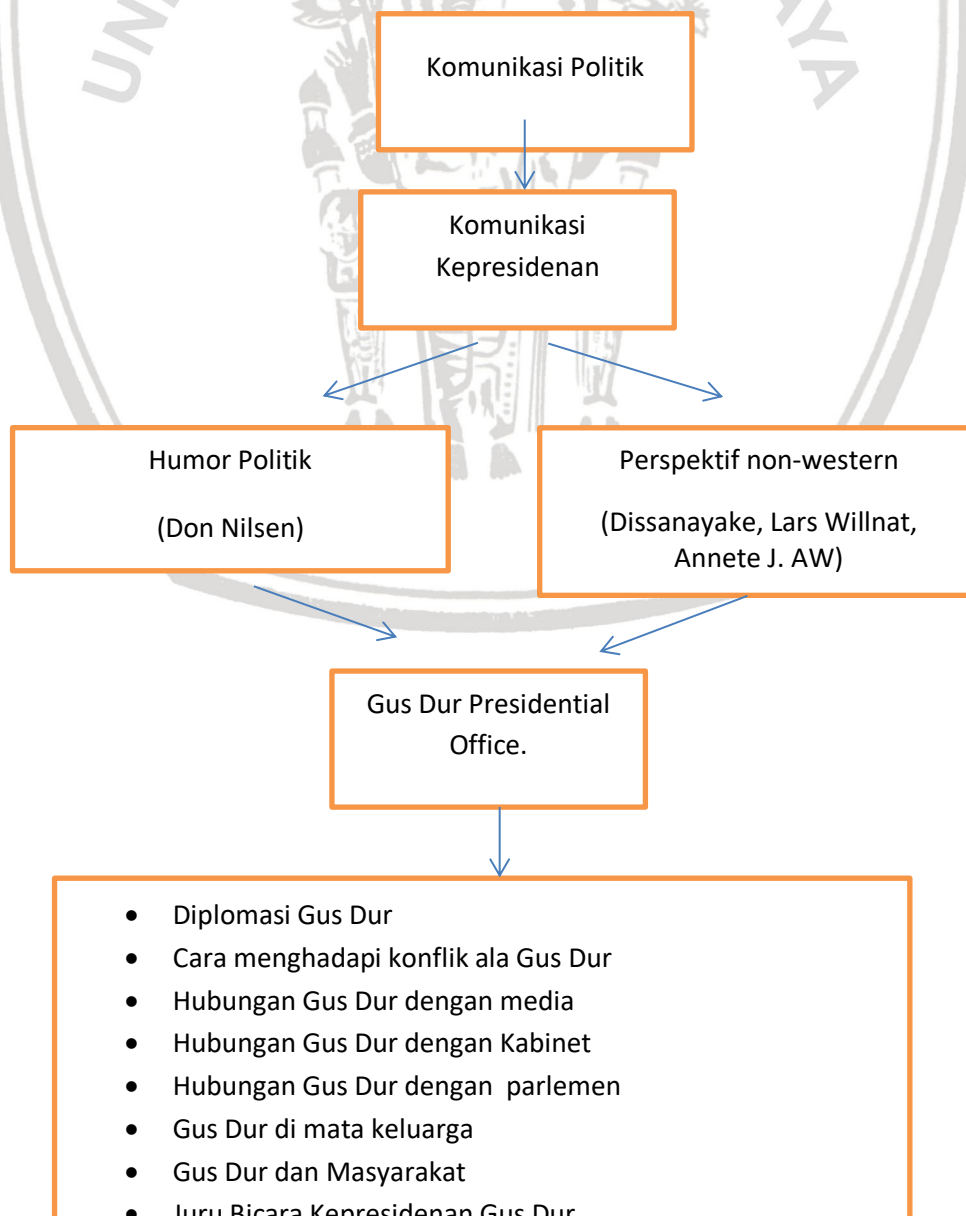
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian sebagai rujukan peneliti. Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Sri Rendro Dhani dari Universitas Indonesia dalam bentuk tesis, penelitian yang dilakukan tahun 2002 tersebut berjudul “Manajemen Komunikasi Kepresidenan RI (Studi Kasus Manajemen Komunikasi Kepresidenan K.H. Abdurrahman Wahid). Penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus tersebut bertujuan untuk mengetahui konsep, strategi serta permasalahan dalam manajemen komunikasi kepresidenan yang dilakukan oleh presiden RI ketiga, K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), selain itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pers/media dalam manajemen komunikasi kepresidenan. Penelitian ini hadir dilatarbelakangi oleh banyaknya permasalahan komunikasi dalam pemerintahan Gus Dur baik yang dilakukan oleh Gus Dur

maupun oleh para pembantunya. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah kasus pemberhentian Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, kasus isu penangkapan Kapolri Jenderal Surojo Bimantoro serta kasus halal-haram bumbu masak Ajinomoto. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep manajemen komunikasi yang dipopulerkan oleh Mark Fletcher. Hasil penelitian ini adalah Gus Dur tidak menjalankan salah satu konsep manajemen komunikasi kepresidenan yang umumnya digunakan oleh seorang Presiden yang membuat pemerintahan Gus Dur yang berdampak pada seringnya keluar pernyataan kontroversial dari Gus Dur serta pernyataan yang tidak sinkron antara Gus Dur dengan para pembantunya, penelitian ini juga menyatakan bahwa kekurangan yang dimiliki oleh Gus Dur tersebut sebenarnya dapat diminimalisir apabila Gus Dur memiliki manajemen komunikasi kepresidenan yang kuat dengan dukungan dari para pembantunya yang cermat dan profesional serta mekanisme kerja yang jelas.

Penelitian kedua yang penulis jadikan rujukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Novieta Hardeani Sari dalam bentuk Tesis dari program pascasarjana Universitas Indonesia yang dilakukan pada tahun 2001 dengan judul “Manajemen Komunikasi Strategik Kejuru Bicaraan Presiden (Studi Kasus: Juru Bicara Presiden Masa Pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif evaluatif dengan menggunakan konsep kajian kehumasan dan manajemen strategik. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa strategi komunikasi tim juru bicara kepresidenan K.H. Abdurrahman Wahid belum maksimal dan efektif, hal ini disebabkan kurangnya pengalaman anggota

juru bicara kepresidenan, selain itu pemerintahan Gus Dur juga lebih memperhatikan masalah-masalah politis dibandingkan masalah-masalah yang sifatnya substansif hal tersebut diikuti dengan kurangnya *sense of human relation* dari para anggota juru bicara kepresidenan Gus Dur yang dibuktikan dengan pernyataan-pernyataan yang lebih mengedepankan emosi dibandingkan rasionalitas. Hal lain yang menyebabkan kurang maksimalnya kinerja tim juru bicara kepresidenan Gus Dur adalah karena tidak jelasnya koordinasi antar anggota tim juru bicara.

2.4. Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir.

Penelitian ini berawal dari fenomena komunikasi Gus Dur yang unik dan menarik saat menjadi Presiden Republik Indonesia ke – 4. Komunikasi politik menurut Baldoni (dalam Kaban, 2009) penting dilakukan oleh seorang pemimpin Negara untuk mempertahankan atau mendapatkan kepercayaan dari publiknya. Komunikasi yang dilakukan oleh seorang kepala Negara atau kepala pemerintahan adalah komunikasi kepresidenan, komunikasi kepresidenan mencakup segala bentuk komunikasi yang berkaitan dengan presiden, hingga saat ini kajian komunikasi kepresidenan yang berkembang di Amerika Serikat fokus pada opini publik, krisis kepresidenan, dan penggunaan sosial media serta pemanfaatan kemajuan dan perkembangan teknologi untuk keperluan komunikasi kepresidenan.

Humor politik merupakan salah satu strategi untuk menyampaikan pesan-pesan politik, Gus Dur dikenal sebagai seorang presiden yang sering melemparkan *guyon-guyon* politik untuk mencairkan suasana, meskipun tak jarang *guyon-guyonnya* tersebut menjadi kontroversi dan membuat gaduh situasi politik. Dengan latar belakang sebagai seorang santri dan memiliki garis keturunan langsung dari pendiri Nahdlatul Ulama, Gus Dur memiliki gaya yang berbeda dalam memimpin Indonesia, kesan formal yang selama ini melekat dalam jabatan Presiden Republik Indonesia, sedikit memudar saat Gus Dur menjadi Presiden, berbagai perubahan terjadi baik dalam lingkungan Istana maupun di dalam pemerintahan dibawah kabinet Persatuan Nasional. Peran kyai-kyai sepuh dan santri-santri dalam pemerintahan Gus Dur pun sangat besar, mulai dari menjadi

penasihat informal Presiden hingga menteri dan juru bicara menghiiasi pemerintahan Gus Dur.

Dalam konteks kepresidenan, peneliti menemukan bahwa 15 informan-peneliti masing-masing memiliki pengalaman unik dan menarik dengan Gus Dur. Terdapat Sembilan kategorisasi peneliti terkait dengan pengalaman ke 15 informan penelitian ini yaitu bagaimana cara Gus Dur melakukan diplomasi dan menjalin hubungan dengan kepala Negara-negara sahabat, hubungan Gus Dur dengan awak media, hubungan Gus Dur dengan kabinet dalam hal ini Wakil Presiden serta jajaran para menteri, hubungan Gus Dur dengan parlemen, Hubungan Gus Dur dengan masyarakat, proses pengambilan keputusan Gus Dur, Gus Dur di mata keluarga, peran dari juru bicara kepresidenan Gus Dur sebagai sebuah hal yang baru dalam organisasi kepresidenan di Indonesia sampai dengan pemikiran-pemikiran politik Gus Dur menurut Ali Masykur Musa.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Paradigma Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6). Sementara Denzin & Lincoln (2009, h. 6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menekankan pada proses dan makna yang dilakukan pengkajian secara tidak ketat dan tidak diukur. Denzin & Lincoln (2009) juga mengatakan bahwa para peneliti yang menggunakan jenis penelitian kualitatif mengutamakan realitas yang terbangun secara sosial. Penelitian kualitatif lebih dimaksudkan untuk mengemukakan gambaran atau pemahaman mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala atau realitas dapat terjadi (Pawito, 2007, h.35).

Dalam penelitian jenis kualitatif, subjek penelitian dan peneliti memiliki hubungan yang erat, hal tersebut dikarenakan peneliti berusaha memahami fenomena dalam realitas kehidupan. Mulyana & Solatun (2013) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan penafsiran dalam memahami permasalahan yang terjadi dengan menggunakan banyak metode. Hal-hal yang diskursif menjadi dasar dalam penelitian kualitatif, misalnya

transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen-dokumen tertulis dan lain-lain (Pawito, 2007, h.37).

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma intrepretatif. Paradigma intrepretatif atau yang lebih dikenal sebagai ilmu sosial intrepretatif/*interpretative social science* (ISS) adalah salah satu dari ketiga pendekatan utama dalam penelitian sosial yang menekankan pada tindakan sosial yang memiliki makna yang dibentuk secara sosial dan relativisme nilai (Neuman, 2013). Webber (dalam Neuman, 2013) menyatakan bahwa setiap tindakan manusia berhubungan dengan makna perilaku orang lain, Webber juga menyatakan bahwa ilmu sosial harus mempelajari tindakan sosial dengan tujuan tertentu (Neuman, 2013, h.115). Dalam pendekatan intrepretatif, dikenal istilah *verstehen* yang berasal dari bahasa Jerman yang berarti pemahaman mendalam, dan hal tersebut menjadi tujuan utama dalam penelitian yang menggunakan paradigma interpretatif.

Penelitian ini juga tergolong dalam penelitian eksplorasi. Penelitian eksplorasi adalah penelitian yang dilakukan ketika subjek yang diteliti merupakan suatu hal yang baru, dengan sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali penelitian yang mengangkat subjek tersebut sebelumnya (Neuman, 2013). Sehingga tujuan dari penelitian eksplorasi adalah untuk meneliti fenomena yang masih sedikit dipahami. Kajian tentang komunikasi kepresidenan di Indonesia masih jarang dilakukan, sehingga penelitian ini digolongkan kedalam penelitian eksploratif.

3.2 Metode Penelitian Fenomenologi

Cresswell (dalam Kuswarno, 2007) mendefinisikan fenomenologi sebagai sebuah pendekatan penelitian yang berupaya untuk menjelaskan makna dari pengalaman hidup seseorang tentang suatu gejala atau konsep. Sementara itu Hegel (dalam Moustakas, 1994) menyatakan bahwa fenomenologi merupakan ilmu yang menjelaskan tentang apa yang dirasakan serta diketahui berdasarkan pengalaman langsung dari seseorang. Foss & Littlejohn (2005, h.38) menyatakan bahwa inti dari metode fenomenologi adalah pemahaman realitas pada masing-masing individu akan berbeda, tindakan dari setiap individu hanya dapat dipahami melalui pemahaman terhadap dunia hidup individu yang bersangkutan. Sehingga metode fenomenologi dilakukan untuk mengetahui serta memahami suatu fenomena berdasarkan sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung. Dalam metode penelitian fenomenologi, peneliti tidak memberikan hipotesis, tetapi lebih melihat masalah dari pengalaman hidup individu yang benar-benar terjadi (Littlejohn, 1996).

Moustakas (1994, h. 103-104) menjelaskan bahwa terdapat beberapa prosedur dalam melakukan penelitian fenomenologi, yaitu:

1. Mengungkapkan topik dan pertanyaan mengakar tentang autobiografi baik makna maupun nilai-nilai yang terdapat didalamnya dan juga termasuk dalam masalah-masalah sosial dan kepentingan.
2. Mengaitkan *review-review* komprehensif oleh kalangan professional dan literature-literatur.
3. Membangun sebuah kriteria untuk mencari *co-researcher* yang sesuai.

4. Menyediakan *co-researcher* dengan instruksi alami dan sesuai arah dan tujuan investigasi, dan membangun kesepakatan yang termasuk memperoleh persetujuan informan, memastikan dengan benar, dan memaparkan tanggungjawab dari peneliti dan partisipan peneliti, konsisten dengan prinsip-prinsip etika penelitian.
5. Mengembangkan beberapa pertanyaan atau topic yang menjadi arahan dalam proses wawancara.
6. Melaksanakan dan merekam proses wawancara satu persatu informan secara penuh untuk mengumpulkan topik dan pertanyaan. Memperbaharui informasi wawancara (*follow-up*) juga diperlukan.
7. Mengatur dan menganalisis data untuk memudahkan pengembangan individu secara jaringan dan deskripsi strukur, membuat gabungan deskripsi jaringan, membuat gabungan deskripsi structural, dan sintesis makna serta esensi dari jaringan dan struktural.

Penelitian ini juga menggunakan metode hermeutika. Hermeutika adalah metode penelitian yang berkaitan dengan penyelidikan secara mendalam terhadap teks dan menghubungkan bagian-bagiannya kepada keseluruhan serta mengungkap makna yang lebih mendalam (Neuman, 2013, h. 115). Terdapat beberapa tulisan mengenai Gus Dur yang peneliti gunakan dalam penelitian seperti Biografi Gus Dur karya Greg Barton dan buku tentang hubungan Gus Dur, Militer dan Politik karya Abdul Malik Haramain.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah komunikasi kepresidenan yang dijalankan oleh K.H. Abdurrahman Wahid/Gus Dur khususnya dalam konteks humor dan perspektif kajian komunikasi politik *non-western*.

3.4 Subjek Penelitian

Dalam menentukan partisipan atau informan dalam penelitian, peneliti memiliki kriteria dasar yang terdiri dari: partisipan penelitian memiliki pengalaman hidup dengan fenomena yang diteliti, memiliki pemahaman sifat dan makna dari objek penelitian, bersedia berpartisipasi untuk wawancara (direkam hasil wawancaranya dan didokumentasikan dalam video atau gambar) dan bersedia data hasil wawancaranya dipublikasikan. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Hal ini dilakukan karena penelitian ingin memilih kriteria tertentu atau menyeleksi informan yang terpilih, diantaranya: (1) pernah mengenal atau memiliki hubungan dekat dengan Gus Dur, (2) memahami pemikiran atau bentuk komunikasi Gus Dur dalam konteks kepresidenan. Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti telah memilih informan yang sesuai dengan kriteria tersebut, antara lain:

1. Inayah Wahid, anak bungsu Gus Dur. Mengalami kehidupan di lingkungan istana selama Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia, saat ini Inayah berkiprah di bidang seni.
2. Priyo Sambodho, staf di Istana Negara yang bekerja dari zaman pemerintahan Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono,

saat ini Priyo Sambodho menjadi sekretaris pribadi Shinta Nuriyah Wahid, Istri Gus Dur.

3. Wimar Witoelar, sahabat Gus Dur yang pada masa pemerintahan Gus Dur menjadi ketua tim juru bicara kepresidenan.
4. Alissa Wahid, anak sulung Gus Dur, saat keluarga Gus Dur tinggal di Istana, Alissa bertindak sebagai perwakilan urusan rumah tangga keluarga Gus Dur, saat ini aktif sebagai pimpinan Jaringan Gus Durian, sebuah organisasi yang menjaga pemikiran-pemikiran Gus Dur.
5. Dr. Ngatawi Al-Zastrouw, pernah menjadi asisten pribadi Gus Dur saat Soeharto memimpin Indonesia sampai dengan proses pemilihan Gus Dur menjadi Presiden, namun saat Gus Dur terpilih, Dr. Zastrouw tidak berada dalam *ring* satu pemerintahan Gus Dur. Terakhir ia menjabat sebagai Ketua Lembaga Seni Budaya Muslim (LESBUMI NU).
6. Wahyu Muryadi, saat Gus Dur menjabat Wahyu Muryadi menjadi kepala biro protokoler kepresidenan, sebelumnya ia berprofesi sebagai wartawan Tempo, saat ini Wahyu Muryadi menjabat sebagai Dewan Pengawas Tempo Group.
7. Romo Benny, pemuka agama Katholik yang merupakan sahabat Gus Dur, sebelum Gus Dur menjabat sebagai presiden, Romo Benny bersama Gus Dur membentuk forum demokrasi.

8. Dharmawan Ronodipuro, menjabat sebagai kepala biro pers & media pada saat Gus Dur menjadi Presiden, saat ini ia menjadi duta besar ICRC untuk Indonesia & Timor Leste.
9. Rizal Ramli, sahabat dekat Gus Dur yang pernah dipercaya oleh Gus Dur untuk menjadi Kepala BULOG, Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus pernah menjabat sebagai tim monitoring kinerja kabinet Persatuan Nasional. Saat ini ia aktif mengisi kuliah umum di berbagai universitas di Amerika Serikat.
10. Adhie Massardi, anggota tim juru bicara kepresidenan Gus Dur, sebelum ditunjuk sebagai juru bicara kepresidenan, ia sering menulis artikel tentang Gus Dur. Saat ini ia menjabat sebagai Dewan Pengawas Bumiputera.
11. K.H. Yahya Staquf, seorang nahdliyin yang ditunjuk Gus Dur sebagai anggota tim juru bicara, saat ini ia menjabat sebagai pengasuh pondok pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah.
12. K.H. Arifin Junaidi, orang dekat Gus Dur yang pernah menjabat sebagai sekretaris Gus Dur saat Gus Dur menduduki kursi Ketua Umum PBNU, saat Gus Dur menjadi Presiden, Arifin Junaidi menjadi Anggota DPR mewakili Fraksi Kebangkitan Bangsa. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Lembaga Pendidikan Maarif NU.

13. Ali Masykur Musa, saat Gus Dur menjadi Presiden, Ali Masykur menjabat sebagai ketua fraksi PKB di MPR-RI. Ali Masykur pernah menjabat sebagai anggota BPK-RI, saat ini ia dipercaya untuk menjadi Komisaris Utama Reasuransi, BUMN yang bergerak di bidang jasa asuransi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian fenomenologi, pengumpulan data dilakukan lewat proses wawancara dengan informan atau partisipan. Wawancara yang dilakukan menggunakan pertanyaan terbuka, yang dapat berkembang sesuai dengan fenomena yang dibahas dalam wawancara, sehingga informan atau partisipan dapat bercerita sesuai dengan pengalaman yang mereka alami terkait subjek penelitian. Moustakas (1994) menyatakan bahwa seorang peneliti harus menciptakan suasana yang nyaman saat melakukan wawancara agar partisipan dapat menjawab pertanyaan peneliti dengan leluasa. Penelitian ini berhasil menghimpun 13 partisipan dan 3 buku yang membahas tentang Gus Dur dalam konteks kepresidenan. Lokasi wawancara dilakukan di Jakarta dan di Rembang, Jawa Tengah. Di Jakarta peneliti melakukan penelitian di kantor partisipan penelitian seperti Griya Gus Dur Amir Hamzah, Kantor Intermatrix, Kantor Unit Kerja Presiden Implementasi Pancasila, Kantor Tempo, Kantor ICRC, Kantor AJB Bumiputera, Kantor LPM NU, pusat perbelanjaan Cipinang Indah Mall dan kediaman partisipan penelitian di daerah Leteh (Rembang), Condet, Kemang, dan Kuningan, Jakarta Selatan. Penelitian dilakukan dari

Juli-Agustus 2017. Durasi wawancara yang dilakukan cukup beragam mulai dari 8-58 menit dengan menggunakan *general interview guide* sebagai bagian acuan pertanyaan (Moustakas, 1994, h.116). Partisipan yang diwawancarai terdiri dari 13 orang.

Penelitian ini menggunakan beberapa buku yang peneliti anggap relevan karena mampu memberikan informasi yang berhubungan dengan penelitian. Kedua buku tersebut tidak ada buku yang ditulis oleh Gus Dur, berikut buku yang digunakan oleh penulis:

1. Biografi Gus Dur karangan Greg Barton
2. Mata Batin Gus Dur karangan Ansory Ahmad Saleh
3. Manajemen Komunikasi Kepresidenan Dari Soekarno Sampai Megawati karangan Rendro Dhani

3.6 Teknik Analisis Data

Moustakas (1994, h.118) menyatakan bahwa analisis data dimulai ketika peneliti menempatkan transkrip wawancara sebagai pegangan utama dalam penelitian. Prosedur analisis fenomenologi meliputi *horizontalizing* data agar pernyataan-pernyataan penting dari informan yang sesuai dengan topik penelitian, dari pernyataan-pernyataan informan yang sudah dapat kemudian disusun secara rapih lalu dibuat pengelompokkan kedalam beberapa kategori atau tema serta menghapus beberapa hal yang tidak sesuai atau tidak berkaitan dengan topik penelitian. Kategorisasi tema tersebut digunakan untuk membuat *textural description* dari pengalaman informan. Dari *textural description*, *structural*

description, dan penggabungan antara *textures* dan *structures* menjadi sebuah makna dan esensi dari fenomenologi.

Dalam analisis data fenomenologi, Moustakas (1994, h.121) memberikan contoh dari modifikasi metode analisis Van Kaam yang terdiri dari 7 tahap, yaitu:

1. Membuat daftar setiap ekspresi yang relevan terhadap pengalaman.
2. Melakukan reduksi dan pemilahan data., terdapat dua persyaratan mereduksi dan eliminasi data, (1) apakah terdapat unsur kejadian dalam pengalaman yang perlu dan cukup untuk dipahami. (2) apakah memungkinkan untuk mengabstraksi dan memberi label? Jika iya, hal itu adalah lapisan dari pengalaman. Ekspresi yang tidak menemukan dua persyaratan tersebut dapat dieliminasi. Ekspresi tumpang tindih, pengulangan, dan ketidakjelasan juga dieliminasi atau dipresentasikan dalam ketentuan deskripsi yang lebih tepat. Hal-hal yang tidak direduksi hal tersebut merupakan unsur pokok dari pengalaman.
3. Melakukan pengelompokkan data berdasarkan tema.
4. Identifikasi akhir dari unsur pokok serta tema yang sama (validasi).

Validasi dilakukan dengan cara mengecek unsur pokok dalam tema yang terdapat dalam rekaman lengkap dari partisipan penelitian. (1). Apakah mereka mengekspresikan secara eksplisit dalam transkrip, (2). Apakah unsur tersebut cocok jika tidak diekspresikan secara eksplisit, (3). Jika tidak eksplisit atau tidak cocok dengan pengalaman peneliti, maka data tersebut harus dieliminasi.

5. Unsur pokok dan tema yang relevan dan valid digunakan peneliti untuk mengkonstruksi deksripsi tekstural individual pada pengalaman tersebut, termasuk contoh-contoh verbatim dari transkrip wawancara.
6. Konstruksi (hasil pemikiran) *individual structural description* peneliti didasarkan pada *individual textural description* dan *imaginative variation*.
7. Konstruksi *Textural Structural Description* partisipan penelitian pada pengalaman menggabungkan unsur pokok dan tema.

Selain menggunakan analisis data fenomenologi, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data dengan model interaktif. Miles & Huberman (dalam Pawito, 2007, h.104) menulis bahwa teknik analisis data dengan model interaktif terdiri dari reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Dalam tahap reduksi data, seorang peneliti melakukan pengelompokan serta peringkasan data, setelah itu peneliti melakukan penyusunan kode-kode untuk mempermudah peneliti menentukan tema-tema atau kelompok data. Selanjutnya penulis merancang konseptualisasi data untuk didapatkan data-data penting yang berkaitan dengan penelitian untuk kemudian data tersebut direfleksikan dan dicari polanya. Dalam penyajian data, peneliti melakukan penyortiran data secara berkelompok dan penyusunan berdasarkan kategori yang sejenis, data yang sudah disusun tersebut selanjutnya dikaitkan dengan teori yang digunakan oleh peneliti. Sementara itu pada tahap terakhir, penarikan kesimpulan, peneliti menerapkan prinsip induktif dengan melihat penyajian data yang telah dilakukan (Pawito, 2007, h.105). Pratiwi (2016, h.64) menyatakan bahwa dalam tahap akhir atau tahap penarikan kesimpulan, peneliti harus melakukan verifikasi terhadap data

yang telah didapat sejak awal turun lapang untuk penelitian hingga pada proses pengumpulan data.

3.7. Keabsahan Data

Keabsahan data diperlukan karena berkaitan dengan validitas data yang diperoleh oleh peneliti. Peneliti melakukan validasi data dengan mengacu pada contoh pengalaman Humprey yang peneliti kutip dari Moustakas (1994, h.110) yang mengirimkan temuan penelitiannya mengenai *textural-structural* dari pengalaman partisipan penelitiannya kepada 14 partisipan penelitian. 8 dari 13 partisipan penelitiannya menganggap dekripsi mengenai “mencari makna kehidupan” akurat. Dalam penelitian ini, peneliti mengirimkan *fieldnotes* yang sudah peneliti olah kepada informan penelitian. Semua partisipan menyatakan bahwa deskripsi yang peneliti berikan akurat.

Keabsahan data pada penelitian ini mengungkapkan *goodness criteria* menurut Denzin dan Lincoln (dalam Bryman, 2012 h. 390) yang mengacu pada dua hal yaitu *trustworthiness* dan *authenticity*. Adapun *trustworthiness* terdiri dari empat kriteria, yaitu:

1. Kredibilitas (*credibility*), bagaimana temuan hasil penelitian dapat diterima oleh masyarakat yang diteliti. Kredibilitas dapat memperlihatkan bagaimana pemahaman peneliti terhadap masalah yang diteliti.
2. Validitas eksternal (*transferability*), kemungkinan hasil penelitian dapat diterapkan dalam konteks lain.

3. Reliabilitas atau *dependability*, keterubukaan terhadap keseluruhan tahap hingga hasil penelitian untuk dinilai oleh orang lain. Penelitian tersebut bisa dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini, dalam penelitian ini dapat diperankan oleh pembimbing penelitian/ skripsi.
4. Objektivitas atau *confirmability*, dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk meminimalkan pendapat pribadi dalam penyajian data. Upaya yang akan dilakukan oleh peneliti dalam menerapkan objektivitas adalah dengan mendiskusikan data hasil temuan lapangan maupun literatur kepada dosen pembimbing penelitian. Upaya yang telah dilakukan oleh peneliti dalam menerapkan objektivitas dalam adalah dengan mendiskusikan data hasil temuan lapangan maupun literatur kepada dosen pembimbing penelitian. Selain dengan pembimbing penelitian, peneliti juga kerap melakukan diskusi dengan beberapa rekan dan senior yang memiliki keahlian dalam bidang serupa yaitu tentang studi *non-western*. Selain itu forum diskusi formal dari kampus juga menjadi salah satu ajang peneliti dalam mengonfirmasi hasil penelitian seperti dalam forum seminar proposal dan ujian komprehensif.

Sementara *authenticity* terdiri dari:

1. *Fairness*, menampilkan berbagai kalangan secara profesional secara jujur dalam penelitian ini. Peneliti tidak hanya menampilkan pendapat dari satu sumber saja, melainkan berdasarkan beberapa

informan yang heterogen dalam penelitian ini. *Fairness* dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai berbagai narasumber, hal tersebut dilakukan oleh peneliti untuk memahami Gus Dur dari berbagai sudut pandang.

2. *Ontological authenticity*, mempersoalkan apakah penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat untuk masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami lingkungan sosialnya. Peneliti dapat berbagai literatur penelitian ini kepada masyarakat luas
3. *Educative authenticity*, penelitian ini mempersoalkan kegunaan penelitian bagi masyarakat agar dapat memahami pandangan lain di dalam masyarakat. Penelitian ini menyajikan data yang beragam sehingga dapat menyadarkan masyarakat dalam memahami berbagai pandangan.
4. *Catalytic authenticity*, mempersoalkan mengenai kegunaan penelitian ini agar masyarakat dapat mengubah lingkungannya. Penelitian ini dapat mendorong pihak-pihak penelitian yang terlibat dalam penelitian untuk dapat melakukan perubahan yang lebih baik dalam lingkungan sekitarnya, khususnya di bidang ilmu komunikasi
5. *Tactical authenticity*, mempersoalkan mengenai apakah penelitian ini telah memberdayakan anggota untuk mengambil langkah yang perlu untuk terlibat dalam melakukan tindakan. Pemberdayaan

yang dimaksud adalah data yang disajikan dalam penelitian ini yang kemudian dapat menambah pengetahuan.



BAB IV

LAPORAN HASIL

4.1 Profil K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

K.H. Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur merupakan salah satu Negarawan Indonesia yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia keempat dengan masa pemerintahan 1999-2001. Gus Dur merupakan cucu pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU), K.H. Hasyim Asyari dan anak dari Menteri Agama era awal kemerdekaan, K.H. Wahid Hasyim. Gus Dur dilahirkan di Denanyar, Jombang pada tanggal 4 Sya'ban 1940 atau 7 September 1940, namun kerabat Gus Dur memperingati hari ulang tahun Gus Dur pada tanggal 4 Agustus. Gus Dur dilahirkan di Pesantren milik kakek dari sang ibu, K.H. Bisri Syamsuri.

Gus Dur memiliki darah keluarga Pesantren yang sangat kental, hal ini dapat dilihat dari garis keturunannya baik dari pihak Ayahnya, K.H. Wahid Hasyim maupun dari pihak Ibunya Nyai Haji Sholehah. Dari pihak ayah, ia merupakan cucu pendiri NU, K.H. Hasyim Asyari yang bila ditarik keatas merupakan keturunan Raja Brawijaya VI yang berkuasa di tanah Jawa pada abad XVI, Raja Brawijaya VI juga memiliki putera yang dianggap memperkenalkan agama Islam di pantai timur laut Pulau Jawa, yang dilanjutkan oleh Pangeran Banawa dengan meninggalkan kerajaan untuk mengajar sufisme (Barton, 2003, h.27). Fakta sejarah ini dianggap penting oleh masyarakat Jawa dan dianggap

baik. Sedangkan dari pihak Nyai Sholehah, Gus Dur merupakan cucu dari K.H. Bisri Syamsuri, Kyai Bisri juga merupakan salah satu tokoh kunci dalam pendirian Nahdlatul Ulama, ia mendirikan Pesantren Denanyar setelah sebelumnya belajar 6 tahun kepada Kyai Hasyim dan dua tahun di Mekkah. Kyai Bisri dinilai sebagai seorang administratur pendidikan yang baik dan ahli pertanian yang cakap, pendekatan yang teratur dan disiplin terhadap keilmuan dan kehidupan bersama membuat Pesantren Denanyar menjadi terkenal. Sementara itu sang ayah, K.H. Wahid Hasyim merupakan salah satu tokoh pergerakan kemerdekaan yang kemudian menjadi Menteri Agama di masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat pimpinan Soekarno.

Di usianya yang baru empat tahun, Gus Dur ikut ayahnya, K.H. Wahid Hasyim ke Jakarta, di Jakarta pula Gus Dur mengenyam pendidikan sekolah dasarnya. Karena tinggal di Jakarta, Wahid Hasyim yang berasal dari keluarga Islam tradisional mulai mendapatkan pengaruh pemikiran-pemikiran modern dari teman-temannya yang berasal dari Negara-negara Eropa. Di Jakarta, Gus Dur bersekolah di sekolah biasa, ia menolak bersekolah di sekolah elite yang dimasuki oleh para anak pejabat, ia beralasan sekolah elite membuatnya tidak nyaman. Ia bersekolah di SD KRIS, Jakarta Pusat, lalu pindah ke SD Matraman Perwari, Jakarta Pusat. Pendidikan yang ia dapat di Jakarta merupakan pendidikan sekuler, di tahun-tahun tersebut Gus Dur belum mendapatkan pendidikan agama dari lembaga pendidikan, namun kemampuannya membaca Al-Quran sudah sangat baik. Setelah sang ayah wafat karena sebuah kecelakaan mobil di Cimahi, Jawa Barat, keluarga Gus Dur dipimpin oleh Hj. Solehah, sang ibunda, karena sang ibu

mendorong anak-anaknya untuk berargumen secara bebas tentang pemikiran Wahid Hasyim, sang ayah, Gus Dur menjadi lebih rajin membaca dengan membeli buku-buku bekas di sebuah tempat di Jakarta. Di jenjang SMEP, Gus Dur sempat tidak naik kelas karena waktu itu Gus Dur sering tidur lewat tengah malam karena menonton pertandingan sepakbola, karena itupula akhirnya Gus Dur dipindahkan ke Jogjakarta untuk melanjutkan pendidikan SMPnya, di Jogja Gus Dur tinggal di rumah K.H. Junaidi, yang merupakan seorang ulama Muhammadiyah, hal ini menjadi menarik karena Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merupakan dua organisasi Islam yang berbeda pandangan, NU lebih tradisional sedangkan Muhammadiyah lebih modernis, perbedaan tersebut dapat dilihat dari cara pandang keduanya dalam menyikapi praktik-praktik beragama dan sikap mereka terhadap integrasi budaya dalam praktik keagamaan.

Selain mendapatkan pendidikan sekuler, Gus Dur juga mendapatkan pendidikan keagamaan dari Pesantren. Gus Dur mengikuti pendidikan di Pesantren di Pesantren Al-Munawwir di daerah Krapyak, Jogjakarta. Setelah menamatkan pendidikan menengah pertamanya, Gus Dur mengikuti pendidikan di pesantren Tegalrejo di Magelang, Jawa Tengah secara penuh dari 1957-1959, di Tegalrejo Gus Dur belajar dengan Kyai Khudori, disaat yang bersamaan Gus Dur juga belajar di Pesantren Denanyar Jombang namun tidak secara penuh, di Denanyar Gus Dur hanya mengambil pendidikan paruh waktu saja. Tahun 1959 Gus Dur kembali ke Jombang untuk mengenyam pendidikan di Pesantren Tambakberas dibawah pimpinan Kyai Wahab Chasbullah, Gus Dur belajar agama di Tambakberas sampai dengan tahun 1963.

Gus Dur melanjutkan pendidikan tingginya untuk pertama kalinya di Kairo, Mesir, ketika berada di Kairo Gus Dur merasa nyaman dengan suasana kotanya, apalagi hobinya untuk menonton film-film Prancis dan bermain sepakbola dapat tersalurkan, karena sempat kecewa dengan Al-Azhar yang tidak sesuai dengan ekspektasi beliau, Gus Dur memilih untuk aktif diluar kampus dan terpilih menjadi Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Kairo, di Kairo juga beliau mulai aktif menulis untuk majalah PPI bersama sahabatnya, Mustofa Bisri. Kairo memberikan kesan yang sangat baik untuk Gus Dur, namun hal tersebut berbeda dengan kesan Gus Dur terhadap Universitas Al-Azhar, Gus Dur merasa kecewa dengan Al-Azhar karena tidak sesuai dengan ekspektasinya, di Al-Azhar, Gus Dur harus mengulang kelas dasar bahasa Arab yang menurutnya tidak perlu ia ikuti karena dirinya sudah fasih berbahasa Arab, Gus Dur merasa bosan dengan pendekatan dan pendidikan yang ia lalui di Al-Azhar, karena jarang hadir dalam tatap muka dikelas dan lebih aktif diluar kampus, pihak universitas yang memberikan Gus Dur beasiswa merasa kecewa, ditambah gagalnya Gus Dur dalam salah satu ujian subjek inti dari dua subjek yang ada, hal itu pula yang melatarbelakangi dirinya untuk pindah ke Baghdad, Irak.

Di Baghdad, Gus Dur mendapat beasiswa untuk studi di Universitas Baghdad, Alasan Gus Dur untuk menerima beasiswa dari Baghdad selain karena kecewa dengan Universitas Al-Azhar adalah karena dirinya juga kecewa dengan pemerintahan Nasser yang otokritik, apalagi di Baghdad, mahasiswa yang studi disana mengatakan bahwa Baghdad adalah kota kosmopolitan yang nyaman untuk tempat bertukar pikiran secara bebas. Di Universitas Baghdad, Gus Dur dituntut

untuk lebih krisis dan banyak membaca, sehingga Gus Dur menilai ia mendapatkan banyak dorongan intelektual di Universitas Baghdad. Setelah menyelesaikan studinya di Baghdad, Gus Dur pindah Belanda dengan harapan dapat melanjutkan studi lanjutannya, saat itu ia berharap dapat melanjutkan studi tentang perbandingan agama di Universitas Leiden, namun karena persyaratan harus mengulang studi sarjananya yang dianggap membuang waktu, Gus Dur pindah ke Jerman dan tinggal selama kurang lebih empat bulan dilanjutkan dengan tinggal di Prancis selama dua bulan sebelum akhirnya ia kembali ke Indonesia.

Tahun 1971, Gus Dur kembali ke Indonesia dengan rasa kecewa karena tidak dapat melanjutkan studi lanjutan di Eropa. Saat baru kembali ke Indonesia, Gus Dur mengisi waktunya dengan melakukan kunjungan ke pesantren-pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Gus Dur juga aktif di LSM LP3ES yang mengeluarkan jurnal Prisma, sebuah jurnal sosial yang menjadi jurnal utama di Indonesia pada saat itu. Di tahun 1971 juga Gus Dur mengadakan resepsi pernikahan dengan Shinta Nuriyah, yang baru saja menyelesaikan studi sarjana mudanya di Yogyakarta. Di tahun 1972 Gus Dur mulai aktif memberikan seminar serta memberikan ceramah di tanah Jawa yang dilakukan secara berkeliling, ia juga aktif menulis artikel-artikel di media *TEMPO* dan *Kompas*. Pada tahun 1974 Gus Dur mulai mengajar di Pesantren Tambakberas, waktu itu Gus Dur mengajar Kaidah Fiqh. Tahun 1977 Gus Dur menerima tawaran untuk menjadi Dekan Fakultas Usuluddin di Universitas Hasyim Asyari, Jombang, Jawa Timur, disana Gus Dur sambil mengajar beberapa mata kuliah seperti Tarbiyah, Usuluddin, serta

kajian-kajian mengenai kepercayaan dan praktik-praktik Islam. Di tahun-tahun tersebut juga Gus Dur aktif mengisi seminar-seminar dan mengajar sebuah madrasah yang terletak di Tambakberas.

Gus Dur merupakan cucu dari pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), oleh karena itu ia diharapkan dapat melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan oleh sang kakek, K.H. Hasyim Asyari dan sang ayah, K.H. Wahid Hasyim, itu pula yang diucapkan sang ibu setelah sang ayah meninggal, sehingga setelah menolak permintaan Kyai Bisri Syamsuri untuk bergabung dengan Syuriah Nasional Nahdlatul Ulama, Gus Dur akhirnya menerima permintaan tersebut. Kyai Bisri Syamsuri, sang kakek menjadi ketua Rais Aam PBNU dan Gus Dur menjadi anggotanya, diawal masuknya Gus Dur di pengurus pusat Nahdlatul Ulama (NU) Gus Dur aktif di Dewan Syuriah sambil tetap melakukan ceramah di berbagai tempat, Gus Dur juga bahkan sempat dipercaya untuk menduduki posisi sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta.

Tahun 1982 Gus Dur mulai terjun ke dunia politik dengan menjadi juru kampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan fusi dari partai-partai Islam yang diantaranya adalah Nahdlatul Ulama. Sementara itu pengurus pusat Nahdlatul Ulama (NU) Gus Dur bersama dengan Kyai Ahmad Sidiq memimpin reformasi didalam tubuh organisasi NU lewat Dewan Syuriah. Saat melakukan kampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Gus Dur bercerita bahwa ia sempat beberapa kali ditangkap oleh aparat berwajib, namun karena luasnya relasi Gus Dur membuatnya dalam waktu cepat dilepas oleh aparat berwajib (Barton, 2003).

Dalam melakukan usaha membawa perubahan di tubuh Nahdlatul Ulama (NU), Gus Dur bersama Kyai Ahmad Sidiq membentuk tim tujuh yang bertugas untuk melakukan reformasi di tubuh NU atas rekomendasi para kyai senior, Gus Dur sebagai perwakilan intelektual muda sangat bersemangat untuk melakukan perubahan di tubuh NU, termasuk dalam menjadikan Pancasila sebagai azas tunggal seperti yang diperintahkan oleh Presiden Soeharto, Gus Dur secara pribadi berpendapat bahwa Pancasila merupakan solusi terbaik untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan hubungan Negara dengan agama, sehingga pada akhirnya PBNU mengeluarkan pernyataan bahwa "Islam bersifat pluralistik dan oleh karena itu pelaksanaan ajaran Islam harus bersifat pluralistik, dan hal ini sesuai dengan ajaran NU" (Barton, 2003). Perubahan yang dilakukan Gus Dur bersama kyai-kyai senior lainnya adalah dengan memutuskan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) menarik diri dari aktifitas politik, termasuk menarik diri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), hal ini dikarenakan tujuan pendirian NU sebagai organisasi di bidang sosial & keagamaan, dengan aktifnya NU di arena politik praktis, membuat kegiatan utama NU di bidang pendidikan dan keagamaan menjadi terlupakan hal tersebut juga ditambah mulainya intervensi pemerintah kepada Partai Persatuan Pembangunan lewat Djaelani Naro yang *menggembosi* fraksi NU di PPP. Sehingga pada waktu selain memutuskan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) menerima Pancasila sebagai azas tunggal juga memutuskan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) menarik diri dari aktifitas politik dan menarik diri dari Partai Persatuan Pembangunan dan kembali ke *khittah*, Gerakan ini dikenal dengan sebutan "Kembali ke *Khittah* 1926".

Nahdlatul Ulama kembali mengadakan Mukhtar tahun 1984 yang berlokasi di Situbondo, Jawa Timur, di mukhtar tersebut Gus Dur terpilih menjadi ketua umum PBNU, terpilihnya Gus Dur menjadi Ketua Umum PBNU memberikan harapan akan terjadi perubahan dalam tubuh organisasi tersebut ke arah yang positif, termasuk dengan kembali fokusnya NU dalam kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, karena selama ini seperti dijabarkan sebelumnya NU dibawah pimpinan Idham Chalid fokus pada kegiatan politik praktis yang membuat banyak kalangan santri kecewa dan khawatir dengan ketertinggalan NU dari masyarakat modern terutama dalam bidang pendidikan di Pesantren. Di kepemimpinan pertama di PBNU, Gus Dur fokus pada reformasi sistem pendidikan di Pesantren hingga dapat menandingi kualitas pendidikan dari sekolah sekuler, tentu hal ini memenuhi harapan kalangan santri Nahdlatul Ulama yang sempat khawatir dengan kondisi pendidikan milik NU. Gus Dur kemudian kembali terpilih menjadi Ketua Umum PBNU di Mukhtar 1989 yang diselenggarakan di Yogyakarta, di Mukhtar tersebut cukup banyak keluhan dari beberapa kalangan pengkritik Gus Dur karena pengurus PBNU di Jakarta dinilai tidak memperhatikan masalah-masalah di pelosok-pelosok daerah, juga muncul tuduhan bahwa Gus Dur bersimpati kepada Islam Syiah, hal ini karena kedekatan Gus Dur dengan salah satu tokoh yang mendalami Syiah, Jallaludin Rakhmat, Gus Dur juga mempersilahkan umat Syiah untuk menggunakan masjid yang terletak didepan kediamannya di Ciganjur untuk beribadah, padahal niat Gus Dur saat itu adalah karena pribadinya yang tidak mendukung pelarangan kebebasan mempercayai keyakinan tertentu dan pribadinya yang menentang penindasan

terhadap kaum minoritas yang termarginalkan, kritik lain adalah usaha Gus Dur untuk mendorong *Halaqah* yang dinilai oleh banyak ulama konservatif yang sudah berusia uzur akan mengurangi otoritas mereka, karena dengan adanya *Halaqah* para santri dapat mempertanyakan kitab kuning kepada ulama. Gus Dur dapat menjawab kritikan yang muncul dengan dingin dan tetap berpikir rasional, hasilnya ia terpilih kembali menjadi Ketua Umum PBNU (Barton, 2003).

Untuk menarik simpati umat Muslim, Soeharto pada tahun 1990 mendirikan ICMI, waktu itu Gus Dur diminta untuk ikut bergabung, namun Gus Dur menolak karena ICMI dinilai Gus Dur didirikan untuk memperkuat Soeharto, untuk menandingi ICMI, Gus Dur mendirikan Forum Demokrasi yang terdiri dari 45 intelektual lintas agama misalnya Marsilam Simanjuntak dan Bondan Gunawan, perlawanan Gus Dur tersebut membuat hubungan NU dengan pemerintah Soeharto yang sempat harmonis menjadi renggang, hal tersebut berdampak pada Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke 29 di Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat tahun 1994. Sebelumnya di tahun 1993, Gus Dur mendapatkan penghargaan Ramon Magsaysay di Manila, Filipina karena ide-idenya dalam mengkampanyekan toleransi.

Kembali ke Mukhtamar 1994, menjelang mukhtamar 1994, Gus Dur kembali mendapatkan banyak kritik karena ada beberapa program kerja yang tidak berjalan, misalnya saja proyek pabrik tapioca dan usaha patungan antara Nahdlatul Ulama dengan Bank Summa, yang pada awalnya ditargetkan berdiri dua ribu cabang namun hingga 1994 hanya berdiri 12 cabang saja. Di Mukhtamar 1994 juga pemerintah orde baru dibawah komando Soeharto mulai melakukan

intervensi di tubuh organisasi Nahdlatul Ulama, hal tersebut dibuktikan dengan semakin gencarnya kampanye anti-Gus Dur dengan *tagline* ABG (Asal Bukan Gus Dur), para inisiator kampanye anti-Gus Dur mengusulkan Abu Hasan, seorang donator yang juga pengusaha dari Jambi yang didukung pemerintah dan juga militer, Muktamar 1994 di Cipasung diwarnai politik uang dan juga banyaknya intel pemerintah yang disebar untuk memuluskan pencalonan Abu Hasan, jumlah intel yang berada di area muktamar bahkan mencapai lebih dari 100 personil (Barton, 2003). Selain intimidasi lewat militer dan politik uang, Muktamar Cipasung juga diwarnai dengan pelarangan media yang selama ini memberitakan hal-hal positif tentang Gus Dur untuk meliput di area muktamar. Pemungutan suara pun berlangsung secara dramatis, diputaran pertama Gus Dur gagal mengumpulkan 65% suara sesuai target, Gus Dur hanya mendapatkan 157 suara, selisih 21 suara dengan Abu Hasan, sementara dua calon lain, Fahmi Saifudin dan Chalid Mawardi masing-masing mendapatkan 17 suara dan 6 suara. Namun di pemungutan suara putaran kedua, Gus Dur berhasil mengalahkan Abu Hasan dengan selisih 32 suara, hal ini menandakan kegagalan pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap Gus Dur.

Di tahun 1995, Gus Dur mulai menjalin kerjasama dengan puteri kedua Proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno, Megawati Soekarnoputri, pada masa-masa tersebut, Gus Dur lebih banyak menasehati Megawati dan Megawati pun menghormati Gus Dur karena Megawati merasa Gus Dur lebih memahami visi-visi politik Soekarno, meskipun dalam beberapa aspek, Gus Dur tidak setuju dengan pemikiran Soekarno termasuk soal Marxisme.

Kedekatan Soekarno dengan Megawati tidak disukai oleh Soeharto, hal ini berujung pada peristiwa “*Kuda Tuli*” yang menyebabkan banyak korban jiwa. Hal tersebut juga berujung pada tuduhan bahwa Gus Dur pro terhadap Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan kaum komunis, Gus Dur juga dituduh pro-kristen dan memiliki hubungan baik dengan Partai sosialis di Irak, Baath dan Mossad.

Pada tahun 1996 terjadi kerusuhan di Situbondo yang disebabkan gerakan anti-Kristen dan anti-China, kerusuhan tersebut berujung pada dibakarnya 20 Gereja dan toko milik para warga keturunan Tionghoa. Pada waktu itu Gus Dur merasa ada pihak yang melakukan provokasi sehingga peristiwa tersebut terjadi, sehingga peristiwa tersebut direkayasa, waktu itu Gus Dur turun tangan dengan mengunjungi langsung Kota Situbondo, disana Gus Dur menyerukan pentingnya dialog antar-iman untuk memperlancar komunikasi kedua belah pihak. Di tahun 1996 juga Gus Dur mengakhiri perang dinginnya dengan Soeharto, Gus Dur atas nama Nahdlatul Ulama menerima Soeharto untuk periode ketujuh, hal tersebut dibuktikan dengan mengajak Siti Herdiyanti Rukmana, anak sulung Soeharto dalam rapat-rapat umum Nahdlatul Ulama di berbagai daerah, hal ini juga menguatkan dukungan Gus Dur untuk Golkar di pemilu 1997. Di pertengahan 1997 krisis menimpa Indonesia yang disebabkan jatuhnya mata uang Bath Thailand yang menyebabkan Indonesia harus meminjam dana talangan ke IMF, Bank Indonesia juga pada saat itu memutuskan untuk menutup 16 bank yang menimbulkan penarikan deposito besar-besaran.

Krisis ekonomi yang menimpa Indonesia berdampak pada naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menyebabkan kemarahan dari mahasiswa, para

mahasiswa turun ke jalan, para mahasiswa meminta Gus Dur bergabung dengan mereka, namun pada waktu itu Gus Dur meminta mahasiswa untuk menahan diri. Demonstrasi mahasiswa tersebut berujung pada pecahnya peristiwa Trisakti yang menewaskan empat orang mahasiswa, pada waktu itu kondisi kesehatan Gus Dur sedikit kurang baik, walaupun begitu Gus Dur tetap menghadiri undangan Soeharto untuk melakukan pertemuan dengan pemimpin komunitas-komunitas Muslim, setelah pertemuan dengan Soeharto, Gus Dur tetap meminta mahasiswa untuk menahan diri untuk memberikan sedikit waktu kepada Soeharto. 14 orang menteri di Kabinet pimpinan Soeharto mengundurkan diri, sementara parlemen yang dipimpin Harmoko menyatakan bahwa proses pencopotan Soeharto juga akan segera dimulai bila Soeharto tidak memberikan pengunduran diri, akhirnya Soeharto menerima keadaan tersebut dan memberikan pidato pengunduran dirinya sebagai Presiden dan menyerahkan posisi Presiden kepada Wakil Presiden saat itu, B.J. Habibie.

Setelah Soeharto turun, Gus Dur mulai menerima usulan untuk membentuk partai politik Nahdlatul Ulama (NU), Gus Dur melihat dengan mendirikan partai adalah cara untuk mengalahkan Partai Golkar dengan memanfaatkan umat yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama, akhirnya Gus Dur mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa, dengan menjadikan Matori Abdul Djalil sebagai Ketua Dewan Tanfidz dan Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro PKB. PKB menjadi peserta pemilu 1999, selain itu Gus Dur juga melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh reformasi di Ciganjur yaitu Amien Rais, Megawati Soekarnoputri dan Sri Sultan Hamengkubowo X. Setelah terbentuknya PKB,

hubungan Gus Dur dengan Megawati sempat merenggang, hal ini karena komentar-komentar Gus Dur tentang pencalonan Megawati sebagai Presiden, Gus Dur mengatakan bahwa banyak kyai-kyai dan pemimpin-pemimpin Muslim meragukan Megawati, perkataan Gus Dur tersebut membuat Megawati sakit hati yang membuat persahabatan keduanya sedikit terganggu. Disisi lain, PKB sebagai partai yang identik dengan NU menghadapi pesaing dari beberapa partai lain yang juga ingin merebut suara warga NU, misalnya saja Partai NU dan Partai Kebangkitan Umat (PKNU), selain juga masih banyaknya kyai yang aktif di Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dalam proses kampanye di pemilu tahun 1999 Gus Dur dibantu oleh beberapa orang yang sangat menentukan kiprah Gus Dur kedepannya, yang pertama adalah Alwi Shihab, teman dekatnya saat di Kairo dulu, dari Alwi Shihab lah Gus Dur dapay menjalin komunikasi yang sangat baik dengan Amien Rais dan orang-orang modernis, termasuk orang-orang moderat di ICMI yang sempat tidak memiliki hubungan yang baik dengan Gus Dur di zaman orde baru. Yang kedua adalah Ratih Hardjono, seorang jurnalis Kompas yang ditempatkan di Australia, Gus Dur mengenal Ratih karena dari Ratihlah, sang istri, Nuriyah diurus untuk terapi di Australia pasca kecelakaan tahun 1993, Ratih juga yang memberikan Gus Dur alat bantu untuk membaca setelah Gus Dur kehilangan penglihatannya, Ratih berperan dalam mengatur kampanye Gus Dur akan disiplin, diantaranya adalah membuat jadwal kunjungan dan jumpa pers dengan awak media dan melindungi Gus Dur dari plintiran-plintiran berita oleh media massa, Ratih pada waktu itu bekerjasama dengan Yenny Wahid, anak kedua Gus Dur dalam mengatur jalannya

kampanye Gus Dur. Di pemilu 1999, PKB berhasil memperoleh 12,4%, berbeda jauh dari target Gus Dur untuk PKB sebesar 30% suara sah nasional, namun angka 12% tersebut merupakan angka realistic dengan anggapan bahwa tidak semua warga NU memilih PKB, karena masih ada warga NU yang setia kepada PPP karena banyak kyai-kyai terkemuka yang masih aktif dan berafiliasi kepada partai berlambang Ka'bah tersebut.

Setelah proses pemilihan umum legislatif dilakukan, partai-partai mulai bergerak menuju pemilihan presiden. Amien Rais yang kecewa dengan perolehan suara PAN yang hanya 7% jauh dari ekspektasi sempat *vakum* dari publik, namun ia muncul dengan wacana koalisi poros tengah untuk mengimbangi kekuatan politik Megawati dengan PDIP-nya dan Habibie dengan Golkar-nya. Koalisi poros tengah juga mulai berwacana untuk mengusung Gus Dur pada pemilihan presiden, hal tersebut bertolak belakang dengan keputusan Rapimnas PKB yang memutuskan mengusung Megawati sebagai calon presiden untuk periode 1999-2004. Wacana pencalonan Gus Dur tersebut membuat usaha memperbaiki hubungan dengan Megawati menjadi sulit, apalagi pada saat itu Gus Dur sering memberikan pernyataan-pernyataan ambigu yang membuat banyak orang bingung arti dari pernyataan Gus Dur tersebut, misalnya saja Gus Dur pernah berkata bahwa ia akan menerima dukungan poros tengah namun secara pribadi Gus Dur tetap mendukung Megawati, dikesempatan yang lain Gus Dur juga berbicara kepada Greg Barton bahwa seandainya Megawati gagal membangun komunikasi yang baik untuk mempersatukan kekuatan-kekuatan politik yang ada pada saat itu maka Gus Dur bersedia untuk melawan Megawati secara terbuka (Barton, 2003).

Menjelang pemilihan, beberapa petinggi PKB melakukan rapat untuk membahas pencalonan presiden, pada saat itu beberapa petinggi PKB masih memegang teguh keputusan Rapimnas bahwa PKB akan mendukung Megawati, sementara beberapa petinggi lain *keukeuh* dengan sikap mendukung majunya Gus Dur pada pencalonan presiden 1999, akhirnya diputuskan beberapa petinggi seperti Muhaimin Iskandar menemui Megawati untuk membahas masalah tersebut, sementara Khofifah Indar Parawansa dan K.H. Arifin Junaidi mempersiapkan berkas pencalonan Gus Dur apabila Cak Imin dkk gagal menemui Megawati, akhirnya karena telah lewat batas waktu dan petinggi PKB yang mendatangi kediaman Megawati belum bertemu Megawati diputuskan bahwa PKB akan mendaftarkan Gus Dur ke MPR untuk pencalonan presiden, segera setelah PKB mendaftarkan Gus Dur, koalisi reformasi yang digawangi PAN & PK resmi mendukung Gus Dur, begitu juga dengan Fraksi Golkar ‘putih’ pimpinan Akbar Tandjung memastikan dukungannya kepada Gus Dur, hal ini setelah pidato pertanggungjawaban Habibie ditolak oleh MPR dan Habibie mengundurkan diri dari pencalonan presiden saat itu. Pada pemungutan suara untuk calon presiden yang diikuti oleh Gus Dur dan Megawati, Gus Dur meraih kemenangan dengan dukungan PKB, PAN, PK, dan fraksi Golkar ‘putih’nya Akbar Tandjung. Kemenangan Gus Dur ini membuat pendukung Megawati kecewa, untuk menghindari kekacauan yang jauh lebih ekstrim, Gus Dur memerintahkan PKB untuk mendukung Megawati pada pencalonan Wakil Presiden, akhirnya dengan dukungan tersebut, Megawati berhasil mengalahkan Hamzah Haz, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Gus Dur bersama Megawati, Wiranto dan Amien Rais menyusun susunan kabinet yang dinamakan Kabinet Persatuan Nasional, nama ini menunjukkan juga komposisi kabinet yang berasal dari berbagai kalangan sehingga banyak juga yang menyebut kabinet Gus Dur adalah kabinet pelangi. Dalam pengumuman susunan kabinet, Gus Dur mengatakan akan mempertahankan gaya kepemimpinan informalnya dengan tetap memanggil Wakil Presiden Megawati dengan panggilan Mbak Mega, pada kesempatan tersebut juga Gus Dur melakukan hal yang tidak pernah dilakukan oleh Soeharto yaitu bertanya kepada wartawan apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan terkait penyusunan kabinet tersebut. Dalam memimpin Indonesia, Gus Dur memiliki gaya berbeda selain memutuskan untuk tinggal di Istana bersama seluruh keluarganya, ia juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk datang ke Istana dengan argumentasi bahwa Istana Negara adalah Istana Rakyat, Gus Dur juga membuat keputusan kontroversial dengan membubarkan dua departemen yaitu Departemen Sosial dengan alasan sudah menjadi sarang korupsi dan Departemen Penerangan dengan alasan untuk membuka informasi kepada publik seluas-luasnya, Gus Dur juga merubah aturan peliputan di Istana dengan mempermudah perizinan media massa untuk mengajukan wartawan yang akan meliput.

Dari sisi diplomasi, Gus Dur dikenal sebagai presiden yang sering melakukan lawatan ke luar negeri, hal ini Gus Dur lakukan untuk mengangkat martabat Indonesia di mata dunia paska krisis yang menimpa Indonesia tahun 1998-1999, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk mempertahankan NKRI dari ancaman separatist seperti GAM, OPM dan RMS, kunjungan tersebut terbukti

ampuh, hal ini dapat dilihat dari hubungan baik Gus Dur dengan banyak pemimpin dunia misalnya Bill Clinton, Fidel Castro, John Howard dan banyak pemimpin dunia lainnya. Gus Dur juga membuka komunikasi dengan Israel yang menyebabkan kemarahan dari banyak umat muslim di Indonesia. Hubungan dengan Amerika yang cukup baik bukan berarti tanpa kekurangan, Amerika sempat menanggapi dingin keinginan Gus Dur untuk berkunjung ke Washington pasca kunjungan ke Havana untuk bertemu Fidel Castro, tanggapan dingin Amerika tersebut menurut Gus Dur merupakan sebuah intervensi sehingga Gus Dur merasa tidak suka diintervensi, sementara itu sambutan hangat diberikan oleh Fidel Castro saat Gus Dur berkunjung ke Havana.

Di dalam negeri, ancaman separtis menjadi momok yang menakutkan yang dapat memecah belah NKRI, Gus Dur dalam kepemimpinannya melakukan pendekatan kebudayaan untuk menyelesaikan konflik tersebut, misalnya saja dengan memperbolehkan pengibaran bendera OPM dengan syarat pengibaran bendera tersebut berada dibawah bendera merah putih, selain itu Gus Dur juga meniadakan Daerah Operasi Militer (DOM), Gus Dur juga memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah yang terancam separatis dengan memberikan banyak bantuan.

Pemerintahan Gus Dur yang terdiri dari banyak kelompok membuat resiko perpecahan dalam tubuh kabinet menjadi ancaman yang sangat mungkin terjadi, apalagi setiap partai politik memiliki kepentingan masing-masing. Gus Dur juga sering melakukan perombakan kabinet, ini bukan menandakan Gus Dur merupakan pemimpin yang plinplan, tetapi Gus Dur melakukan perombakan

karena menteri yang diganti tersebut tidak memenuhi harapannya, keputusan melakukan pergantian Laksmana Sukardi dan Jusuf Kalla menjadi pembuka drama jatuhnya Gus Dur, keputusan tersebut memperburuk hubungan PKB dengan Golkar dan PDIP. Dalam memilih menteri-menterinya Gus Dur memilih untuk melihat karakter dan integritas calon menteri tanpa melihat latar belakangnya karena menurut Gus Dur pengetahuan seseorang dapat diasah sementara integritas sudah menjadi hal yang mendasar dan sulit dibentuk waktu singkat.

Pada tahun 2000 muncul skandal yang menyudutkan Gus Dur yaitu Bulog Gate, di bulan Januari Gus Dur meminta Bulog untuk memberikan keterangan terkait dana cadangan, hal ini dilakukan Gus Dur karena Gus Dur ingin mengirimkan bantuan ke Aceh untuk kesejahteraan masyarakat Aceh, Gus Dur disarankan untuk menghubungi DPR terlebih dahulu, namun Gus Dur menolak karena menurutnya apabila harus melewati proses di DPR akan memakan waktu lama sedangkan kebutuhan masyarakat Aceh mendesak, hingga akhirnya pada Mei 2000 Gus Dur mendapatkan laporan bahwa uang sebesar empat juta Dollar AS telah ditarik dari rekening dana cadangan Bulog yang dilakukan oleh Suwondo, bekas tukang pijat Soeharto yang juga pernah memijat Gus Dur sesekali waktu. Tudingan bahwa Gus Dur terlibat dalam manipulasi uang tersebut hal ini tentu semakin membuat Gus Dur terpojokkan setelah banyaknya juga tekanan dari mitra koalisi yang kepentingannya tidak terakomodir. Selain Bulog Gate, Gus Dur juga dikenai tuduhan Brunei Gate, Brunei Gate adalah sebutan untuk kasus yang dituduhkan kepada Gus Dur terkait bantuan sebesar dua

juta Dollar AS dari Sultan Brunei kepada Gus Dur untuk membantu rakyat Aceh, uang tersebut merupakan sumbangan pribadi yang menurut Gus Dur tidak dipublikasikan atas permintaan Sultan Hassanah Bolkiah, Gus Dur dituduh menikmati uang dari bantuan tersebut, namun hingga saat ini kedua hal tersebut tidak terbukti, kemudian kedua alasan tersebut menjadi memorandum I dan memorandum II di sidang MPR, meskipun terdapat hal yang ganjil karena dalam Sidang Istimewa yang menjadi alasan pemakzulan Gus Dur adalah dikarenakan Gus Dur mengeluarkan dekret presiden.

Sebelum diadakannya sidang istimewa, tekanan terhadap Gus Dur semakin kencang dilakukan oleh parlemen, hal ini terlihat dari pemanggilan kepada Marsilam Simanjuntak, Yenny Wahid dan Ratih Hardjono oleh parlemen, hubungan Gus Dur dengan Wakil Presiden Megawati juga tidak menunjukkan tanda-tanda akan rukuk, setelah pemecatan Laksmana Sukardi, Megawati dan Gus Dur tidak menunjukkan hubungan yang baik. Sementara itu hubungan Gus Dur dengan Akbar Tandjung dan Amien Rais cukup baik lewat komunikasi langsung, contohnya adalah pertemuan saat ulang tahun Sri Sultan Hamengkubuwono di Jogjakarta. Dalam pertemuan dengan di DPR di kesempatan dengar pendapat, Gus Dur sempat dikritik karena menyampaikan pidato yang penuh amarah, namun hal itu ia perbaiki dengan memberikan pidato yang lebih santun yang disampaikan dengan nada penyesalan. Dalam waktu itu juga muncul wacana untuk mengangkat seorang menteri senior untuk membantu tugas Gus Dur hal tersebut diwacanakan oleh Gus Dur, namun anggota DPR/MPR banyak yang menggulirkan wacana untuk memberikan wewenang tersebut kepada Wakil Presiden saja dan Presiden

hanya sebagai simbol. Tekanan-tekanan dan usaha menjatuhkan Gus Dur membuat warga NU marah, di beberapa wilayah di Jawa Timur warga NU turun ke jalan melakukan protes terhadap elite di Jakarta yang ingin agar Gus Dur lengser. Bulan Juli 2001, Gus Dur mengeluarkan dekrit presiden yang berisi pernyataan pembubaran MPR/DPR dan membubarkan partai Golkar, namun dekrit tersebut tidak disambut dengan baik oleh parlemen, hingga akhirnya tanggal 23 Juli 2001 Gus Dur dimakzulkan dan posisi digantikan oleh Wakil Presiden, Megawati Soekarnoputri.

Setelah tidak menjabat sebagai Presiden, Gus Dur aktif di Partai Kebangkitan Bangsa dan sering memberikan ceramah dan seminar diberbagai tempat. Tahun 2004 Gus Dur sempat mencalonkan diri sebagai Presiden bersama dengan Marwah Daud Ibrahim, namun keduanya gagal lolos verifikasi KPU karena gagal lolos tes kesehatan jasmani & rohani.

Gus Dur menikah dengan Sinta Nuriyah tahun 1968, dari pernikahannya ini Gus Dur dikaruniai empat orang putri yaitu Alissa Qotrunnada (Alissa Wahid), Zannuba Arrifah Chafsoh (Yenny Wahid), Anita Hayatunnufus (Anita Wahid) dan Inayah Wulandari (Inayah Wahid). Saat ini Alissa Wahid aktif di Jaringan Gus Durian, sementara Yenny aktif di Wahid Institute, Anita lebih banyak membantu Yenny di Wahid Institute sementara Inayah, putri bungsu Gus Dur aktif di kegiatan-kegiatan seni termasuk seni peran dengan menjadi pemeran di salah satu sitcom di sebuah televisi swasta. Gus Dur meninggal pada Rabu, 30 Desember 2009 di RS. Cipto Mangunkusumo, Jakarta akibat komplikasi penyakit yang dideritanya selama ini. Selama hidupnya Gus Dur mendapatkan berbagai

penghargaan atas jasanya pada bidang kemanusiaan, pada 1993 Gus Dur mendapat Ramon Magsaysay Award sebagai pemimpin komunitas muslim terbesar di Indonesia yang berjasa, Gus Dur juga mendapatkan penghargaan Simon Wiesenthal Center atas kepeduliannya di bidang Hak Azasi Manusia, bahkan nama Gus Dur diabadikan sebagai sebuah kelompok studi di *Temple University* dengan nama ‘‘Abdurrahman Wahid Chair of Islamic Study’’. Selain penghargaan dari berbagai lembaga internasional, sepanjang hidupnya Gus Dur juga mendapatkan gelar doktor kehormatan dari banyak universitas, diantaranya adalah Doktor kehormatan di bidang hukum, politik, ekonomi, manajemen, dan humaniora dari Universitas Sorbonne, Prancis. (Saleh, 2017).

4.2. Gus Dur di Mata Keluarga

Dimata keluarga, Gus Dur merupakan sosok yang egaliter atau terbuka, hal ini dilihat dari bagaimana sikap Gus Dur setelah marah, ia akan mudah untuk kembali mereda dan kembali bersikap seperti biasa, seperti yang diutarakan oleh Inayah Wahid (dalam wawancara 13 Juli 2017)

‘‘..Iya, karena Bapak juga egaliter, terbuka. Bapak tuh orangnya gini, sebagai orang Jawa Timur, Masnya kan sudah tahu ya tinggal di Malang, Jawa Timur. Tapi orang Jawa Timur tuh jadi abis meledak ya udah selesai. Kalau lagi marah ya marah tapi abis itu tuh apa ya, memperlakukan orang tetep biasa lagi..’’

Pemaparan Inayah tersebut membuktikan bahwa karakter *orang Jawa Timur* sangat melekat dalam diri Gus Dur, hal tersebut juga dicerminkan Gus Dur dalam melakukan pengambilan keputusan, Gus Dur akan memanggil pihak-pihak yang memiliki keahlian dibidang terkait untuk dimintai saran, Gus Dur akan berusaha untuk memahami pendapat pihak-pihak tersebut menggunakan sudut

pandang mereka, sehingga dalam pengambilan keputusannya, Gus Dur tidak hanya berdiri pada sudut pandang beliau saja tetapi juga menggunakan sudut pandang pihak lain, sehingga baik untuk kebijakan yang akan dikeluarkan bagi pihak-pihak terkait tersebut. Hal tersebut dikemukakan oleh Inayah Wahid (dalam wawancara 13 Juli 2017).

“..Itu salah satu yang saya suka dari Bapak, Bapak orangnya egaliter. Bukan tipikel orang yang gini, Gus Dur itu IQ nya tinggi tapi nggak pernah ngerasa dia itu orang yang paling pinter. Saya tuh banyak baget dengeri cerita dari temen, jadi gini waktu Bapak ngejabat. Presiden harus bikin kebijakan hutan, mislanya. Maka Bapak akan manggil orang-orang ini yang terkait, yang sudah duluan jalan, sudah paham. Dan Bapak percaya mereka, dengerin mereka. Dan dengan yang diundang Bapak, waktu itu, umurnya beda jauh. Istilahnya pengalaman hidupnya nggak sebanyak Bapak, tapi apak *willing* dengerin mereka, melihat dari sudut pandang mereka nah itu buat saya luar biasa..”

Keterbukaan Gus Dur juga ditunjukkan dengan banyaknya teman-teman Gus Dur tanpa memandang suku, agama, usia, ras dan golongan atau status sosialnya, banyak teman-teman Gus Dur yang memiliki usia jauh lebih muda dibandingkan dengan Gus Dur, selain itu Gus Dur juga memiliki relasi yang sangat baik dengan tokoh-tokoh lintas agama, bahkan dengan yang usianya lebih tua pun, Gus Dur memiliki hubungan yang sangat baik, hal ini dapat dilihat dari seringnya Gus Dur mengundang banyak kyai ke Istana bahkan sekedar hanya untuk berdiskusi bersama masalah-masalah kebangsaan. Inayah Wahid (dalam wawancara 13 Juli 2017) mengemukakan hal tersebut

“.. Bapak itu kan bener-bener terbuka ke semua orang, itu sampai sahabat-sahabatnya Bapak bentuknya beda-beda. Dalam artian, bisa sahabatan sama yang rentang umurnya beda puluhan tahun. Dan itu buat saya bentuk legaliternya Bapak, tetapi nyambung kalau ngobrol. Bahkan waktu Bapak jabat mungkin dia masih muda-muda, 30 tahunan.”

Keterbukaan Gus Dur juga ditunjukkan kepada anak-anaknya, sifatnya yang santai sempat membuat Inayah cuti dari kuliahnya untuk mengikuti aktifitas sang ayah menjadi Presiden, pada saat itu Gus Dur berpendapat bahwa pengalaman yang didapat Inayah dengan menjadi anak Presiden tidak akan didapat oleh semua orang, Gus Dur menganggap dengan Inayah ikut dalam kegiatan-kegiatan kepresidenan, Inayah akan mendapat hal-hal yang praktik yang tidak akan didapat di bangku kuliah, hal tersebut diakui oleh Inayah (dalam wawancara 13 Juli 2017).

“..dulu saya sampai sempet semester awal kuliah itu sampai banyak banget bolos karena itu kan kemudian ikut Bapak sama Ibu, kemana-mana, kunjungan-kunjungan karena saya mikir sih, awalnya kan nggak enak ninggalin kuliah gitu ya, tapi kemudian ngomong, ini kesempatan nggak semua orang punya, istilahnya ini yang *real*. Jadi ya akhirnya mutusin buat ikut..”

Keterbukaan Gus Dur tersebut berdampak pada kedekatan Gus Dur dengan staf-stafnya di Istana, tak jarang banyak staf yang bercerita tentang kehidupannya kepada Gus Dur, Gus Dur pun menanggapi para stafnya dengan terbuka dan tidak membedakan mereka karena pangkatnya dalam lingkungan Istana, mulai dari juru masak hingga ajudan pernah bercengkrama dengan Gus Dur, hal ini tentu berbeda dengan era pemerintahan sebelumnya yang terkenal kaku dan serba formal, hal tersebut diakui oleh Priyo Sambodho, salah satu staf di Istana yang bekerja sejak era pemerintahan Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono yang saat ini aktif menemani istri Gus Dur, Shinta Nuriyah dalam kegiatan-kegiatannya sebagai Sekretaris Pribadi. (dalam wawancara 17 Juli 2017).

“..ya *anu* lah ya, karena beliau itu kyai, kultur NU itu kan egaliter ya dengan staf itu sangat *anu*, ya cair lah ya. Berbeda sekali kalau dibandingkan dengan presiden Suharto, saya ga bisa berbicara

berkomunikasi ngobrol sama Suharto. Adanya cuma 'siapa bapak presiden, siapa'. Itupun jarang sekali dengan kita, paling ngomong juga sepatah dua patah. Kalo Gus Dur sih engga, santai aja ngobrol..''

Dari pernyataan Priyo Sambodho tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari akses bicara staf kepada Presiden, di era Presiden Soeharto untuk berbicara dengan Presiden sebatas menjawab perintah saja namun di era Gus Dur akses untuk berbicara langsung dengan Presiden didapatkan dengan mudah, bahkan staf dapat dengan santai berbicara banyak hal dengan Gus Dur. Kedekatan Gus Dur dengan stafnya juga diakui oleh Inayah Wahid, ia mengatakan bahwa diawal pemerintahan Gus Dur, banyak staf di Istana *shock* dengan perubahan yang terjadi, dari pemimpin sebelumnya yang serba formal dan kaku berubah menjadi pemimpin yang santai dan sangat informal, berikut petikan pernyataan Inayah Wahid (dalam wawancara 13 Juli 2017)

''..Kan gini sebelumnya kan sebelum Bapak kan kaku, segala sesuatu jadi sangat formal, teratur, harus resmi, pakainnya juga harus resmi pokoknya formal bagitu. Terus muncul Bapak segala sesuatunya nggak formal. Awal-awal mereka *shock*, kaget banget, tapi lama ya *enjoy*, enak bersantai. Kalau jalan-jalan pagi tuh pake celana pendek, ajudan-ajudannya yang nemenin Bapak kalau jalan-jalan pagi itu lama-lama ya pake celana pendek juga akhirnya. Dan itu jadi kayak kedekatan banget. Bapak itu kan pejuang kesetaraan, keadilan. Memperlakukan orang itu apapun jabatannya, sama semua sih disaat Bapak dilengserin itu tuh, orang yang di Istana, baik pengawal sampai juru masak tuh nangis gitu karena mereka paham betul apa yang dibawa Bapak, apa yang diperjuangkan dan mereka ngerasa dekat banget gitu. Jadi Bapak itu bukan sosok yang menakutkan, tapi bener-bener orang yang dekat sama mereka, dan itu buat mereka besar banget artinya..''

Kedekatan Gus Dur dengan stafnya sesuai dengan ketokohan Gus Dur yang dikenal sebagai pejuang kesetaraan, dalam memperlakukan stafnya, Gus Dur tidak membedakan jabatan yang diemban oleh mereka, Gus Dur memperlakukan semua stafnya sama, sehingga disaat Gus Dur lengser dari jabatannya sebagai Presiden, banyak staf di Istana yang merasa kehilangan sosok yang dapat dekat

dengan mereka, dan hal tersebut menurut pemaparan Inayah merupakan suatu hal yang memiliki arti besar bagi para staf tersebut.

Selama menjabat sebagai Presiden, Keluarga Gus Dur tinggal di Istana hal ini dilakukan Gus Dur untuk menghemat anggaran Negara dan agar tidak menyulitkan masyarakat, karena apabila Gus Dur tetap tinggal di Ciganjur, maka Gus Dur berpendapat hal tersebut akan membuat kemacetan dengan jarak Ciganjur dan Istana yang terbilang cukup jauh dan Gus Dur juga ingin Istana Merdeka menjadi Istana rakyat yang terbuka untuk semua lapisan masyarakat, hal ini terungkap dalam pernyataan pernyataan Inayah Wahid (dalam wawancara 13 Juli 2017)

“..Banget, banget. Dulu itu awal-awal, Istana tidak difungsikan sebagai rumah tinggal, kemudian hanya buat tempat kerja. Nah Bapak emang gitu pikirannya jangan sampai nyusahin rakyat. Dari yang tinggal di Ciganjur ke Istana terus tiap hari orang di blok jalannnya, iring-iringan jadi mending nggak deh. Dan waktu itu Bapak pengennya Istana jadi rumah rakyat. Dibalikin lagi jadi rumah rakyat..”

Selama menjabat sebagai Presiden, tidak ada pemberian tugas khusus kepada anak-anaknya, namun Alissa Wahid menyatakan bahwa karena keluarga mereka tinggal di Istana maka harus ada perwakilan keluarga yang mengurus “dapur rumah tangga” mereka, dan hal tersebut diberikan kepada Alissa, seperti pernyataan lengkap Alissa Wahid (dalam wawancara 25 Juli 2017)

“..Gus Dur nggak pernah meminta kita untuk terlibat bahkan cenderung tidak mau, anak-anaknya ikut di situ. Tapi kan karena Beliau dan Ibu sama-sama punya keterbatasan, mau nggak mau harus ada kita, kan nggak mungkin malam-malam tidur sama stafnya, jadi pasti tidurnya sama anak. Karena Gus Dur ke kamar mandi malam-malam sama siapa, Ibu nggak bisa nuntun. Nggak mungkin stafnya tidur disitu. Jadi pasti anaknya kan. Terus karena Gus Dur nggak mau rumah cianjur dijadikan rumah pres maka mau ga mau harus ada yang ngurus dapurnya, dalam tanda kutip dapur rumah tangga, ya mau ga mau kita deh, saya yg waktu itu ambil possi itu..”

Keterbatasan fisik juga membuat Gus Dur harus selalu mendapat pendampingan dari Gus Dur, sehingga untuk beberapa hal-hal yang bersifat pribadi, anak-anaknya secara bergantian menjaga Gus Dur, sementara itu Yenny Wahid, anak kedua Gus Dur juga memiliki tugas lain yang tidak diberikan secara langsung oleh Gus Dur, Yenny Wahid bertindak sebagai juru bicara keluarga dan yang paling sering mendampingi Gus Dur dalam berbagai kegiatan politik, hal ini seperti diungkapkan oleh Wahyu Muryadi, mantan Kepala Biro Protokol era Gus Dur (dalam wawancara 03 Agustus 2017)

“..Umumnya soal-soal yang menyangkut keluarga. Tapi secara umumya kepresidenan, istana, pemerintah itu ya presiden..”.

4.3. Hubungan Gus Dur dengan Media

Gus Dur pernah mengatakan bahwa media massa merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi, oleh karena itu dalam masa pemerintahannya, Gus Dur membina hubungan baik dengan awak media, hubungan yang cair dengan awak media pada saat itu dibuktikan salah satunya dengan menunjuk perwakilan wartawan dalam berbagai posisi strategis di pemerintahan beliau, misalnya saja wartawan Tempo, Wahyu Muryadi yang diangkat menjadi Kepala Biro Protokol non-karir pertama di lingkungan Sekretariat Negara. Kedekatan Gus Dur dengan awak media dibuktikan dengan tidak adanya jarak antara wartawan yang meliput di Istana dengan Gus Dur, Inayah Wahid (dalam wawancara 13 Juli 2017) mengemukakan bahwa para wartawan bahkan memanggil Gus Dur dengan sebutan Gus.

“..beberapa temen media juga ngomong, mau dalam kondisi apa aja pasti mau jawab. Terus juga nggak pernah ada jarak. Jadi misal gini ini

ada Bapak lewat, terus teriak Gus, Bapak jawab oh iya. Jadi kayak sama temen sendiri..”

Gus Dur memperlihatkan kesungguhannya untuk membuka selebar-lebarnya pintu informasi bagi masyarakat dengan merubah aturan pengajuan peliputan di lingkungan Istana, pada era pemerintahan Soeharto, wartawan yang ingin meliput di Istana harus melalui seleksi oleh badan intelejen militer yang membuat jumlah wartawan aktif yang meliput di Istana terbatas, namun di era pemerintahan Gus Dur hal tersebut dirubah dengan meniadakan seleksi lewat badan intelejen militer dan hanya mensyaratkan surat rekomendasi dari pemimpin redaksi untuk mendapat tanda pengenalan wartawan Istana, hal ini berdampak pada jumlah wartawan yang meliput di Istana, di pemerintahan sebelumnya jumlah wartawan aktif hanya 20 wartawan namun di era Gus Dur menurut Priyo Sambodho jumlah wartawan mencapai 400 wartawan yang terdaftar sebagai wartawan Istana. Menurut penuturan Priyo Sambodho, Gus Dur merupakan salah satu Presiden yang bisa di *doorstop* wartawan, berikut petikan ucapan Priyo Sambodho (dalam wawancara 17 Juli 2017)

“..‘Guuusduuuurr’ gitu, langsung jalan semua dia. Kayak yang setau saya SBY, Bu Mega gamau di *doorstop*. Habibie Cuma sekali sekali, tapi SBY Bu Mega ini paling anti di *doorstop*. Kalo Jokowi ini mau di *doorstop*..”

Bahkan hubungan erat Gus Dur dengan awak media membuat terkadang Gus Dur yang mencari wartawan apabila dalam satu kesempatan tidak wartawan yang menghampiri Gus Dur. Hal ini membuktikan bahwa Gus Dur merupakan sosok Presiden yang tidak pernah meninggalkan para awak media. Bahkan dalam kondisi krisis pemerintahannya pun, Gus Dur tetap menjalin relasi yang baik dengan para awak media, dalam satu minggu, Gus Dur sering mengajak pemimpin

redaksi media massa untuk sarapan bersama membicarakan banyak hal dengan suasana santai dan informal seperti pemaparan K.H. Arifin Junaidi (dalam wawancara 23 Agustus 2017)

“..setiap minggu ada, tapi ya harinya ga tentu. Tapi kalau pagi hari ada wartawan, pimpinan redaksi media massa misalnya, itu selalu ada yang diajak sarapan saya selalu mendampingi sarapan juga. macem-macem, ya isu-isu yang aktual saat itu, rencana-rencana kedepan, sekali lagi dalam format ger-geran..”

Kedekatan Gus Dur tersebut juga yang membuat Gus Dur mendapat julukan sebagai *media darling* karena tidak ada batasan bagi wartawan yang ingin mengakses informasi langsung dari Gus Dur, hal tersebut diungkapkan oleh Alissa Wahid (dalam wawancara 25 Juli 2015).

..”Kalau sama awak media ya begitu deh, dari dulu Gus Dur itu media darling, setelah jadi presiden ya tetep aja gitu. Yang bikin pusing Paspampers ya itu, Beliau sama sekali nggak ada batasan, Beliau nggak mau keadaanya berubah, wartawan bisa akses langsung..”

Usaha Gus Dur untuk membuka hubungan yang baik dengan media juga ditunjukkan saat pengumuman kabinet Persatuan Nasional, ketika setelah susunan kabinet dibacakan oleh Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri, Gus Dur mempersilahkan wartawan yang hadir untuk bertanya terkait penyusunan kabinet tersebut, hal ini sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan pemerintahan pimpinan Soeharto (Barton, 2003). Selain itu Gus Dur juga menutup Kementerian Penerangan yang dinilai lebih banyak ruginya, Gus Dur menilai Kementerian Penerangan melakukan pendekatan Stalinis dalam mengendalikan informasi. (Barton, 2003).

Sementara itu hubungan dengan wartawan asing dinilai ketua juru bicara kepresidenan era Gus Dur, Wimar Witoelar sangat baik, pada waktu itu Wimar diberikan tugas untuk melakukan seleksi terhadap wartawan asing yang akan melakukan wawancara dengan Gus Dur dan memberikan nilai apakah wartawan tersebut layak ataukah tidak untuk mewawancarai Gus Dur. Dalam membangun relasi dengan media asing, Gus Dur mempercayakannya kepada Wimar, sehingga perizinan wawancara dari media asing harus melalui Wimar, hal ini juga dilatarbelakangi oleh riwayat Wimar yang pernah bersekolah di luar negeri dan menjadi jurnalis dalam waktu yang cukup lama.

“...Jadi hubungan dengan wartawan baik, dengan wartawan asing lebih lagi... karna kalo wartawan asing *eeeh* aksesnya terbatas melalui saya mereka yakin bisa dapet perlakuan dengan baik *eeeh* kalo yang CNN atau line magazine selalu saya kasih kesempatan untuk mewawancara malah ada wartawan Belanda yang saya kasih kesempatan untuk satu hari mengikuti Gus Dur dalam persiapannya..” (wawancara 21 Juli 2017)

Wimar (dalam wawancara 21 Juli 2017) juga menyatakan bahwa pernah ada media asing dari Belanda diberikan kesempatan untuk mengikuti Gus Dur seharian penuh, hal ini membuktikan begitu baiknya hubungan Gus Dur dengan media termasuk dengan media asing. Bahkan untuk pertama kalinya wartawan asing diperbolehkan ikut serta dalam lawatan Presiden Gus Dur ke luar negeri yang diatur dalam nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan *Jakarta Correspondence Club* yang menaungi para wartawan asing di Jakarta seperti pemaparan Dharmawan Ronodipuro, Kepala Biro Pers & Media di masa Pemerintahan Gus Dur (dalam wawancara 10 Agustus 2017).

“..termasuk untuk pertama kalinya bagi media asing. Juga media asing diadakan nota kesepahaman dengan perhimpunan wartawan asing di Jakarta, *Jakarta Correspondence Club* dimana itu disepakati bahwa wartawan asing boleh ikut lawatan presiden di dalam maupun luar negeri..”

4.4. Hubungan Gus Dur dengan Kabinet

4.4.1. Hubungan Gus Dur dengan Wakil Presiden

Hubungan Gus Dur dengan Wakil Presiden saat itu, Megawati Soekarnoputri pada awal pemerintahan sangat baik, hal ini dilatarbelakangi karena hubungan kedua orang tua mereka yang juga cukup dekat yaitu K.H. Wahid Hasyim ayah dari Gus Dur dan Ir. Soekarno ayah Megawati Soekarnoputri. Hal tersebut seperti pernyataan Alissa Wahid, anak sulung Gus Dur (dalam wawancara 25 Juli 2017).

“..Ibunya Mbak Mega sama Ibunya Gus Dur kan dekat, yang berani marain Bung Karno yang terlalu *friendly* kan Ibunya Gus Dur, ini saya diceritain sama yang langsung gitu, gimana Beliau negur..”

Dalam ceritanya, Alissa bercerita bahwa Nyai Solehah, Ibunda Gus Dur menegur Bung Karno saat Ir. Soekarno waktu itu kembali menikah dengan Hartini, Nyai Solehah berpendapat bahwa Fatmawati bukan hanya sekedar perempuan biasa, kedekatan kedua orangtua Gus Dur dan Megawati membuat hubungan mereka saat itu berlangsung sangat baik, apalagi keduanya sama-sama pernah menjadi “korban” rezim Soeharto, pada saat itu Gus Dur sempat akan digulingkan dari jabatannya sebagai ketua umum PBNU di Muktamar tahun 1992 oleh Soeharto, bahkan di Muktamar yang diselenggarakan di Cipasung, Tasikmalaya, banyak intel yang menyamar dan menyuarakan kampanye “Asal

Bukan Gus Dur” (Saleh, 2017). Sementara Megawati juga pernah tidak diakui oleh Soeharto sebagai Ketua Umum PDI-Perjuangan hasil Kongres 1997 yang berujung pada pecahnya peristiwa “Kuda Tuli”, Gus Dur dan Mega pun pernah berada dalam forum yang sama bersama dengan Amien Rais dan Sri Sultan Hamengkubuwono X saat reformasi berlangsung. Hubungan baik tersebut juga dapat dilihat saat pemilihan Wakil Presiden, pada saat itu Megawati Soekarnoputri diajukan oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa atas instruksi Gus Dur. Namun pada perkembangannya, hubungan Gus Dur dengan Megawati terjadi perubahan dikarenakan dinamika politik pada saat itu, karena Gus Dur sebagai Presiden dan petinggi Partai Kebangkitan Bangsa memiliki kepentingan yang tentu berbeda dengan kepentingan yang dimiliki oleh Megawati Soekarnoputri yang juga menjabat sebagai ketua umum PDI-Perjuangan. Pada waktu itu Gus Dur sempat merasa yakin mendapatkan jaminan politik dari Megawati namun pada kenyataannya, jaminan politik tersebut tidak dapat diharapkan melihat pada akhirnya Gus Dur tetap lengser dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri. Hal tersebut diungkapkan oleh K.H. Yahya Staquf (dalam wawancara 21 Agustus 2017).

“..Gus Dur pernah mengatakan pada saya bahwa pada mulanya Gus Dur yakin jaminan politik bagi beliau adalah Bu Mega. Apa kata orang kalau mau lengserkan Gus Dur, tapi kalau Bu Mega nggak mau ya nggak. Tapi ternyata Bu Mega mau, ya Gus Dur nggak nyangka aja..”

Untuk membangun hubungan dengan Wakil Presiden, Gus Dur secara rutin melakukan pertemuan lewat sarapan bersama dengan Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati. Dalam sarapan bersama tersebut banyak

hal yang dibicarakan, termasuk pembagian wewenang. Hal tersebut diungkapkan oleh Inayah Wahid (dalam wawancara 13 Juli 2017).

“..Waktu itu Bapak sarapan sama Bu Mega setiap seminggu sekali untuk koordinasi. Nah sebenarnya Bapak itu sudah bagi-bagi tugas..”

Komunikasi yang dilakukan lewat sarapan bersama juga diungkapkan oleh Alissa Wahid (dalam wawancara 25 Juli 2017).

“..Setiap rabu pagi Gus Dur sarapan di rumah Mbak Mega. Gus Dur memberi kewenangan besar lah. Jadi saya sih lihatnya Gus Dur memperlakukannya dengan sopan..”

4.4.2 Hubungan Gus Dur dengan Anggota Kabinet

Pada pemerintahan Gus Dur, kabinetnya dinamai Kabinet Persatuan Nasiona, nama Persatuan Nasional ini sebagai wujud dari penggabungan berbagai spectrum politik yang luas (Barton, 2003). Hal tersebut dapat terwujud apabila dalam menentukan kabinet, Gus Dur sebagai Presiden memiliki hak penuh untuk menentukan anggota kabinet, namun pada kenyataannya dalam menentukan anggota cabinet, banyak calon anggota kabinet yang dipaksakan, hal ini karena dalam proses pengusungan Gus Dur sebagai calon presiden yang mendukung beliau terdiri dari berbagai macam partai, sehingga banyak kalangan yang menyebut cabinet Gus Dur sebagai cabinet pelangi, karena terdiri dari berbagai macam warna politik. Hal tersebut diungkapkan oleh K.H. Arifin Junaidi (dalam wawancara 23 Juli 2017)

“..Jadi, juga memperhatikan aspirasi-aspirasi, kalau kita lihat kan kabinetnya Gus Dur itu kan yaa macam-macam, pelangi, bermacam-macam warna sehingga kemudian menyulitkan untuk melangkah lebih gesit..”

Pada penentuan cabinet Persatuan Nasional ketika itu, ada 4 orang yang berperan yaitu Gus Dur, Megawati, Amien Rais & Wiranto. Sehingga memang tidak sepenuhnya tim dalam kabinet Gus Dur merupakan pilihan Gus Dur. Hal tersebut berdampak pada sulitnya memilih calon menteri karena setiap pemimpin politik memiliki pilihan masing-masing hal tersebut seperti pemaparan Rizal Ramli (dalam wawancara 16 Agustus 2017).

“..wiratno jg ingin saya jd menteri keuangan. tapi amin rais bilang kalau menteri keuangan harus jatahnya pan. gus dur sebenarnya keberatan karna dari awal pengen saya yang pegang. tapi posisinya terdesak karena amin rais perannya cukup besar jadinya mau **Pak Bawazier**, akhirnya dia nyerah tapi tidak setuju pak Bawazier inginnya bambang sudibyo..”

Walaupun dalam penentuan menteri tersebut banyak mendapatkan tekanan dari pimpinan-pimpinan politik yang mendukung Gus Dur waktu itu tetapi Gus Dur tetap pada pendiriannya untuk memilih orang yang kompeten dan sesuai dengan pilihannya. Dalam menentukan menterinya, Gus Dur berdasarkan pada karakter dan integritas, Gus Dur tidak melihat latar belakang partai politik calon menteri tersebut, Adhie Massardi (dalam Faqih, 2014) menyatakan bahwa Gus Dur menggunakan pola pelatih sepakbola di Inggris. K.H. Yahya Staquf (dalam wawancara 21 Agustus 2017) juga menyatakan bahwa tekanan-tekanan dari para pimpinan politik membuat Gus Dur dihadapkan pada dua pilihan, yaitu meletakkan dasar bagi masa depan Indonesia atau menuruti kemauan dari para politisi-politisi tersebut, hal tersebut diungkapkan dalam wawancara dengan beliau di kediaman pribadi beliau di Rembang, Jawa Tengah.

“..Nah kenapa mereka politisi-politisi itu ngotot melawan, nah Gus Dur memang membuat pilihan, antara meletakkan dasar-dasar untuk masa depan Indonesia atau menuruti kemauan-kemauan politik yang hanya memburu keuntungan-keuntungan pragmatis. Gus Dur memilih

mengabaikan pihak-pihak pragmatis. Mereka marah merasa disepelekan. Ya itu resiko..”

Dalam masa pemerintahannya, Gus Dur sering melakukan perombakan kabinet, banyak kalangan menilai seringnya Gus Dur melakukan bongkar pasang kabinet adalah bentuk inkonsistensi Gus Dur, namun Inayah Wahid, anak bungsu Gus Dur tidak sependapat, Inayah menilai seringnya *reshuffle* adalah karena banyaknya kepentingan politik yang harus diakomodir namun dalam perkembangannya, menteri-menteri yang merupakan kepentingan *elite* politik tersebut banyak yang melawan Gus Dur sehingga sudah tidak sesuai dengan prinsip Gus Dur disamping banyak juga menteri yang tidak memenuhi ekspektasi Gus Dur sehingga mengharuskan Gus Dur mengganti menteri tersebut. Namun Rizal Ramli (dalam wawancara 16 Agustus 2017) menilai bahwa seleksi yang dilakukan oleh Gus Dur merupakan yang terbaik dibanding Presiden lain, hal ini dapat dilihat dari banyaknya menteri-menteri di kabinet Gus Dur yang masih memiliki pengaruh besar di Indonesia hingga saat ini, berikut petikan wawancara dengan Rizal Ramli

“..menteri-menteri gus dur ga ada yang korupsi, yang kedua sampai sekarang menteri-menteri gus dur masih sangat berpengaruh luhut panjaitan, pak mnfud, bu khofifah, saya itu kan orang-orang gus dur semua. Artinya ya proses seleksinya gus dur lebih mantep dari yang lainnya. Mana ada liat menteri SBY sekarang, setelah jadi menteri selesai atau menteri siapa gitu yakan. Menteri gus dur sampai sekarang masih berpengaruh baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Itu karena apa, karena proses seleksinya efektif. Jika 3 bulan gak perform yaudah ganti. Akhirnya kan ketemu orang yang bener-bener berprestasi..”

Dalam wawancara tersebut, Rizal Ramli juga membandingkan kinerja menteri-menteri di era Gus Dur dengan menteri-menteri di era SBY, ia menilai banyak menteri SBY yang setelah tidak menjabat tidak memiliki pengaruh besar

saat ini di Indonesia, berbeda dengan Gus Dur yang menteri-menterinya masih berpengaruh, hal ini disebabkan oleh baiknya seleksi oleh Gus Dur dalam penentuan kabinet, dalam menentukan menteri yang harus dirombak, Gus Dur melihat kinerja menteri-menterinya selama 3 bulan, apabila tidak menunjukkan performa yang diharapkan maka menteri tersebut akan diganti, sehingga nantinya akan menemukan menteri-menteri yang sesuai dengan harapan Gus Dur dan berprestasi. Untuk melakukan koordinasi dengan menteri-menterinya terkait program-program kerja serta kebijakan dan rencana pemerintahan, Gus Dur membentuk tim monitoring kabinet yang diketuai oleh Rizal Ramli, pada saat itu Rizal Ramli masih menjabat sebagai Kepala Badan Urusan Logistik (BULOG). Tim monitoring kabinet ini bertugas untuk menerima laporan dari semua jajaran menteri Kabinet Persatuan Nasional setiap hari jumat dan menentukan serta merumuskan langkah-langkah selanjutnya yang dikonsultasikan dengan Gus Dur pada saat itu. Kerja tim ini hampir mirip tim Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang ada saat masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Namun perbedaannya tim ini hanya menerima laporan dan merumuskan kebijakan selanjutnya tanpa memberikan penilaian kepada setiap kementerian. Rizal Ramli bertugas untuk melakukan akselerasi antara gagasan Presiden dengan jalannya roda pemerintahan. Gus Dur menurut Adhie Massardi (dalam wawancara 18 Agustus 2017) tidak pernah memberikan penilaian terhadap menteri-menterinya sehingga tim monitoring tidak memberikan penilaian kinerja kabinet.

Dalam susunan kabinet, selain menghapus kementerian penerangan karena dinilai dapat mengganggu tujuan Gus Dur untuk membuka informasi seluas-luasnya serta memberikan kebebasan pers dan membubarkan kementerian sosial yang dinilai sebagai sarang praktik korupsi dan sudah merajarela sehingga sulit untuk dilakukan reformasi, tugas-tugas kementerian sosial pun dilimpahkan kepada kementerian-kementerian lain. Gus Dur juga membuat keputusan dengan mengurangi kekuasaan Sekretariat Negara (SETNEG) yang pada masa pemerintahan Soeharto mengendalikan pemerintahan diluar cakupan wewenangnya, Gus Dur juga mereformasi Kementerian Agama dengan berpendapat bahwa masalah Haji harus diserahkan kepada swasta dan kementerian Agama lebih bertugas untuk membantu masyarakat agama dibandingkan ikut campur dalam masalah keagamaan (Barton, 2003). Berbeda dengan tim monitoring kabinet, Gus Dur juga membentuk Sekretariat Kabinet yang bertugas mengawasi fungsi pemerintahan dan melaporkan kepada Gus Dur apabila ada menteri yang keluar garis. Pada saat itu Marsilam Simanjuntak, rekan Gus Dur di Forum Demokrasi ditunjuk sebagai Sekretaris Kabinet.

Sidang kabinet pada era Gus Dur berlangsung secara demokratis, setiap peserta rapat dibebaskan untuk berdiskusi dan mengeluarkan pendapat. Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh Rizal Ramli (dalam wawancara 16 Agustus 2017).

“..Ya kalau gus dur sih orangnya demokratis, ya bebas aja berdiskusi. Di mah presiden yang demokratis, biasa kalau ada beda pendapat. Karena ada ya presiden yang gabiasa beda pendapat seperti itu..”

Sementara komunikasi dengan menterinya berlangsung dengan baik, bahkan sering juga menteri tertentu dipanggil untuk sekedar berdiskusi banyak hal diluar hal-hal yang menyangkut kementerian terkait. Rizal Ramli mengaku sering dipanggil Gus Dur untuk membicarakan masalah-masalah politik yang tidak berkaitan dengan kementerian yang dipimpinnya saat itu, Banyak juga menteri yang sering dijadikan teman diskusi oleh Gus Dur. Di sidang kabinet, Gus Dur lebih sering berperan sebagai pendengar seperti pemaparan Adhie Massardi (dalam wawancara 18 Agustus 2017)

“..oleh sebab itu dalam sidang kabinet Gus Dur lebih banyak mendengarkan program-program kabinet. Nah kalau menjalankannya bagus ya Gus Dur beri *support* tapi kalau ada kementrian yang langkahnya perlu diperbaiki ya dia bicara di sidang kabinet itu. Misal langkah ini bagus tapi perlu dilengkapi dengan ini ini..”

Gus Dur lebih banyak mendengarkan pemaparan program-program yang sedang atau akan dijalankan oleh tim kabinetnya, apabila program tersebut dirasa Gus Dur baik maka Gus Dur akan memberikan dukungan penuh, namun apabila ada langkah-langkah dalam tim kabinetnya yang dirasa kurang sesuai, maka dalam sidang tersebut Gus Dur akan memberikan masukan untuk program kementerian terkait. Contohnya dalam masalah Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Gus Dur menilai masih ada langkah yang kurang tepat dalam melakukan pendekatan di Aceh, Gus Dur memberikan arahan terkait tindakan yang baiknya dilakukan di Aceh tanpa intervensi berlebih, sehingga pada saat itu Adhie Massardi menilai tidak banyak kritik terhadap jalannya kabinet Gus Dur, tetapi lebih pada kritik langkah politik Gus Dur.

4.5. Juru Bicara Kepresidenan Gus Dur

Dalam pemerintahan Gus Dur yang menarik adalah adanya tim juru bicara kepresidenan, memang di pemerintahan sebelumnya (Soeharto), ada kementerian penerangan dan Sekretaris Negara yang berperan sebagai juru bicara pemerintah, namun dalam pemerintahan Gus Dur tim juru bicara berdiri sendiri tanpa berkaitan dengan salah satu kementerian. Tim juru bicara bertugas untuk menjadi penghubung antara Presiden dengan masyarakat umum dalam menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga anggota tim juru bicara kepresidenan harus dapat menjadi interpreter yang baik dengan memahami setiap kebijakan yang dikeluarkan dari perspektif Presiden Gus Dur. Saat itu tim juru bicara diketuai oleh Wimar Witoelar, seorang jurnalis senior dan dianggotai oleh Yahya Staquf bersama Adhie Massardi. Peran juru bicara kepresidenan sangat penting untuk memperjelas kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden agar tidak ditangkap setengah-setengah. Sehingga juru bicara berperan menjelaskan kebijakan/keputusan Presiden secara menyeluruh. Tim juru bicara kepresidenan juga dibentuk agar akses masyarakat terhadap informasi seputar kepresidenan dapat lebih mudah, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk Gus Dur membuka diri kepada masyarakat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun dalam wawancara dengan Yahya Staquf, salah satu anggota tim juru bicara kepresidenan (21 Agustus 2017) terungkap bahwa adanya tim juru bicara merupakan permintaan dari DPR yang merasa perkataan Presiden banyak yang kontroversi.

“..Ada pendapat dengan DPR, katanya komplain soal pernyataan-pernyataan presiden yang dikatakan kerap menimbulkan kontroversi, diminta supaya ada juru bicara presiden. Ya itu untuk menuruti permintaan DPR..”

Pada saat itu, tim juru bicara tidak diberikan pembagian tugas khusus oleh Gus Dur, semua juru bicara memiliki tugas yang sama, namun pada perkembangannya, setiap juru bicara bertugas sesuai dengan keahliannya masing-masing, misalnya Wimar Witoelar lebih pada topik-topik masalah luar negeri, Adhie Massardi masalah politik dalam negeri dan Yahya Staquf terkait masalah sosial keagamaan, tak jarang juru bicara akan bertugas apabila dipanggil oleh Gus Dur, misalnya Yahya Staquf yang lebih sering berbicara masalah pesantren, sosial dan keagamaan dapat berbicara masalah ekonomi apabila memang dipanggil Gus Dur pada saat itu. Tidak adanya pembagian tugas secara spesifik tersebut membuat tim juru bicara kepresidenan bekerja secara fleksibel, hal tersebut diungkapkan Wahyu Muryadi (dalam wawancara 03 Agustus 2017).

“..Iya fleksibel. Memang banyak bersinggungan satu sama lain. Semua punya irisan, saling membackup ya, lebih karena untuk mengisi, katakanlah pembagian itu ada juga karena urusan-urusan yang sifatnya saling menutup. Jadwal aja, karena Gus Dur kan jam terbangnya kenceng sampai tengah malam-malam, itu siapa yang bisa. Ya gantian, *rolling*..”

Yang menarik adalah pembentukan tim juru bicara kepresidenan ini berlangsung tidak lewat cara-cara formal, pada waktu itu Gus Dur bertemu dengan Wimar Witoelar, waktu itu muncul pro-kontra terkait pembubaran Kementerian Penerangan dan Kementerian Sosial, banyak pihak yang tidak setuju dengan pembubaran tersebut, padahal latar belakang pembubaran tersebut cukup jelas, namun karena Gus Dur dinilai melampaui zaman sehingga sulit untuk masyarakat Indonesia saat itu memahami kebijakan Gus Dur, Wimar mengatakan

pada saat itu bahwa Gus Dur membutuhkan sosok yang menjadi jembatan antara Gus Dur yang pemikirannya sudah melampaui zaman dengan masyarakat Indonesia, dan Gus Dur pada saat itu mengatakan bahwa sosok tersebut adalah Wimar Witoelar, dari pertemuan tersebut akhirnya terbentuk tim juru bicara kepresidenan. Anggota juru bicara yang lain, Adhie Massardi mengatakan bahwa sebelumnya ia hanya banyak menulis di banyak media tentang Gus Dur dan tidak memiliki kedekatan secara *personal* dengan Gus Dur, ketika Adhie bertanya latar belakangnya penunjukannya, Gus Dur hanya menjawab profesionalitas, sementara Yahya Staquf merupakan kerabat Gus Dur dan adik dari Gus Mus (K.H. Mustofa Bisri). Sebenarnya pada waktu itu ada peran juru bicara tidak hanya dijalankan oleh tim juru bicara kepresidenan, Wahyu Muryadi (Kepala Protokoler), Dharmawan Ronodipuro (Kepala Biro Pers & Media) serta Yenny Wahid (anak kedua Gus Dur) juga menjalankan fungsi-fungsi juru bicara sesuai dengan tugasnya masing-masing. Wahyu Muryadi sebagai kepala protokoler istana, Pada saat itu Wahyu Muryadi bertugas untuk dua hal pertama yaitu yang terkait keprotokoleran yang mengatur acara presiden, undangan, upacara serta perjalanan kunjungan kepresidenan baik dalam maupun luar negeri. Lalu yang kedua latar belakang Wahyu Muryadi sebagai wartawan Tempo untuk bertindak sebagai penyambung antara presiden dengan awak media. Wahyu Muryadi dipercaya Gus Dur untuk *ngemong* wartawan dengan latar belakangnya tersebut, Dharmawan Ronodipuro sebagai Kepala Biro Pers & Media terkadang juga membantu Marsilam Simanjuntak untuk memberikan klarifikasi serta latar belakang dari

setiap kebijakan/ucapan yang dikeluarkan oleh Presiden, seperti penjelasan Dharmawan Ronodipuro (dalam wawancara 10 Agustus 2017).

“..Sepehaman saya tidak pernah. Salah satu tugas saya adalah untuk memberi klaifikasi. Kadang-kadang mereka nanya, ya saya coba menjelaskan atau dengan bantuan Marsilam. Apa maksudnya. Karena sering kali tugas saya ngasih *background*. Supaya mereka lebih memahami mengapa ucapan presiden seperti ini, kebijakan ini. Tapi tetap semua resminya dari presiden..”

Sementara itu Yenny Wahid lebih berperan sebagai pendamping dan juru bicara keluarga terkait masalah-masalah yang menyangkut keluarga Gus Dur, hal tersebut diungkapkan oleh Wahyu Muryadi (dalam wawancara 03 Agustus 2017)

“..Nggak. Umunya soal-soal yang menyangkut keluarga. Tapi secara umumnya kepresidenan, istana, pemerintah itu ya presiden..”

Dalam menjalankan tugasnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari publik yang timbul sebagai reaksi atas pernyataan Gus Dur pada waktu itu, mekanisme yang dilakukan adalah dengan sering melakukan diskusi dengan Gus Dur, hal ini dilakukan untuk memahami pola pikir Gus Dur, sehingga disaat publik bertanya tentang suatu hal, seorang juru bicara dapat menjawab pertanyaan tersebut tanpa bertanya terlebih dahulu ke Gus Dur, dan menurut penuturan Adhie Massardi, hingga akhir jabatannya tidak pernah ada kesalahpahaman antara ucapan juru bicara dengan ucapan Presiden. Sehingga memang dibutuhkan kemampuan lebih yang dimiliki oleh juru bicara kepresidenan untuk memahami Gus Dur.

“..Jadi juber waktu itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik, baik yang timbul dari pernyataan Gus Dur sendiri maupun dari kritik-kritik parlemen. Nah jadi itu tugasnya. Kemudian bagaimana mekanisme jawabannya, pertama kan karena kita juber punya kebebasan mengobrol kapan aja, menemani presiden sehingga informasirmasi kami segitu lengkap, apa yang diajukan dan direncanakan. Selain itu saya mempelajari pola pikir Gus Dur, dari

literatur dan ngobrol dengan teman-temannya. Sehingga ketika ditanya, apa pandangan presiden saya bisa jawab tanpa harus tanya dulu. Alhamdulillah sampai akhir, sampai Gus Dur wafat bahwa tidak ada jawaban saya menyimpang. Artinya yang disampaikan jubiir *clear* tidak ada masalah. Karena ada tiga sedangkan kepresidenan kan kompleks dan tiga ini tidak selalu bersama-sama, kadang-kadang bergantian..”

Sementara itu terkait mekanisme didalam tim juru bicara kepresidenan adalah dengan berbagai informasi, apa saja yang dikatakan, didiskusikan dan disampaikan oleh Gus Dur selaku Presiden, terkadang Presiden Gus Dur juga memberikan jawaban langsung atas berbagai pertanyaan kepada publik/media, biasanya pada hari Jumat Gus Dur akan menjawab berbagai pertanyaan wartawan atau publik setelah forum jumatatan, sebuah forum yang selalu dilakukan Gus Dur selepas pelaksanaan ibadah Jumat, di hari Sabtunya, tim juru bicara akan memberikan latar belakang serta penjelasan lebih detail terhadap perkataan atau jawaban Presiden tersebut.

Pada saat perseteruan antara Presiden Gus Dur dengan DPR, tim juru bicara berperan untuk meredam pertanyaan-pertanyaan yang muncul baik itu dari DPR, publik maupun media, hal ini dikarenakan ucapan Gus Dur seringkali dianggap *mengejek* sehingga menimbulkan kontroversi. Yahya Staquf (dalam wawancara 21 Agustus 2017) menyampaikan cerita pengalamannya saat menjadi tim juru bicara presiden, saat itu sedang terjadi krisis hubungan antara Presiden Gus Dur dengan Kapolri Bimantoro, saat itu Gus Dur menganggap Bimantoro mengadu domba Gus Dur dengan wakil presiden, Megawati.

“..Sekali saya pernah disuruh itupun Hari Minggu waktu ada krisis dengan Kapolri. Saya waktu itu minggu-minggu harusnya tidak ke istana. Saya kan punya kamar di wisma, barang-barang di sana. Waktu itu saya sekedar ambil barang, salaman sama Gus Dur. Nanya, ada wartawan nggak. Ada. Karena kan lagi memanas. Ya wartawan minggu-minggu nongkrong aja di istana. Saya bilang ada. terus coba

kamu sampaikan ke wartawan, itu Kapolri yang mau dipecat Gus Dur. Saya lupa nanya itu mengadu domba presiden sama wakil presiden, bilang sama wartawan. Sudah terus Gus Dur masuk kamar. Saya juga nggak sempat nanya mengadu domba gimana. Akhirnya saya keluar, saya bilang ke wartawan mau menyampaikan sesuatu. Wartawan ngumpul. Saya bilang, saya mau menyampaikan pernyataan dari presiden tanpa saya tambah atau kurangi, pernyataan Beliau seutuhnya, saya tidak menambahi apapun, dan saya sampaikan, tidak buka tanya jawab. Ya mereka nanya, saya bilang saya nggak buka tanya jawab. Nah itu saya sampaikan bukan karena hanya saya nggak sempat nanya soal *background* tapi saya tahu buat Gus Dur *statement* itu senjata politik. Bukan hanya selama dia presiden, sejak sebelumnya yang saya kenali dari Gus Dur adalah *statement* adalah salah satu senjata politik yang diandalkan. Gus Dur tahu betul apa yang dikatakan tentang sesuatu, kapan, jadi tahu betul. Setiap kali Gus Dur buat pernyataan pasti muncul dinamika akibat pernyataan itu..”

Pada saat itu Gus Dur memanggil Yahya Staquf di hari Minggu, hari dimana seharusnya Yahya Staquf libur dari aktifitasnya sebagai juru bicara presiden, saat memanggil Yahya Staquf, Gus Dur bertanya apakah ada wartawan di Istana ataukah tidak, saat itu Yahya Staquf diminta untuk menyampaikan pernyataan Gus Dur bahwa Bimantoro mengadu domba Presiden dengan Wakil Presiden, namun Gus Dur tidak memberikan penjelasan seperti apa adu domba yang dilakukan Bimantoro, Yahya Staquf langsung mengumpulkan awak media dan menyampaikan pernyataan Gus Dur tanpa dikurangi dan ditambahi, Yahya Staquf juga tidak membuka sesi pertanyaan, Yahya Staquf berpendapat bahwa *statement* merupakan senjata politik Gus Dur dan itu merupakan salah satu strategi politik Gus Dur yang sudah dijalankan bahkan sebelum menjabat sebagai Presiden. Pada saat rezim orde baru, *statement* juga menjadi senjata politik Gus Dur, Gus Dur tidak pernah melakukan penggalangan massa tapi hanya lewat ucapan-ucapannya saja. Yahya Staquf menilai pernyataan Gus Dur tersebut dimunculkan di waktu yang tepat, karena Gus Dur selalu memahami *stakeholder*

yang terlibat. Seperti pernyataan Yahya Staquf (dalam wawancara 21 Agustus 2017).

“..Keistimewaan Gus Dur karena tahu betul peta politik, tahu *stakeholder* yang terlibat sehingga dia tahu pernyataan yang pas isinya dan pas waktunya untuk memicu dinamika yang diinginkan, saya kira itu..”

Sebagai seorang juru bicara, tentu harus memiliki hubungan yang baik dengan awak media, karena juru bicara merupakan jembatan antara Presiden dengan publik termasuk dalam hal ini wartawan/media. Hubungan anggota tim juru bicara Presiden dengan media dari wawancara yang dilakukan penulis berlangsung dengan baik. Wimar Witoelar memiliki hubungan baik dengan media-media asing, bahkan waktu itu Wimar memberikan kesempatan kepada jurnalis dari Belanda untuk mengikuti kegiatan Presiden Gus Dur selama satu hari penuh, pada waktu itu akses media asing kepada Gus Dur hanya melalui satu saluran yaitu Wimar Witoelar, dan waktu itu Wimar selalu memberikan kesempatan kepada jurnalis-jurnalis asing untuk mewawancarai Gus Dur secara langsung, bahkan para jurnalis tersebut diperlakukan dengan sangat baik. Sementara itu Adhie Massardi yang memiliki latar belakang wartawan memahami betul apa yang dibutuhkan oleh wartawan, sehingga dalam praktiknya sebagai juru bicara presiden Adhie Massardi membuka saluran komunikasi selama 24 jam untuk setiap wartawan yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan Presiden Gus Dur, hal tersebut diungkapkan Adhie Massardi (dalam wawancara 18 Agustus 2017).

“..Karena latar belakang saya wartawan, saya paham mereka perlu informasi maka komunikasi saya dengan media wartawan itu 24 jam. Jadi kapan saja mereka minta informasi ya saya layani..”

Saat hubungan Gus Dur dengan parlemen mengalami krisis, tim juru bicara bersikap aktif menyampaikan langkah-langkah politik Gus Dur, terutama saat sidang istimewa, juru bicara menyampaikan sikap Gus Dur terkait sidang istimewa yang diadakan oleh MPR. Yang dilakukan oleh juru bicara tersebut adalah untuk menyeimbangkan pertarungan politik yang ada pada saat itu. Hal tersebut diutarakan oleh Addhie Massardi (dalam wawancara 18 Agustus 2017).

“..Kecuali langkah politk Gus Dur. Dengan demikian tugas jubir presiden jadi lebih ringan. Sehingga kalau kita melihat sekarang ini, peta politik terutama pertarungan lembaga presiden dengan parlemen ini kita membaca di Indonesia seolah-olah ada empat presiden dan satu parlemen karena Gus Dur tetap bicara, jubir bicara ya seolah-olah atmosfirnya ada empat presiden. Sehingga dari itu ada keseimbangan pertarungan politik. Sampai memuncak, memanas dan melahirkan sidang istimewa. Nah ini kami menjelaskan lebih ke sikap-sikap Gus Dur saat sidang istimewa..”

Hadirnya tim juru bicara Presiden dinilai banyak kalangan efektif dalam mendukung roda pemerintahan Presiden Gus Dur pada saat itu. Inayah Wahid menyatakan bahwa juru bicara presiden waktu itu efektif untuk menjelaskan dan mengelaborasi setiap kebijakan dan pernyataan Gus Dur, begitupula dengan Alissa Wahid yang berpendapat juru bicara presiden waktu itu berhasil menjadi interpreter dari setiap pernyataan-pernyataan Gus Dur, sementara Wahyu Muryadi menjelaskan bahwa Peran juru bicara presiden pada saat itu sangat penting karena pada masa pemerintahan Gus Dur, sosial media belum berkembang seperti saat ini sehingga peran juru bicara sebagai penyampai pesan presiden yang tidak selalu setiap saat dapat menjelaskan semua kebijakan kepada publik.

4.6. Gus Dur dan Masyarakat

Gus Dur dikenal sebagai seorang Negarawan yang dekat dengan rakyat, baik sebelum menjadi Presiden, saat menjadi presiden dan bahkan setelah menjadi Presiden. Gus Dur dikenal dekat dengan semua lapisan masyarakat lintas agama dan status sosial. Hal tersebut tentu tidak mengherankan apabila pada masa pemerintahannya, Istana dibuka selebar-lebarnya untuk masyarakat. Gus Dur ingin menghilangkan kesan angker Istana Negara dengan tinggal di Istana Negara bersama keluarga. Gus Dur membuat Istana mudah diakses oleh semua kalangan, hal ini berbanding terbalik saat masa pemerintahan Soeharto, saat itu Istana tidak tersentuh sama sekali, apalagi pada saat itu Soeharto tinggal di kediaman pribadinya di Cendana. Salah satu *gebrakan* baru Gus Dur adalah dengan mengadakan *open house* saat Hari Raya Idul Fitri di Istana, selain untuk lebih mendekatkan diri kepada rakyat, *open house* di Istana juga untuk efisiensi waktu agar tidak perlu pulang ke kediaman pribadinya di Ciganjur. Pada masa kepemimpinan Gus Dur, institusi kepresidenan menjadi lebih merakyat dibandingkan kepemimpinan sebelumnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Priyo Sambodho (dalam wawancara 15 Juli 2017).

“..dulu pada intinya presiden menempatkan institusi kepresidenan menjadi lebih membumi dari pada sebelum-sebelumnya. Pada sebelumnya pak harto seperti tidak tersentuh, jangan tersentuh kritiknya tidak bisa. Gus Dur membuat institusi kepresidenan lebih membumi seperti yang kita lihat sekarang ini, jabatan presiden itu juga jabatan publik yang harus memang tetap diawasi, dikritik, diberi saran dan pendapat. Intinya seperti itu. Jadi itu salah satu sumbangsih Gus Dur sebagai presiden. Gus Dur membuat istana presiden menjadi istana rakyat yang mudah diakses oleh siapapun juga. Seperti open house istana, itu pertamanya dibuat oleh Gus Dur..”

Priyo Sambodho berbagi pengalaman saat merencanakan *open house* pertama kali, pada waktu itu rencana awalnya *open house* akan diadakan di teras Istana karena staf di Istana menganggap apabila didalam akan merusak karpet yang baru saja dibeli pihak Istana, mendengar alasan tersebut Gus Dur marah dan memerintahkan agar *open house* diadakan didalam lingkungan Istana. Berikut petikan wawancara dengan Priyo Sambodho (dalam wawancara 15 Juli 2017).

“..Nah, waktu itu kita persiapan open house terus kita paparkan ke Gus Dur jadi nanti acaranya begini, mereka ngantri dari sini, nanti kita kasih tenda sana supaya ga kepanasan ngantrinya, terus setelah salaman nanti makan disini, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nanti bapak presiden dan keluarga diteras istana itu, nanti orang salaman disitu. Lalu dia nanya ‘kenapa di teras?’ ‘iya pak soalnya ini orang banyak, nanti hujan lagi kan. Itu kan karpetnya baru didalam nanti orang *injek-injek*. Marah Gus Dur ‘itu karpet kan yang beli rakyat juga, DIDALAM’..”

Inayah Wahid (dalam wawancara 13 Juli 2017) bercerita sewaktu *open house*, ia melihat banyak tawa bahagia dari masyarakat bahkan sampai dengan tukang sapu, meskipun pada waktu itu Inayah bersama keluarga cukup lelah karena lamanya waktu *open house*.

“..Waktu di Istana kan pertama kali *open house* lebaran. Sampai capek banget, bener-bener ketawa, sampai tukang sapu tuh masih bawa sapu masuk. Waktu itu Bapak sempet, adegan menarik, banyak tukang sapu jalanan, tukang jualan mau salaman sama presiden..”

Dari penyelenggaraan *open house* juga Inayah mengaku belajar dari Gus Dur bahwa hal-hal yang menyangkut prinsip pribadi Gus Dur tidak dapat berkompromi. Gus Dur berprinsip bahwa Istana merupakan rumah rakyat sehingga saat staf Istana mempermasalahkan karpet di dalam Istana yang akan rusak bila menerima rakyat saat *open house* Gus Dur marah.

“..pihak Istana krusak-krusuk, gimana nih karpetnya nanti rusuh. Bapak marah banget, ini karpet yang beli mereka, pakai duit mereka, mau mereka *injek-injek*

terserah. Itu buat saya pelajaran banget. Itu polanya gitu. Kalau soal prinsip banget nggak ada kompromi. Mau apa kek, diinjek2 kek, orang mereka yang punya..”

Gus Dur berasal dari keluarga pesantren, tidak mengherankan apabila saat beliau menjabat sebagai Presiden banyak kyai yang berkunjung ke Istana, namun yang berbeda pada masa pemerintahan Gus Dur adalah, para kyai ini datang ke Istana menggunakan sarung tidak menggunakan pakaian formal seperti tamu pada umumnya. Hal ini pula yang membuat suasana Istana menjadi lebih santai dan jauh dari kesan kaku.

“..Jaman Bapak, kyai pake sarung sandal jepit ya ayo aja. Kita kan nggak kebiasa dengan formalitas kayak gitu. Jadi waktu Bapak ulang tahun temen-temennya datang, pengawal bingung. Ini yang dateng pakai celana pendek, celana belel, gimana ini..” (wawancara Inayah Wahid, 23 Juli 2017).

Dalam lawatannya ke berbagai daerah pun, Gus Dur selalu menyempatkan diri hadir ke pesantren-pesantren untuk bertemu para kyai, sehingga terkadang paspampres cukup kewalahan pada waktu itu karena banyak agenda tak terduga yang sering Gus Dur lakukan. Priyo Sambodho bahkan mengatakan bahwa seringkali jadwal kunjungan Gus Dur ke daerah *molor* dari waktu yang sudah ditentukan karena Gus Dur sering melipir ke pelosok-pelosok untuk mengunjungi kyai-kyai sepuh atau untuk *nyekar* ke makam-makam leluhurnya, sehingga setelah dikunjungi Gus Dur biasanya makam-makam tersebut akan ramai dikunjungi oleh masyarakat. Hal tersebut diutarakan oleh Wahyu Muryadi (dalam wawancara 03 Agustus 2017).

“..Kalau Gus Dur lebih ke psantren-pesantren. Tiap kali kunjungan kemana-mana itu selalu aparat keamanan, diingatkan abis ini acara resmi ada nggak itu, Gus Dur selalu koleksi kyai-kyai antik, nyeleneh, eksentrik. Dia selalu punya, di sini kyai ini. Yang hidup yang mati, dia pasti tahu loh. Kyai-kyai keramat, nah itu pasti ada. Kalau ke daerah-

daerah biasanya abis undangan resmi, malam-malam biasanya dia *blusukan* ke kuburan-kuburan untuk mendoakan almarhum, almarhumah..”

Tinggal di Istana membuat hubungan Gus Dur dan keluarga dengan para staf yang bekerja di Istana cukup dekat, Kedekatan Gus Dur dengan staff-staffnya memiliki arti yang besar untuk mereka hal ini dibuktikan dengan tangisan mereka saat Gus Dur lengser. Kedekatan Gus Dur dengan staf-stafnya tercermin misalnya saat aktifitas jalan pagi di lingkungan Istana, Gus Dur menggunakan celana pendek, lama kelamaan, para ajudan yang menemani Gus Dur juga menggunakan celana pendek, itu merupakan salah satu bukti bahwa Gus Dur memiliki kedekatan dengan para stafnya. Latar belakangnya sebagai warga Nahdlatul Ulama membuat hubungan Gus Dur cair dengan para stafnya, akses para staf untuk berbicara langsung dengan Gus Dur juga sangat mudah, hal ini berbanding terbalik dengan masa pemerintahan Soeharto, waktu itu akses bicara staf di Istana hanya sekedar mengiyakan perintah tanpa ada *obrolan* lebih mendalam, bahkan para ajudan bisa bercerita apa saja dengan Gus Dur, Gus Dur tidak pernah memandang perbedaan kepada orang lain termasuk dengan orang-orang terdekatnya seperti ajudan, supir dan staf-stafnya. Gus Dur memanusiakan para staf-stafnya.

Setiap pemimpin punya cara tersendiri untuk berkomunikasi dengan masyarakat, pada waktu pemerintahan Gus Dur, komunikasi dengan masyarakat salah satunya dilakukan oleh sebuah forum setelah selesai ibadah Shalat Jumat, Pada masa Gus Dur, selain keterbukaan informasi dibuka selebar-lebarnya, interaksi antara Presiden dengan rakyat juga dibuka seluas-luasnya, sesi tanya

jawab yang dilakukan setelah Jumatan dilakukan secara terbuka dan tanpa batasan. Dialog setelah shalat Jumat yang dilakukan oleh Gus Dur merupakan kegiatan rutin, kegiatan tersebut pertama kali dilakukan di Masjid Baiturrahman di Istana Negara kemudian berpindah-pindah sesuai lokasi Gus Dur pada saat itu, dialog tersebut diawali dengan pembukaan oleh moderator yang dilanjutkan oleh sambutan Presiden dan dilanjutkan dengan tanya jawab antara jamaah dengan Presiden Gus Dur. Biasanya Gus Dur akan menyampaikan rencana-rencana program kerja selama beberapa waktu kedepan pada saat itu, dan hal tersebut terus dilakukan sampai dengan berakhirnya kepemimpinan Gus Dur. Dialog setelah Jumatan tersebut dilakukan tanpa rekayasa sehingga masyarakat bisa bertanya apa saja dan akan langsung dijawab oleh Gus Dur. Hal tersebut disampaikan oleh Wahyu Muryadi (dalam wawancara 03 Agustus 2017).

“..Nggak mau kontaknya dengan masyarakat luas lewat forum tanya jawab setelah Jumatan itu kemudian dibatas-batasin, direkayasa, nggak mau dia. Dibuka selebar-lebarnya, ngomong apa aja terserah. Nah itu seninya..”

Selain lewat forum setelah Jumatan, Gus Dur juga biasanya mempersilahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya di sebuah rumah di Jalan Irian setelah jam kerja Presiden di Istana. Gus Dur beralasan bahwa di Istana ada beberapa prosedur protokoler yang harus dilalui apabila ingin bertemu Presiden, namun di rumah Irian tersebut, masyarakat bebas tanpa melalui protokoler Istana. Hal tersebut diutarakan oleh K.H. Yahya Staquf (dalam wawancara 21 Agustus 2017).

“..Nah Gus Dur itu diantara cara Beliau membuat pertimbangan, Beliau membuka komunikasi sebanyak mungkin. Setiap abis jam kantor, sore, Beliau ke rumah di Jalan Irian itu. Ada rumah di Jalan Irian nggak tahu

punya siapa. Untuk terima tamu-tamu tanpa melalui protokoler. Kalau di istana kan ada prosedurnya. Tapi kalau di rumah itu nggak ada. Orang datang aja ngantri kayak ngantri dokter sampai jam 11..”

Kepedulian Gus Dur kepada masyarakat juga ditunjukkan dengan membubarkan badan sensor, hal itu karena Gus Dur berpendapat bahwa badan sensor karena apabila informasi terus disensor masyarakat tidak akan pintar dan biarkan masyarakat yang melakukan pemilahan terhadap informasi yang mereka dapat. Hal tersebut diutarakan oleh Inayah Wahid (dalam wawancara 13 Juli 2017).

“..Termasuk misal Gus Dur membubarkan badan sensor. Itu kan orang nggak bisa melihat. Waktu itu Bapak cerita ke saya , kalau masyarakat itu di sensor informasinya, kapan mau pintar, nggak bisa dipaksakan oh ini aja yang mau dikasih. Nggak boleh kita gitu, nantinya masyarakat sendiri aja yang mau sensor..”

Gus Dur dikenal sebagai tokoh pluralis, hubungannya dengan tokoh-tokoh lintas agama berlangsung dengan sangat baik. Hubungan Gus Dur dengan kelompok agama diluar Islam sangat cair karena Gus Dur bersifat mengayomi, melindungi dan selalu berpendapat bahwa agama merupakan rahmat bagi semua umat manusia. Hal tersebut diungkapkan oleh Romo Benny (dalam wawancara 05 Agustus 2017)

“..Cair. Gus Dur itu Bapak semua umat beragama karena Gus Dur itu mengayomi, melindungi, selalu mengatakan agama itu rahmat bagi semua..”

Gus Dur di mata Romo Benny, pemuka agama Katholik dinilai memiliki pribadi yang berprinsip bahwa keberimanan yang berbelas kasih, welas asih tanpa membedakan agama dan identitas. Gus Dur menganggap semua adalah saudara dan sebangsa. Tujuan Gus Dur membangun bangsa ini adalah untuk kepentingan bangsa karena bangsa merupakan hal utama yang lebih dari segala-galanya.

Hubungan Gus Dur dengan tokoh lintas agama diwujudkan dengan dibentuknya Forum Demokrasi, Forum demokrasi merupakan forum yang diikuti oleh Gus Dur dan Romo Benny, Forum Demokrasi ini memiliki tujuan untuk selalu mengedepankan konstitusi yang berpegang teguh pada prinsip Pancasila tanpa mengenal batasan suku, identitas, yang terpenting adalah kemanusiaan.

Dalam setiap lawatannya, Gus Dur selalu menyempatkan untuk bertemu dengan pemuka agama dari lintas agama contohnya adalah uskup katolik saat kunjungan ke Amerika Selatan, meskipun memiliki pandangan berbeda tentang suatu hal, Gus Dur selalu menjalin hubungan baik dengan mereka. Bahkan kegiatan Gus Dur dapat dikatakan sebagai kegiatan *full of blusukan* dengan fokusnya ke *blusukan* agama baik itu ke pesantren, melakukan ziarah makam ataupun mengunjungi pemuka agama diluar Islam. Hal tersebut diungkapkan Wahyu Muryadi (dalam wawancara 03 Agustus 2017).

“..Bahkan dalam suatu perjalanan waktu itu Gus Dur sempet minta mampir di Recife, kota di Brazil. Waktu kita sempet ke Brazilia, Buenos Aires. Dia mau mampir di Recife. Dia mendarat disitu mau ketemu uskup disitu. Katanya temennya dia. Tapi semuanya nggak turun, cuma sebentar. Nah terus *ndelalah* kok uskupnya itu udah meninggal terus diterima sama sekretarisnya. Nah ini luar biasanya Gus Dur dalam hubungan kemanusiaannya luar biasa. Walaupun secara politik mungkin mereka tidak cocok atau beda pandangan, berseteru, tapi Gus Dur secara pribadi tetap menjaga hubungan baik itu..”

Cerita Wahyu Muryadi tersebut membuktikan bahwa Gus Dur memiliki hubungan dengan berbagai tokoh dari lintas agama dan bahkan tokoh lintas agama dari mancanegara, sehingga tidak mengherankan apabila warisan yang Gus Dur tinggalkan salah satunya adalah pluralisme. Gus Dur menjaga etnis minoritas untuk dapat tetap hidup dengan damai di Indonesia, salah satu buktinya adalah

dengan memperbolehkan pementasan barongsai dan meliburkan hari raya Imlek.

Seperti penuturan Wimar Witoelar (dalam wawancara 21 Juli 2017).

“..karna dia juga pluralis yaa mee.. menyamakan hak orang cina menganggap semua agama sama sebelum Gus Dur tuh gaboleh ada orang papan lembar kaum Tionghoa. Ga ada... ga ada orang main barongsai ngerayain imlek yah..”

4.7. Proses Pengambilan Keputusan Gus Dur

Dalam memimpin, tentu setiap pemimpin memiliki cara tersendiri dalam menentukan cara mereka mengambil sebuah keputusan, begitupula dengan Gus Dur. Ajang pemilihan presiden tahun 1999 merupakan sebuah peristiwa bersejarah, waktu itu untuk pertama kalinya diadakan pemilihan presiden setelah 32 tahun Indonesia dipimpin Soeharto dan tidak pernah ada pemilihan presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebenarnya PKB sudah memutuskan mendukung Megawati pada waktu itu untuk menjadi calon presiden, namun karena poros tengah mewacanakan untuk mendukung Gus Dur, PKB pun berubah sikap, apalagi pada saat itu hingga batas waktu yang ditentukan perwakilan PKB tidak dapat menemui Megawati di kediamannya, sehingga sesuai keputusan rapat beberapa petinggi PKB, memutuskan untuk mendaftarkan Gus Dur ke panitia pemilihan presiden di MPR. Hal tersebut diutarakan oleh Arifin Junaidi (dalam wawancara 23 Agustus 2017).

“..akhirnya disepakati untuk menemui Bu Mega, yang kesana Cak Imin, Gus Yus, Kyai Cholil Bisri, mereka pergi dulu ke Pak Matori, saya dan Bu Khofifah ditugasi untuk menyiapkan syarat-syarat pencalonan Gus Dur dengan catatan kalau sampe subuh tidak ada kabar dari mereka yang ke BU MEGA, kita mencalonkan Gus Dur, kita menyiapkan dua map, map yang pertama dukungan Bu Mega yang sudah lengkap oleh PKB, dan map Gus Dur yang harus dilengkapi malam itu, nah ternyata sampe subuh gak ada kabar, sampai jam 6 tidak ada kabar, saya sama bu Khofifah ambil inisiatif mendaftarkan Gus Dur

sebagai calon presiden dari PKB. Jadi setelah itu baru partai-partai yang lain menyatakan dukungannya kepada Gus Dur..”

Sebelum pemilihan presiden tahun 1999 oleh MPR, nama yang pada saat itu kuat diyakini akan menjadi Presiden Indonesia adalah Megawati Soekarnoputri, hal ini dilatarbelakangi kemenangan telak PDI-Perjuangan dalam pemilu legislatif tahun 1999, namun pada waktu itu pula muncul pro-kontra terkait pencalonan Megawati sebagai Presiden, Gus Dur bahkan dalam sebuah kesempatan di Singapura mengatakan bahwa kyai-kyai konservatif menolak pencalonan Mega selain karena Megawati adalah seorang perempuan, kemampuannya pun diragukan dalam memimpin Indonesia, hal tersebut juga lantas membuat persahabatan Megawati dan Gus Dur pada waktu itu sempat merenggang, namun di kesempatan lain Gus Dur juga memuji Megawati, tetapi hal tersebut tidak lantas membuat sakit hati Megawati hilang begitu saja (Barton, 2003).

Dr. Zastrouw (dalam wawancara 26 Juli 2017) menyatakan bahwa Gus Dur mampu menyembunyikan pesan dengan melakukan kamuflase dalam bentuk pesan lain. Gus Dur menyembunyikan pesan ingin menjadi Presiden dengan tidak terlihat memiliki ambisi yang tinggi tetapi tetapi dalam garis perjuangan. Gus Dur disatu sisi mampu meyakinkan mitra-mitra politiknya tentang keseriusannya untuk menjadi Presiden namun di sisi yang lain ia mampu menutupi ambisinya sehingga meningkatkan daya tawarnya sebagai seorang calon Presiden. Berikut petikan wawancara dengan Dr. Zastrouw:

“..Di sini menurut saya kemampuan politik yang luar biasa. Gus Dur mampu menyembunyikan pesan dia tapi mengkamufase dalam bentuk pesan lain. Sehingga menurut saya Gus Dur menyembunyikan pesan

jadi presidensiden tapi nggak kelihatan ambisi tetap jadi *real* perjuangan. Menerima ala kadarnya, nggak berjuang, nggak ngoyo. Kalau *samean* mau calonin presidensiden kok nggak serius beneran. Loh kan saya nggak serius, kan itu maunya mereka aja..”

Dalam proses keputusan beliau akhirnya maju sebagai calon Presiden, menurut Dr. Zastrouw hal tersebut karena Gus Dur memiliki pendapat bahwa pencalonannya sebagai Presiden adalah untuk kepentingan bangsa, untuk memperjuangkan sesuatu tidak selamanya ada di level masyarakat tetapi dengan cara menguasai Negara. Keputusan Gus Dur untuk akhirnya maju pada pertarungan pemilihan presiden di MPR memiliki Tujuan utama untuk memenuhi tuntutan-tuntutan reformasi diantaranya yaitu menjadi negara yang lebih demokratis dan menjadi negara hukum yang baik dalam wujud tegas kepada siapapun yang bersalah, peningkatan ekonomi lewat peningkatan kesejahteraan masyarakat juga menjadi tujuan Gus Dur hal tersebut berusaha dicapai dengan menjadi negara agraria penghasil pertanian yang unggul dan menjadi negara maritim yang jaya di laut. Gus Dur juga ingin Indonesia sebagai pasar utama industri otomotif tidak dikuasai oleh asing, sehingga memang keputusan Gus Dur untuk akhirnya maju sebagai calon presiden pada saat itu dilatarbelakangi oleh kepeduliannya terhadap bangsa.

Dalam setiap pengambilan keputusan, Gus Dur dikenal sebagai pemimpin yang mau mendengar saran dari banyak pihak, termasuk dari para kyai. Gus Dur dikenal tidak pernah meninggalkan para kyai sampai akhir hayatnya. Hubungan tersebut juga berdampak pada pengambilan keputusan Gus Dur, Gus Dur selalu meminta pendapat para Ulama sebelum memutuskan sesuatu, termasuk saat mengeluarkan dekrit Presiden, dekrit tersebut merupakan usul dari para Ulama

yang berkumpul di Batu Ceper. Meskipun ada hasil musyawarah tersebut yang tidak Gus Dur setuju yaitu pengerahan massa ke Jakarta untuk membela Gus Dur. Jadi dalam masa kepemimpinan Gus Dur, Gus Dur tidak pernah meninggalkan para Ulama dan selalu menjadikan Ulama sebagai tempat berdiskusi tentang banyak hal.

Selain meminta pendapat para kyai, dalam melakukan pengambilan keputusan Gus Dur juga akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan yang akan dikeluarkan untuk mendengarkan pendapat pihak-pihak tersebut. Inayah Wahid (dalam wawancara 13 Juli 2017) bercerita tentang kekagumannya kepada sosok ayahnya, Gus Dur karena Gus Dur dalam proses pengambilan keputusan bersikap egaliter tanpa merasa dirinya yang paling tahu dan paling benar, Gus Dur akan mendengarkan pendapat orang-orang yang terkait dengan keputusan yang akan diambilnya dan berusaha memahami mereka dengan menggunakan sudut pandang lawan bicaranya, berikut petikan wawancara penulis dengan Inayah Wahid.

“..Itu salah satu yang saya suka dari Bapak, Bapak orangnya egaliter. Bukan tipikel orang yang gini, Gus Dur itu IQ nya tinggi tapi nggak pernah ngerasa dia itu orang yang paling pinter. Saya tuh banyak baget dengeri cerita dari temen, jadi gini waktu Bapak ngejabat. Presiden harus bikin kebijakan hutan, mislanya. Maka Bapak akan panggil orang-orang ini yang terkait, yang sudah duluan jalan, sudah paham. Dan Bapak percaya mereka, dengerin mereka. Dan dengan yang diundang Bapak, waktu itu, umurnya beda jauh. Istilahnya pengalaman hidupnya nggak sebanyak Bapak, tapi apak *willing* dengerin mereka, melihat dari sudut pandang mereka nah itu buat saya luar biasa..”

Dalam melakukan proses pengambilan keputusan, Gus Dur sangat independen, beliau selalu mendengarkan masukan-masukan dari pihak-pihak terkait namun keputusan akhir tetap berada di tangan Gus Dur sebagai Presiden.

Sehingga, apabila banyak pihak yang menganggap Gus Dur banyak dibisiki oleh orang-orang terdekatnya, itu dinilai Priyo Sambodoho salah besar. Selain memiliki jaringan yang luas, Gus Dur juga memiliki referensi yang luas sehingga dalam pengambilan sebuah keputusan dilakukan secara komprehensif. Seperti diutarakan Priyo Sambodoho (dalam wawancara 15 Juli 2017)

“..jadi kalo orang bilang dulu ada kondisi kondisi. Kalo menurut saya pribadi yang setiap hari *anu*, siapa yang bisa *bisii* Gus Dur, orang Gus Dur itu begitu. Dan dia referensinya kan luas sekali, referensinya luas, temennya banyak, jaringannya luas. Jadi sehingga informasi itu menurut saya taraf mengambil keputusan itu sangat komprehensif *anu* nya ya perpindahannya. Jadi kalo ada orang bilang kondisinya begini begini begini, saya bilang ga ada yang *bisii* Gus Dur. Jangankan orang lain, istrinya juga ga..”

Rizal Ramli (dalam wawancara 16 Agustus 2017) menyatakan bahwa Gus Dur merupakan tipe pemimpin yang intuitif dalam pengambilan banyak keputusan,

“..Ketika sangat kuat prinsip jadi porosnya, dia sendiri intuitif, banyak keputusan yang nggak bisa dinalar, apalagi nalar politik, nggak ngena. Ya banyak yang nggak bisa dicerna. Seperti orang menertawakan Mahfud MD jadi Menteri Pertahanan. Ya sekarang kita tahu Ketua MK yang kredibilitas bisa dipegang ya Pak Mahfud. Pak Mahfud bukan orang yang dekat sama Gus Dur. Waktu awal-awal nggak kenal, bukan gengnya tapi gimana orang seperti itu loyal sama Gus Dur. Jadi itu yang pengambilan keputusan yang kok nggak rasional tapi sebenarnya banyak *reasoning* yang kita nggak bisa ngejudge Gus Dur. Hanya orang yang ngikutin 24 jam seminggu dan *critical thinking* yang tinggi, misalnya Mas Sastro udah ngikutin dari lama ya bisa membaca lebih jernih tapi kalau enggak ya ga bisa..”

Dalam melakukan pengambilan keputusan, Gus Dur sangat intuitif, banyak keputusan yang awalnya menimbulkan kontroversi dan pertentangan dari banyak pihak, tetapi di masa selanjutnya keputusan tersebut dinilai keputusan yang paling tepat. Misalnya penunjukkan Mahfud MD sebagai menteri pertahanan, pada waktu itu banyak pihak yang tidak setuju dengan pengangkatan Mahfud MD apalagi Mahfud bukan termasuk orang dekat Gus Dur pada waktu

itu, namun disetiap keputusan yang diambil Gus Dur selalu ada alasan-alasan yang masuk akal yang baru dapat ditangkap setelah keputusan tersebut diambil.

Dalam melakukan pengambilan keputusan, Gus Dur selalu memiliki pendapat sendiri yang diyakini oleh Gus Dur, namun Gus Dur tetap menerima masukan dari berbagai pihak yang terkait, Gus Dur yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila mempraktikkannya dalam proses sebelum mengambil sebuah keputusan, Gus Dur selalu melakukan diskusi dengan banyak pihak untuk menerima masukan-masukan, selain untuk memahami dari sudut pandang orang lain, hal tersebut juga dilakukan agar Gus Dur benar-benar paham terhadap kebijakan yang akan diambil tersebut. Gus Dur juga membuka banyak saluran komunikasi sebanyak mungkin dengan banyak pihak, selain pertemuan di Istana, Gus Dur juga membuka kesempatan bagi banyak pihak untuk menemuinya di sebuah rumah di Jl. Irian, hal ini dilakukan agar Gus Dur mendapatkan banyak masukan terkait roda pemerintahan yang dipimpinnya.

“..Saya lihat sepenuhnya keputusan Beliau. Nah Gus Dur itu diantara cara Beliau membuat pertimbangan, Beliau membuka komunikasi sebanyak mungkin..” (wawancara K.H. Yahya Staquf, 21 Agustus 2017).

Tidak hanya yang berkaitan dengan roda pemerintahan, dalam menghadapi konflik organisasi yang terjadi di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa, Gus Dur selalu mengedepankan musyawarah dan komunikasi dengan mengedepankan aturan dan mekanisme yang sesuai. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pada waktu itu terdapat konflik dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa, untuk menyelesaikan Gus Dur mengutamakan musyawarah serta melakukan komunikasi

sebanyak mungkin dengan pihak-pihak terkait. Hal tersebut diungkapkan oleh Ali Masykur Musa (dalam wawancara 24 Agustus 2017)

“..Ohiyaah pengambilan keputusan selalu dengan cara musyawarah yaa komunikasi, walopun Gus Dur dengan cara pribadi suka atau tidak suka pada orang itu kan wajar, tapi pengambilan keputusannya selalu dijalankan, seperti misalnya penggantian Sekjen, terus ketua umum Pak Muhaimin, itu dirapatkan dan diplenokan memang keputusannya perlu disetujui diganti walopun voting, yang dengan terpilihnya saya, gitu, artinya itu jalan kan, urusan puas tidak puas kan itu pribadi dan diluar mekanisme..”

Sehingga dalam proses pengambilan keputusannya, Gus Dur selalu melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk didengar pendapatnya dan melihat suatu permasalahan dari sudut pandang pihak lain, Gus Dur juga selalu membuka ruang diskusi dengan semua pihak, misalnya dengan para menteri sebelum mengambil sebuah keputusan terkait kebijakan tertentu.

4.8. Hubungan Gus Dur dengan Parlemen

Pada waktu Gus Dur terpilih menjadi Presiden, pemilihan presiden dipilih oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sehingga hubungan seorang calon presiden maupun presiden terpilih dengan parlemen biasanya berlangsung dengan harmonis, hubungan Gus Dur dengan parlemen dapat dilihat sejak pemilihan presiden tahun 1999. Greg Barton dalam buku biografi tentang Gus Dur mendeskripsikan hubungan Gus Dur dengan parlemen sebagai hubungan bulan madu yang singkat, hal ini disebabkan hubungan Gus Dur dengan parlemen yang harmonis hanya berlangsung sesaat, hal tersebut berakhir dengan dimakzulkannya Gus Dur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia lewat sidang istimewa MPR tahun 2001.

Menjelang pemilihan presiden Pada Gus Dur melakukan komunikasi dengan Amien Rais dan Yusril Ihza Mahendra yang merupakan kelompok poros tengah. Gus Dur berhasil menyatukan dua kepentingan berbeda antara kelompok Islam Modernis dengan politik modern dengan Islam Tradisional. Komunikasi yang dilakukan Gus Dur dilakukan secara intensif dengan tujuan merajut perbedaan. Caranya dengan meminimalisir jarak dan menciptakan kedekatan. Hal tersebut diungkapkan diungkapkan Dr. Zastrouw (dalam wawancara 26 Juli 2017).

“..Melakukan komunikasi dengan semua pihak termasuk dengan pihak-pihak yang sebelumnya berseberangan, seperti pihak Amin Rais, Yusril Mahendra, yang mengerucut di poros tengah. Jadi menurut saya itu terbentuk berkat kepiawaian politik, kemampuan Gus Dur mengomunikasikan kepentingan-kepetingan politik dengan kelompok lain. Meskipun dari poros tengah punya kepentingan atas diri Gus Dur. Sehingga dua kepentingan ini yang tidak ketemu akibat adanya perbedaan cara pandang dimana Amin Rais, Yursil dari kelompok Islam modernis dengan politik modern, sementara Gus Dur dari politik tradisional. Tapi semuanya dikomunikasiin dengan baik. Sehingga ini pola-pola komunikasi yang intensif dilakukan Gus Dur untuk merajut perbedaan. Jadi waktu itu Gus Dur mempunyai cara berkomunikasi. Bahasa saya meminimalisir jarak dan menciptakan kedekatan..”

Hubungan Gus Dur dengan parlemen di awal pemerintahan masih berlangsung dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kedatangan Gus Dur ke gedung MPR/DPR dalam rangka pidato pertanggungjawaban tahunan, waktu itu Gus Dur masih melemparkan *jokes-jokes* dihadapan anggota dewan, namun hal tersebut tidak berlangsung lama, hal ini dikarenakan banyaknya tekanan politik terhadap Gus Dur baik dari partai diluar pendukung pemerintah maupun dari mitra koalisi dalam pemerintahan Gus Dur. Ali Masykur Musa (AMM) menyatakan bahwa Gus Dur sebagai Presiden yang pada saat itu juga sebagai mandataris MPR menurut AMM menjalankan tugas-tugas di parlemen dengan baik tanpa ada

aturan yang ditabrak. Namun hubungan menjadi renggang karena adanya kepentingan partai yang tidak diadopsi/diserap oleh Gus Dur. Yang puncaknya pada saat pergantian Jusuf Kalla yang membuat partai politik tersinggung. Hal tersebut diutarakan beliau (dalam wawancara 24 Agustus 2017).

“..sebagai presiden beliau jalankan semua tugas-tugas dengan gaya kepemimpinan dan berkomunikasi seperti itu semua tugas di parlemen dijalankan dengan baik, misalkan dua kali menyampaikan nota keuangan, teruuus, semua undang-undang, pembuatan undang-undang juga dijalankan dengan baik. Artinya tidak ada *eeeeh* pakem atau the part of parlemen yang diaaa tabrak..”

Hubungan Gus Dur dengan parlemen dari segi komunikasi tetap lancar, namun apabila dilihat dari segi politik, berbeda. Hubungan Gus Dur dengan parlemen pada saat itu tetap baik lewat komunikasi dengan Akbar Tanjung meskipun komunikasi yang dilakukan lewat komunikasi tidak langsung atau melalui perantara. Hal tersebut diutarakan Priyo Sambodho (dalam wawancara 15 Juli 2017).

“..kalau bicara soal komunikasi tetep lancar ya, tapi kalau kita bicara soal politik ya kejadiannya seperti itu. Itu dua hal yang berbeda menurut saya ya. Kalau kamu nanya tentang komunikasi ya lancar-lancar aja, sampai lengserpun masih tetep komunikasi. Orang-orang yang menikungnya, Amin Rais gitu komunikasi tetep lancar..”

Komunikasi tidak langsung tersebut dilakukan lewat pimpinan-pimpinan partai politik yang berada di kabinet persatuan nasional Hal tersebut diutarakan Arifin Junaidi (dalam wawancara 23 Agustus 2017).

“..Saya ditugaskan tetapi kan seperti yang tadi saya katakan mereka tuh sudah punya keputusan, jadi mau di *lobby* kayak apapun ya pokoknya Gus Dur harus turun, jadi gak bisa. Juga menggunakan tokoh-tokoh lain, misalnya ya waktu itu ada di cabinet itu lah dari tokoh-tokoh partai, itu yang dimintai oleh Gus Dur untuk bisa melakukan *lobby-lobby* itu..”

Komunikasi juga dilakukan lewat perwakilan PKB di MPR/DPR. Walaupun begitu, Gus Dur menurut penuturan Ali Masykur Musa (AMM) tidak berusaha mempertahankan kekuasaannya karena merasa tidak bersalah atas tuduhan DPR pada saat itu, apalagi menurut AMM yang sempat menyarankan Gus Dur untuk melakukan negosiasi dengan pihak MPR/DPR, DPR/MPR memang ingin menjatuhkan Gus Dur sehingga menurut Gus Dur tidak perlu mempertahankan kekuasaan apalagi bila harus terjadi pertumpahan darah. Gus Dur juga menolak berkompromi dengan lawan politiknya yang menawarkan “mengamankan” Gus Dur dengan syarat kabinet dan BUMN harus diatur sesuai dengan permintaan lawan politiknya, Gus Dur menolak dengan alasan ia tidak ingin menjadi presiden yang tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri karena bila hal tersebut terjadi maka tujuan yang ingin Gus Dur capai sebagai presiden akan sulit tercapai. Sebenarnya komunikasi secara formal sudah jarang dilakukan oleh Gus Dur dengan partai politik pada saat itu terutama partai politik pendukung pemerintah. Negosiasi yang dilakukan oleh elite-elite politik pada saat itu dapat diterima oleh Gus Dur asal tetap memegang teguh prinsip, sehingga disaat ada tawaran untuk tetap mendukung Gus Dur diposisi tampuk pimpinan Indonesia dengan syarat-syarat tertentu yang diminta Gus Dur berlawanan dengan prinsip beliau, Gus Dur tolak.

Menjelang dimakzulkan, Gus Dur memiliki cara berbeda dalam mengkomunikasikan posisi politiknya kepada masyarakat bawah dan kepada elit politik, kepada masyarakat bawah Gus Dur menyampaikan bahwa kesatuan bangsa menjadi hal yang utama sehingga tidak layak setetes darah rakyat

dikorbankan untuk kekuasaan Gus Dur sedangkan kepada elit politik Gus Dur menyampaikan bahwa pemakzulan dirinya merupakan bentuk kezaliman. Hal ini merupakan bentuk komunikasi Gus Dur yang menyesuaikan dengan komunikannya lewat pendekatan yang humanis.

Hubungan Gus Dur dengan parlemen yang harmonis hanya berlangsung dalam waktu yang singkat, hal ini disebabkan oleh banyaknya kepentingan partai-partai politik yang tidak tertampung yang hal tersebut berlawanan dengan prinsip kepemimpinan Gus Dur, sehingga bukan masalah hukum yang menjadikan Gus Dur dimakzulkan seperti munculnya memorandum I tentang Brunei Gate, lalu memorandum II tentang bulog gate, tetapi lebih kepada masalah politik yang dijadikan alasan pemakzulan Gus Dur, hal ini dilatarbelakangi oleh keluarnya dekrit presiden Gus Dur pada waktu itu, hubungan Gus Dur dengan parlemen juga semakin memanas karena banyaknya ucapan-ucapan Gus Dur yang dinilai menyinggung parlemen seperti ucapan Gus Dur yang menyebut parlemen seperti taman kanak-kanak.

1.9. Gus Dur dan Militer

Hubungan Gus Dur dengan militer menarik untuk dicermati, peneliti melakukan studi pustaka mengenai hubungan Gus Dur dengan militer dalam masa pemerintahannya. Keharmonisan hubungan Gus Dur dengan militer tidak berlangsung lama, Haramain (2004) menyatakan bahwa strategi Gus Dur untuk melakukan kontrol terhadap TNI dinilai terlalu mengakomodasi kelompok yang mengkhendaki terciptanya sistem pemerintahan yang demokratis dan hal tersebut berdampak pada tidak terlibatnya TNI secara langsung dalam bidang sosial dan

politik, sehingga membuat TNI menjadi tentara professional yang fokus pada bidang pertahanan.

Dalam 20 bulan masa pemerintahannya, Gus Dur mengeluarkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan peran TNI & POLRI. Diantaranya adalah posisi Menteri Pertahanan yang diisi dari kalangan sipil oleh Juwono Sudarsono dan Mahfud MD, hal ini dilakukan oleh Gus Dur untuk memperjelas peran TNI dalam bidang pertahanan dan ketahanan yang dijalankan oleh Panglima TNI sedangkan Menteri Pertahanan berada dalam bidang administrasi pertahanan. Gus Dur juga memisahkan Polri dan TNI dengan menempatkan posisi Kapolri sejajar dengan Panglima TNI, hal tersebut tertuang dalam TAP MPR RI VI/MPR/2000, Gus Dur juga menghapus Badan Koordinasi Stabilitas Nasional (BAKORSTANAS).

Gus Dur juga memulai tradisi pemilihan Panglima TNI secara bergilir dari Angkatan Darat, Udara, dan Laut, pada masa pemerintahannya, Gus Dur menunjuk Laksmana Widodo Adi Sucipto sebagai Panglima TNI (Haramain, 2004), hal tersebut menurut Gunawan (dalam Haramain, 2004) hal tersebut dilakukan agar muncul keseimbangan dalam tubuh TNI. Kebijakan-kebijakan yang Gus Dur keluarkan tersebut dinilai Mietzner (2006) sebagai upaya Gus Dur melakukan reformasi dalam tubuh TNI serta mengendalikan angkatan darat sekaligus memberikan kontrol sipil atas militer. Saat itu Gus Dur memiliki keinginan untuk memperbaiki dan membangun kembali konsep hubungan antara sipil dengan militer dengan mengedepankan supremasi sipil.

Konflik militer dengan Gus Dur juga terjadi karena keputusan Gus Dur melakukan rotasi di tubuh TNI seperti pemecatan Sutjipto sebagai KSAL dan Tyasno sebagai KSAD, posisi Tyasno sebagai KSAD digantikan oleh Agus Wirahadikusumah yang sudah tidak didukung oleh kalangan militer pada saat itu (Ginting, 2014). Konflik di tubuh militer yang berlarut-larut berdampak pada kurangnya dukungan militer terhadap pemerintahan Gus Dur. Pada saat Gus Dur akan mengeluarkan dekrit presiden pembubaran DPR, kalangan militer sebagian besar menolak yang berujung pada *impeachment* Gus Dur dari posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2001.

1.10. Diplomasi Gus Dur

Gus Dur dikenal sebagai seorang presiden yang sering melakukan kunjungan ke luar negeri, tidak heran beliau dijuluki presiden wisatawan karena seringnya melakukan lawatan tersebut. Seringnya Gus Dur melakukan kunjungan ke luar negeri memang mendapatkan banyak cibiran dari banyak kalangan, namun kunjungan tersebut bukannya tanpa alasan, tujuan Gus Dur melakukan kunjungan ke luar negeri adalah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia merupakan negara yang besar, tidak hanya mengunjungi negara-negara sahabat, Gus Dur juga hadir di forum-forum internasional dengan kemampuan bahasa inggrisnya yang baik. Ia ingin menunjukkan kekuatan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar dan negara demokrasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Wahyu Muryadi (dalam wawancara 03 Agustus 2017).

“.. Selama ini yang dikatakan pada saya, dia ingin *show off* kepada dunia. Khususnya pada negara yang dituju itu, bahwa Indonesia itu negarabesar, Indonesia itu tidak hanya Bali, Jawa tapi ada ratusan bahasa daerah, etnis, segala macam. Dia ingin menunjukkan bahwa kita punya isu-isu yang berkembang di dunia. Nah itu yang ditunjukkan dengan keberanian dia bicara di forum-forum internasional toh, Bahasa Inggrisnya bagus, Bahasa Arabnya lebih-lebih. Bahasa Inggris dapet Doktor dari Asian Institute of Technology. Dia ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu negara yang eksis, besar, jumlah penduduk, demokratisnya, jumlah penduduk Islamnya yang mungkin memberikan poros penguatan tegaknya negara-negara Asia ini di depan kekuatan yang namanya Adidaya, Amerika, Cina, Eropa. Itu..”

Selain itu, tujuan lain Gus Dur adalah untuk mempertahankan NKRI dari ancaman disintegrasi bangsa. Gus Dur melakukan lobi-lobi kepada negara-negara yang mendukung kelompok-kelompok separatis yang ingin berpisah dari NKRI seperti Republik Maluku Selatan(RMS), Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) apalagi pada saat itu Indonesia baru saja lepas dari krisis pasca terjadinya gerakan reformasi tahun 1998 sehingga kunjungan tersebut penting dilakukan untuk menegaskan kedaulatan Indonesia di mata dunia pasca krisis 1998 dan orde baru. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan banyaknya anggapan banyak orang bahwa Gus Dur adalah presiden wisatawan, Arifin Junaidi mengemukakan (dalam wawancara 23 Agustus 2017)

“..sebenarnya salah besar ketika orang mengatakan Gus Dur itu apa namanya Presiden wisatawan, emangnya Gus Dur waktu itu wisata itu, nah Gus Dur wisata apa ngeliat apa Gus Dur, mohon maaf ya Gus Dur kan tidak bisa melihat apa-apa, dan di satu Negara itu Cuma sebentar-sebentar saya juga ikut kemana-mana tetapi saya tidak tahu mana-mana karena dari bandara ke misalnya ke istana selesai pembicaraan balik lagi ke bandara pergi ke Negara yang lain, dan hasilnya banyak termasuk misalnya ada yang membebaskan utang kita di *ride-off* utang kita, ada salah satu Negara Timur Tengah yang kita datangi kesana yang kemudian -utang kita dihapuskan, jadi kemudian ada juga keringanan-keringanan dari Arab Saudi, jadi banyak sebenarnya hasilnya, Gus Dur itu kan ingin berhubungan baik dengan semua baik waktu itu dengan Fidel Castro misalnya kan waktu itu ke Kuba abis dari Kuba kemudian ke Amerika, Amerikanya marah..”

Arifin Junaidi menyatakan bahwa rombongan tidak sempat menikmati keindahan suatu negara karena setelah berkunjung ke Istana negara setempat, rombongan akan langsung kembali ke bandara untuk pergi ke negara lain, hasil dari kunjungan luar negeri Gus Dur selain eksisten NKRI juga diantaranya adalah penghapusan hutang dan keringanan-keringanan dari Arab Saudi sebagai contoh, Gus Dur pun menjalin hubungan baik dengan banyak negara tanpa memandang ideologi negara tersebut. Ini merupakan bukti bahwa Gus Dur memegang teguh prinsip egaliter dan pluralisme.

Hal lain diungkapkan Priyo Sambodho (dalam wawancara 15 Juli 2017), Priyo menyatakan bahwa Gus Dur dalam kunjungan-kunjungan tersebut melakukan *lobby-lobby* politik kepada pemimpin-pemimpin dunia yang mendukung Papua merdeka, untuk mempertahankan NKRI dan tetap menjaga Papua menjadi Negara berhasil, dan hal tersebut terbukti, saat ini Papua masih menjadi bagian dari Indonesia.

“..Gus Dur itu kan termasuk presiden yang sering sekali kunjungan ke luar negeri, orang bilang jalan-jalan lah. Padahal jangankan jalan-jalan, Gus Dur kan orang yang ga bisa lihatkan, jadi taunya cuma hotel dan tempat acara, gatau jalannya kayak gimana. Dan Gus Dur melakukan itu, karena pada saat itu kita sedang dalam bahaya disintegrasi bangsa ya, itu caranya beliau untuk menahan pecahnya NKRI. Dia lobby jagoan-jagoan didunia. Misalnya negara yang mendukung upaya papua merdeka, nah itu di lobby. Disitu caranya beliau untuk menahan jangan sampai terjadi disintegrasi bangsa. Dan itu nyatanya berhasilkan..”

Diplomasi yang dilakukan oleh Gus Dur saat menjadi Presiden menggunakan strategi manusiawi dengan menyentuk aspek-aspek manusiawi lewat pendekatan informal dan kebudayaan misalnya dengan melemparkan candaan-candaan kepada pemimpin negara lain untuk mencairkan suasana,

barulah setelah itu Gus Dur akan menyampaikan keuntungan apabila membantu Indonesia saat itu, bahkan untuk memahami negara yang akan dikunjungi Gus Dur meminta dibacakan fakta-fakta tentang negara yang akan dikunjungi sehingga nantinya ia akan menyesuaikan pendekatannya dengan budaya negara yang akan dituju, sehingga sebelum melakukan kunjungan ke suatu Negara, biasanya akan ada staf Gus Dur yang akan membacakan fakta-fakta terkait Negara yang akan dituju, hal tersebut diungkapkan oleh Arifin Junaidi (dalam wawancara 23 Agustus 2017).

“.. Ya Gus Dur anu aja strateginya manusiawi aja, kayak gini loh misalnya orang Arab Saudi sampe sekarang itu merasa terpesona dengan Gus Dur karena Gus Dur mampu membuat Raja mereka, Raja Fahd tertawa hingga keliatan giginya. Nah Gus Dur sentuh aspek-aspek segi –segi manusiawi seperti itu karena biasanya harus ya harus lalu kemudian gak punya temen kan. Gus Dur biasa saja, itu strategi utama menurut saya selain kemudian Gus Dur sampaikan juga keuntungan atau manfaatnya kalau misalnya mereka berbaik dengan Indonesia itu tentu berbeda-beda. Saya kalau menyertai Gus Dur ke luar negeri itu di pesawat itu saya membacakan bahan-bahan tentang Negara yang mau dikunjungi oleh Gus Dur dan Gus Dur kemudian dari situ Gus Dur menimbulkan bahwa saya harus begini-begini, jadi bahan-bahan Negara yang mau dikunjungi ini saya bacakan, pendekatannya disesuaikan Negara yang akan dikunjunginya..”

Kunjungan kenegaraan ke luar negeri berlangsung dalam suasana informal dengan adanya *jokes-jokes* yang Gus Dur berikan kepada lawan bicaranya. Gus Dur memiliki gaya diplomasi yang “canggih”, hal ini diungkapkan oleh Rizal Ramli, Rizal Ramli berpendapat gaya diplomasi Gus Dur “canggih” karena Gus Dur selalu membuka pertemuan dengan suasana yang cair, pendekatan informal tersebut menurut Rizal Ramli efektif untuk membuka diskusi ke hal yang lebih dalam/penting. Hal tersebut diungkapkan Rizal Ramli (dalam wawancara 16 Agustus 2017).

“..Dia sangat canggih, dalam pengertian pada level tingkat tinggi gitu. Yang terpenting suasana jadi encer, begitu suasana jadi encer apapun bisa diomongin. Ada orang yang pendekatannya tipenya formal seperti SBY, nah begitu formal maka responnya pun formal. Tapi Gus dur bisa bikin suasa jadi encer, pada ketawa-ketawa dengan begitu dia bisa ngomongin apa aja. Misalnya sama Clinton di white house tuh clinton sampai ngakak-ngakak. Ngobrol sama Castro ketemu siapa. Itu kelebihan Gus dur yang luar biasa. Begitu pendekatan formal maka responnya formal, jadi diskusi itu pembahasannya bener-bener gapernah polos gapernah dalem..”

Kemampuan diplomasi Gus Dur tersebut berdampak pada eratnya hubungan Gus Dur secara pribadi dengan para pemimpin dunia, misalnya saja dari pengalaman Wahyu Muryadi saat berkunjung ke Australia, Kunjungan ke Australia pada saat itu sempat terhambat karena adanya kerusakan pesawat yang mengharuskan Presiden beserta rombongan menunggu yang membuat jadwal kunjungan menjadi molor, namun berkat kepiawaian diplomasi Gus Dur dengan menjalin hubungan baik dengan Perdana Menteri Australia pada saat itu, pemerintah Australia mengirimkan pesawat untuk mengangkut Presiden dengan rombongan tanpa perlu menunggu pesawat dari Indonesia datang. Kemampuan Gus Dur untuk membangun suasana yang lebih akrab lewat pendekatan informal tersebut membuat kunjungan kenegaraan menjadi lebih produktif, cerita lain tentang Raja Arab Saudi waktu itu, Raja Fahd yang dibuat tertawa oleh Gus Dur karena *guyonan* yang Gus Dur lemparkan, bahkan waktu itu banyak masyarakat Arab Saudi yang kagum dengan Gus Dur karena untuk pertama kalinya mereka dapat melihat gigi raja mereka di sebuah pertemuan publik. Hal tersebut diceritakan Priyo Sambdoho (dalam wawancara 15 Juli 2017).

“..jadi seperti contohnya raja Fahd raja arab itu kan sampe heboh dulu, rakyat Saudi Arabia dulu sampai bisa melihat giginya raja Fahd, karena beliau ketawa. Selama ini kan raja Fahd selalu diam. Itu ya karena *joke-joke* beliau itu, jadi seperti pas pertemuan bilateral biasanya kan presiden, raja didampingi menteri-menteri. Terus kan Gus Dur ngelucu

kemudian raja fahd sampai tertawa, terus raja Fahd nge-joke nya panjang-panjang ceritanya pake bahasa arab. Yang ketawa Cuma Gus Dur sama Alwi Shihab karena yang ngerti arab cuma itu. Nah, terus Gus Dur terjemahin dalam bahasa indonesia ke menteri-menteri nya ini, mereka ketawa 'hahahaha'. Terus raja Fahd nanya kok itu joke nya ceritanya panjang kok *anu* terjemahinnya pendek sekali, terus Gus Dur ngomong gini. 'iya yang mulya saya bilang raja fahd sedang melucu silahkan tertawa'. Itu sampai raja Fahd keliatan giginya..''

Selain itu kedekatan tersebut juga membuat terkadang pertemuan bilateral menjadi lebih panjang dari waktu yang telah ditentukan, misalnya saat bertemu Clinton, walaupun Gus Dur terlambat hadir ke *White House* karena melakukan kunjungan terlebih dahulu ke sebuah universitas, pertemuan yang dijadwalkan berlangsung selama 40 menit *molor* menjadi satu setengah jam, hal ini karena nyamannya Clinton berbincang dengan Gus Dur yang diselingi humor-humor segar yang membuat suasana menjadi lebih akrab. Salah satu pemimpin dunia yang dapat menimpali humor Gus Dur adalah John Howard, pemimpin Australia saat itu, hal tersebut diungkapkan oleh Inayah Wahid.

Dimata Internasional, Gus Dur merupakan salah satu tokoh yang diharapkan sebagai penggerak Negara-negara non-blok seperti pada masa Soekarno. Untuk menggalang kerjasama yang jauh lebih kuat, Gus Dur menawarkan banyak bentuk kerjasama, misalnya lewat kerjasama di bidang ekonomi dengan Negara-negara Amerika Latin seperti Venezuela, Gus Dur menawarkan kerjasama *bypass* perdagangan, karena selama ini Negara-negara tersebut membeli komoditi dari Indonesia melalui pasar-pasar Internasional di Amerika & Belanda, sehingga dengan kerjasama tersebut kedua belah pihak mendapatkan harga yang lebih murah. Hal tersebut diungkapkan oleh K.H. Yahya Staquf (dalam wawancara 21 Agustus 2017).

“..Nah yang saya lihat, pertama, persepsi Negara-negara yang dikunjungi oleh Gus Dur. Saya merasakan dalam kunjungan-kunjungan itu ada *mood* yang sangat kuat dari Negara-negara Timur Tengah dan Afrika untuk membangkitkan semangat kerjasama seperti di jaman Soekarno yang waktu Asia Afrika, Gerakan Non-blok. Sehingga Gus Dur dieluh-eluhkan sebagai harapan untuk munculnya inisiatif-inisiatif internasional yang menggalang dunia ketiga itu sebagaimana yang dilakukan oleh Bung Karno. Bahkan sampai di Sudan itu diundang penyair yang membacakan puisinya di Konferensi Asia-Afrika Bandung. Kemudian Gus Dur sendiri memang mengajak Negara-negara itu untuk menggalang kerjasama lebih kuat. Ditawarkan. kerjasama-kerjasama konkret dalam bidang ekonomi. Mereka menyambut dengan antusias. Kemudian Gus Dur membuat inisiatif menawarkan gagasan tentang *Islamic Financial Center* di Asia Tenggara pada waktu itu. Maunya dibuka di Brunei, Sultan Brunei sudah setuju sehingga kemudian saya nggak tahu apakah terealisasi atau tidak. Tapi setahu saya itu sudah sampai kesepakatan-kesepakatan yang kuat. Nah makanya ada informasi *Brunei Game* itu karena Sultan Brunei ingin memberikan hadiah uang sebagai tanda terima kasih karena Gus Dur berhasil mengajak Negara-negara Islam membangun *Islamic Financial Center* tapi karena Gus Dur presiden, nggak bisa terima, kalau mau sumbangkan ke Aceh. Jadi itu hadiah yang semula buat Gus Dur dihibahkan. Gus Dur, menunjuk orang saya lupa namanya, ya lewat ini aja bantuan ke Aceh. Nah termausk juga yang saya tahu di Negara-negara Amerika Latin, Venezuela, Brazil dan lainnya itu Gus Dur berusaha meningkatkan kerjasama ekonomi dengan melakukan *bypass* jalur perdagangan. Kalau selama ini banyak komoditi yang diperdagangkan dari dan ke Indonesia dengan Negara-negara Amerika Latin melalui pasar-pasar internasional di Amerika dan Belanda. Nah Gus Dur mengajak untuk transaksi langsung antara Indonesia dengan Negara-negara Amerika Latin, kedelai dengan Brazil, rempah-rempah Venezuela. Sehingga bisa memperoleh komoditi murah bagi Negara Amerika, untuk Indonesia dapat harga murah tanpa melalui perantara..”

Contoh lain adalah dibentuknya *Islamic Financial Center*, lembaga tersebut merupakan usulan Gus Dur, bahkan Gus Dur mengajukan diri untuk menjadi penengah dalam konflik Irak & Iran pada waktu itu saat melakukan kunjungan ke Iran. Hal tersebut tentu mendapatkan nilai tambah Gus Dur dimata Internasional. Hal tersebut diceritakan K.H. Yahya Staquf (dalam wawancara 21 Agustus 2017)

“.. Misal waktu bertemu dengan presiden Iran, Gus Dur menawarkan, waktu itu ada ketegangan Irak-Iran. Gus Dur bilang, saya pernah tinggal di Irak, saya kenal baik dengan banyak orang di Irak. Kalau Iran membutuhkan saya untuk mengkomunikasikan sesuatu pada Irak, saya siap..”

4.10. Cara Menghadapi Konflik Ala Gus Dur

Gus Dur terpilih menjadi Presiden ketika semakin gencarnya gerakan-gerakan separatis muncul di Indonesia, sehingga tugas Gus Dur salah satunya adalah menjaga keutuhan NKRI. Dalam melawan gerakan separatist, Gus Dur mengedepankan aspek budaya dan kemanusiaan, misalnya dalam menghadapi OPM, Gus Dur mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua disesuaikan dengan budaya Papua, Gus Dur juga mengizinkan pengibaran bendera OPM sebagai identitas masyarakat Papua dengan syarat berada dibawah bendera Merah Putih, sedangkan dari sisi humanisnya adalah Gus Dur memperhatikan wilayah-wilayah konflik dengan memberikan banyak bantuan sebagai wujud perhatian pemerintah, hal ini dirasa sangat efektif untuk meredam gerakan-gerakan separatis. Hal tersebut diungkapkan oleh K.H. Arifin Junaidi (dalam wawancara 23 Agustus 2017).

“..Ya seperti kita ketahui pendekatan Gus Dur ke Papua dengan kemudian merubah nama Irian Jaya menjadi Papua, itu itu untuk meredam keinginan Papua untuk merdeka, nah kemudian Gus Dur membolehkan ya bukan menginstruksikan atau mengharuskan, membolehkan bendera bintang kejora itu dikibarkan Gus Dur menyamakannya dengan bendera NU bendera apa, kan boleh saja dikibarkan bersama merah putih, nah yang dibolehkan oleh Gus Dur itu bendera OPM dikibarkan bersama bendera merah putih gituloh, ini apa bedanya dengan bendera NU, bendera Muhammadiyah dan bendera lainnya, jadi disitu tapi ini dijadikan e.. peluru oleh seolah-olah Gus Dur memberi peluang Papua merdeka, padahal justru untuk meredam jadi dengan demikian mereka merasa, sampai sekarang orang Papua menganggap Gus Dur itu ya idola mereka, sampe sekarang. Saya kemarin baru dari Papua juga orang-orang Papua tahu bahwa saya dulu sekretarisnya Gus Dur gitu wah saya dapat penghormatan yang luar biasa. Nah di Aceh juga seperti itu sama, karena itu saya sampaikan Gus Dur mau membantu rakyat Aceh, kemudian Gus Dur mendapat bantuan dari Sultan Brunei ya kemudian itu menjerat Gus Dur ketika itu disampaikan kepada pansusnya Bulog..”

Papua menjadi perhatian Gus Dur selama menjabat sebagai Presiden. Hal yang dilakukan oleh Gus Dur adalah dengan mengajak orang Papua ke Jakarta dan mendengar kebutuhan mereka, hal ini dikarenakan selama ini masalah antara pusat dan daerah adalah adanya kekurangan cocokkan antara apa yang diberikan oleh pemerintah dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah. Hal tersebut diceritakan oleh Inayah Wahid, anak bungsu Gus Dur (dalam wawancara 13 Agustus 2017).

“.. termasuk soal Papua, kenapa sih Gus Dur sangat dicintai di Papua. Karena baru Gus Dur lah yang ngajak orang Papua ke Jakarta buat ngomongin soal itu. Nah ini salah satu *problem* pusat sama daerah. Pusat hobi banget buat kebijakan buat daerah-daerah tapi tanpa tahu yang dibutuhin di daerah itu apa. Sampai sekarang mungkin kita masih sering dengerin. Aduh masih banyak deh temen-temen saya kalau ke Jakarta butuhnya apa dikasinya apa. Karena dihitungnya standarnya pake standart pusat. Yang dilakukan Gus Dur mereka yang dipanggil karena mereka yang tahu lah kebutuhan mereka apa..”

Setelah terpilih menjadi Presiden, Gus Dur mengedepankan komunikasi dengan melakukan pendekatan budaya dan dilakukan lewat cara tidak formal. Contohnya adalah saat bertemu masyarakat Papua yang menuntut Papua merdeka. Pertama Gus Dur mendengarkan keinginan orang Papua yang ingin identitas mereka dikembalikan lewat pengibaran bendera bintang kejora sebagai identitas kultural. Terdapat perbedaan cara pandang terkait hal tersebut, bagi orang yang kontra, hal tersebut merupakan bentuk pemberontakan dan menaikkan derajat perlawanan agar Papua Merdeka, namun di sisi lain hal tersebut berhasil untuk membuat orang Papua mau mengibarkan bendera merah putih diatas bendera kejora. Hal ini merupakan pola komunikasi yang dilakukan lewat pendekatan

humanis dengan memahami kondisi emosional komunikan sesuai konteks dan kebatinan mereka.

“.. Misalnya contoh konkrit Gus Dur berkomunikasi dengan orang-orang Papua. Dalam mendekati mereka, Gus Dur tidak menggunakan komunikasi yang legal formalistik tapi betul-betul menggunakan komunikasi yang *cultural* dan yang tidak formal. Misal ketika orang Papua bilang bahwa bapak-bapak Papua harus merdeka, dia bilang jangan ngurus merdeka dulu lah tapi gimana menjadikan orang-orang Papua sejahtera. Yang kalian inginkan apasih. Kita ingin, Gus identitas orang Papua dikembalikan. Boleh tidak mengibarkan bendera bintang kejora. Ya tidak dipakai sebagai bendera politik tapi sebagai identitas kultural. Sehingga ketika pernyataan boleh mengibarkan ya boleh aja tapi jangan di atas bendera merah putih. Nah bagi orang-orang politik yang berpikiran formal, ia akan disalahkan bahwa Gus Dur orang yang berontak pada Negara. Kedua, Gus Dur mengizinkan bendera bintang kejora berkibar yang artinya menaikkan derajat perlawanan. Nah inikan perbedaan cara pandang. Pendekatan Gus Dur yang kultural akhirnya orang Papua terketuk hatinya. Tapi integritas kebangsaan jadi semakin utuh. Loh kok bendera bintang kejora boleh dinaikan Gus? Lah wong bendera PSSI aja boleh. Dan dengan pendekatan itu orang Papua mau mengibarkan merah putih. Nah ini pola komunikasi yang sangat humanis, sangat memahami lawan bicara, memahami kondisi emosional. Sesuai konteks dan kebatinan lawan..” (Dr. Ngatawi Al-Zastouw, dalam wawancara 26 Juli 2016).

Ciri kepemimpinan non-formal Gus Dur adalah pesan yang disampaikan dilakukan secara lugas dan sederhana, walaupun terkadang dalam menyampaikan pesannya, Gus Dur tidak menyaring yang membuat banyak orang tidak suka dengan cara penyampaian beliau. Dan yang ketiga pesan yang disampaikan oleh Gus Dur disampaikan dengan langgap budaya yang artinya dalam melakukan penyelesaian masalah, budaya setempat tidak ditinggalkan namun tetap digunakan. Contoh dalam penyelesaian masalah Papua dan Aceh menggunakan pendekatan langgap budaya. selain tiga prinsip tersebut, Gus Dur juga selalu mengedepankan nilai-nilai keagamaan dengan memadukan nilai-nilai lama dengan dinlai-nilai baru. Dalam menghadapi konflik gerakan separatis, Gus Dur menyadari bahwa ada aktor yang berperan dalam konflik tersebut yang memiliki

kepentingan, sehingga strategi Gus Dur adalah selain melalui negosiasi juga menyiasati. Gus Dur tidak melakukan tindakan represif dengan tidak mengadakan operasi militer di Aceh, Papua dan Maluku, Gus Dur menyelesaikan konflik lewat cara-cara politik, bukan cara-cara militer yang berujung pada kekerasan. Hal tersebut diutarakan oleh K.H. Yahya Staquf (dalam wawancara 21 Agustus 2017).

“.. Saya kira orang bisa lihat Gus Dur tidak melakukan represi sama sekali. Walaupun ada konflik di Maluku seperti itu ya Gus Dur tidak membuat operasi militer. Di Papua juga, Aceh, Kalimantan. Gus Dur menyelesaikannya secara politik. Dulu kan represi, militer. Itu saya kira beda..”

Di Maluku, Gus Dur melakukan koordinasi dengan rekan-rekannya yang memiliki pengaruh kultural di Maluku untuk menghentikan konflik, dengan mengedepankan aspek budaya dan religi, Gus Dur berhasil menghentikan konflik yang terjadi. Hal ini tentu tidak memerlukan cara-cara represif lewat operasi militer, sehingga keamanan dan ketentraman masyarakat dapat tetap terjaga. Hal tersebut diungkapkan oleh K.H. Yahya Staquf (dalam wawancara 21 Agustus 2017).

“.. Ya sebisa mungkin. Jelas. Saya tahu bahwa terkait dengan Maluku, Gus Dur bekerja dengan jaringan teman-teman yang punya pengaruh kultural di Maluku. Tapi seperti saya bilang tadi Gus Dur memainkan dimensi politik yang luar biasa sehingga kalau pemainnya pasti merasakan. Mereka bertekuk lutut dengan permainan politik yang dilakukan Gus Dur. Konfliknya berhenti artinya mereka kalah secara politik. Nah menurut saya itu jasa besar Gus Dur yang nggak tidak bisa ditandingi oleh pemimpin lain..”

Sementara itu Dalam menghadapi konflik organisasi yang terjadi dalam hal ini konflik dalam tubuh PKB, Gus Dur selalu mengedepankan musyawarah dan komunikasi dengan mengedepankan aturan dan mekanisme yang sesuai. Hal tersebut sesuai pendapat Ali Masykur Musa (dalam wawancara 24 Agustus 2017).

“..Ohiyaah pengambilan keputusan selalu dengan cara musyawarah yaa komunikasi, walopun Gus Dur dengan cara pribadi suka atau tidak suka pada orang itu kan wajar, tapi pengambilan keputusannya selalu dijalankan, seperti misalnya penggantian Sekjen, terus ketua umum Pak Muhaimin, itu dirapatkan dan diplenokan memang keputusannya perlu disetujui diganti walopun voting, yang dengan terpilihnya saya, gitu, artinya itu jalan kan, urusan puas tidak puas kan itu pribadi dan diluar mekanisme..”

Sehingga dalam menangani sebuah konflik separatis, Gus Dur melakukan pendekatan budaya dan kemanusiaan untuk mengatasinya, strategi ini dinilai ampuh dalam mengatasi keinginan gerakan-gerakan separatis yang menuntut kemerdekaan dan berpisah dari NKRI. Sementara dalam organisasi, baik itu PKB maupun PBNU, Gus Dur mengedepankan Musyawarah dalam menangani konflik internal organisasi.

4.11. *Jokes* Gus Dur

Gus Dur dikenal sebagai pemimpin yang gemar memberikan humor-humor diberbagai kesempatan, bahkan banyak sekali buku yang menulis kumpulan humor-humor Gus Dur. Humor menjadi salah satu strategi komunikasi yang Gus Dur jalankan dalam menghadapi berbagai situasi, baik itu situasi politik maupun situasi non-politik. Humor yang disampaikan oleh Gus Dur dinilai efektif untuk kultur Indonesia dan jauh lebih efektif dalam konteks internasional sehingga hubungan luar negeri Indonesia pada saat itu berlangsung dengan baik, baik itu dengan negara-negara Timur Tengah, Eropa maupun Amerika, cara Gus Dur tersebut membuat Gus Dur mudah diterima oleh semua pihak yang membuat Gus Dur dijuluki sebagai pejuang pergerakan anti kekerasan.

Jokes-jokes menjadi andalan Presiden Gus Dur untuk melakukan komunikasi dengan berbagai pihak agar komunikasi dapat berjalan dengan baik

dan lancar. Contohnya saat melakukan kunjungan ke luar negeri, Kunjungan kenegaraan ke luar negeri berlangsung dalam suasana informal dengan adanya *jokes-jokes* yang Gus Dur berikan kepada lawan bicaranya. Seperti yang disampaikan Inayah Wahid (dalam wawancara 13 Juli 2017).

“..Bapak kan selalu menyelipkan *jokes*. Kalau kepala negaranya yang dituju itu juga orangnya punya *sense of humor* yang tinggi, itu bisa langsung nangkep terus malah main lempar2an. Sudah kalau kayak gitu tuh enak tuh. Kita semua nyaman, ketawa-ketawa. Ya yang namanya ketawa-ketawa kan lebih enak daripada yang serius gitu. Tapi kalau misalnya kepala negara juga orangnya serius, nggak dapet udah. Begitu *jokes* dilempar ya udah nggak dapet..”

Gus Dur memiliki pengalaman tinggal di banyak tempat sehingga dapat memahami budaya berbagai negara, sehingga dalam melemparkan *jokes* Gus Dur selalu menyesuaikan dengan budaya lawan bicara. Karena setiap negara memiliki konteks humor yang berbeda, sehingga penyesuaian tersebut perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dari dilemparnya humor tersebut. Hal tersebut diutarakan oleh Inayah Wahid (dalam wawancara 13 Juli 2017).

“..Nah humor itu kan juga harus sesuai konteks kan. Kita juga harus punya latar belakang kayak humor Indonesia mungkin nggak lucu buat orang Jepang. Nah karena Bapak punya pengalaman tinggal di banyak negara jadi paham. Nah jadi kalau kita paham *culture* jadi semakin paham kita untuk *jokesnya* gimana. Kayak misal sama Kepala Negara Arab nah udah itu Bapak nyambung..”

Bukan hanya disesuaikan dengan budaya lawan bicara, tetapi lawakan-lawakan yang dilemparkan oleh Gus Dur juga selalu disesuaikan dengan konteks “siapa” lawan bicara Gus Dur, sehingga lawan bicara dapat menerima pesan yang disampaikan oleh Gus Dur lewat *jokes-jokes* tersebut, hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Priyo Sambodho (dalam wawancara 15 Juli 2017).

“..iya artinya begini, *jokes* itu kan harus sesuai konteks ya kan, kita ngomong sama militer misalnya tentunya *jokes* nya harus sesuai kan.

Nah, disitulah kecerdasan otaknya Gus Dur dia selalu punya *stock* pengetahuan bagaimana caranya istilahnya dalam komuniikasi *greeting the eyes*. Itu ga mudah loh itu..”

Humor-humor Gus Dur tersebut merupakan cara Gus Dur untuk mencairkan suasana saat melakukan kunjungan kenegaraan ke negara-negara sahabat, biasanya untuk memulai perbincangan, Gus Dur akan melemparkan *jokes-jokes* kepada lawan bicaranya, hal tersebut dilakukan dengan tujuan selain mencairkan suasana adalah untuk memudahkan diplomasi agar meningkatkan kerjasama antara kedua belah pihak. Humor Gus Dur efektif untuk membuka kebekuan agar diplomasi dapat berjalan dengan lancar dan suasana terbangun menjadi lebih akrab. Hal ini juga membuat diplomasi menjadi lebih produktif. Misalnya saja saat bertemu Raja Fahd dari Arab Saudi, Gus Dur melemparkan humor untuk mempermudah diplomasi, karena membuat Raja Fahd tertawa, hubungan bilateral kedua negara menjadi cair, tujuan diplomasi untuk meminta bantuan dapat tercapai dan publikasi Indonesia di mata masyarakat dunia dan masyarakat Arab Saudi pun menjadi baik, hal tersebut diceritakan oleh Wahyu Muryadi (dalam wawancara 03 Agustus 2017).

“..perbincangan-perbincangan sebelum membicarakan persoalan Gus Dur selalu melontarkan *jokes* yang baru, yang buat Raja Arab tertawa bahak-bahak. Itulah baru pertama kali dalam sejarah Raja Fahd, rakyatnya kaget lihat di koran, rajanya bisa tawa terbahak-bahak sampai giginya kelihatan. Itu karena *diceritani* macem-macem. Termasuk kesalahpahaman kyai di Indonesia. Jadi dia datang ke arab saudi. Tahu ceritanya? Itu kyai-kyai dari kampung, pesantren datang ke Saudi Arabia. Mereka itu kaget lihat rumah-rumah orang Saudi kok ada tulisannya *mam nu’ abdukhun*. Terus para kyai-kyai itu bilang, wah pantas Islam itu diturunkan disini, orang-orang Saudi orangnya bejat-bejat. Kenapa? Karena kyai-kyai itu belajar seperti kitab fiqih. *Mam Nu’ Abdukhun* itu bahasa pesantrennya dilarang bersetubuh. Wah gila, orang Arab berarti bersetubuh ya di lapangan sampai ke pager-pager rumah, halaman rumah. Ketawa lah itu. Padahl itu Bahasa Arabnya, *mam nu’ abdukhun*, dilarang masuk. Tapi kan itu mikirnya dalam konteks kitab itu begitu. Rajanya ketawa. Terus yang kedua saya salut, menaruh *respect* pada Anda, bisik-bisik itu, kalau dalam sejarah

Kerajaan Saudi hanya Raja Fahd lah yang istrinya cuman satu. Lainnya kan istrinya banyak. Hanya Anda, Yang Mulia beristri satu. Terus dibisikin, tapi pacarmu banyak. Ketawa lah itu. Nah itu tuh gitu-gitu cara mencairkan suasana, secara hubungan bilateral jadi enak, cair, masuk minta sumbangan kerjasama ya jadi mulus, untuk publikasi media sana jadi bagus, untuk Indonesia ya bagus..”.

Humor-humor yang disampaikan Gus Dur sangat cerdas karena disetiap humor yang disampaikannya terdapat makna dari realitas publik sehingga yang tadinya sulit menjadi mudah dicerna oleh masyarakat. *Jokes* bagi Gus Dur sebagai narasi atau pengantar untuk melontarkan sebuah gagasan. Ketika sebuah gagasan dibungkus dengan *jokes* maka pesan akan tersampaikan lewat bahasa yang mudah dimengerti. Misalnya terkait dengan judi, perbuatan judi merupakan tindakan yang tidak dibenarkan, Gus Dur memiliki *jokes* sendiri soal penjudi yang meditasi bertemu penampakan tapi kemudian informasi dari penampakan itu salah ternyata penunggu di meditasi itu adalah korban perjudian akhirnya ya dia bunuh diri lalu gentayangan, inti dari *jokes* tersebut adalah jangan berjudi tetapi dibungkus dengan penyampaian secara humor. *Jokes* merupakan instrumen Gus Dur untuk menyampaikan pendapat dan gagasannya. Hal tersebut seperti disampaikan oleh Adhie Massardi (dalam wawanacra 18 Agustus 2017).

“...*Jokes* ini kan sudah jadi kehidupan Beliau dan ini kan sebagai narasi atau pengantar atau ilustrasi untuk melontarkan gagasan. Ketika gagasan dibungkus *jokes* ini nggak kerasa tapi pesannya sampai. Jadi ya mekanisme untuk membongkar pemikiran orang terus baru membahas gagasan itu. Misalnya judi itu nggak bener. Gus Dur punya *jokes* sendiri soal penjudi yang meditasi ketemu penampakan tapi kemudian informasi dari penampakan itu salah ternyata penunggu di meditasi itu adalah korban perjudian akhirnya ya dia bunuh diri terus gentayangan. Ya intinya kan jangan berjudi tapi lewat *jokes* gitu. Sama juga hal-hal politik juga pakai *jokes*. Kalau *lobbying* lebih soal ke komunikasi. Ya *jokes* itu instrumen Gus Dur lah menyampaikan pendapat dan gagasannya..”

Tidak hanya saat melakukan kunjungan ke luar negeri, saat menerima tamu kepresidenan di Istana Negara pun Gus Dur selalu melemparkan humor-

humor yang membuat banyak tamunya kebingungan. Gus Dur merubah cara pandang banyak orang saat bertemu Presiden, kesan formal dan serius hilang karena humor yang dilemparkan Gus Dur saat menerima tamu. Hal tersebut diceritakan Inayah Wahid (dalam wawancara 13 Juli 2017).

“..Iya jadi gini, Bapak itu kan orangnya sangat menyukai humor ya, suka cerita-cerita nah seringkali pada saat nerima tamu presiden ya dtg itu banyak orangba yang berpikir, oh bakal ketemu presiden nih, semuanya bakal serius banget, jadi saya harus bersikap formal gitu. Terus ternyata Bapaknya ngelawak mulu, terus mereka jadi bingung. Jadi awal-awal itu ya kita bisa lihat tuh tamu yang nggak kenal Bapak tuh terus tiba-tiba ketemu, antara muka pengen ketawa tapi takut..”

Humor-humor yang disampaikan oleh Gus Dur merupakan media agar pesan-pesan yang disampaikan mudah diterima oleh publik. Humor yang diberikan Gus Dur dalam komunikasinya merupakan sebuah cara agar pada yang disampaikan dapat mudah diterima oleh komunikan selain dapat mencairkan suasana formal yang terjalin dalam sebuah pertemuan. Humor-humor yang biasanya Gus Dur lemparkan dibaliknya terdapat pesan-pesan yang apabila disampaikan secara serius akan sulit dicerna oleh publik. Humor juga dinilai sebagai kritik terhadap diri agar tidak terlalu serius. Hal tersebut disampaikan oleh Alissa Wahid (dalam wawancara 25 Juli 2017).

“..Bagi Gus Dur humor bukan hanya *ice breaking* tapi menyampaikan pesan-pesan yang terlalu berat dicerna, misal humor tentang peran pemuka agama di depan pintu surga yang marah2 karena nggak dibukakan pintu surga. Kemudian ada orang mabuk eh cepet-cepet dibukain pintu, ya pemuka agama demo di depan pintu surga. Si Ridwan keluar, ya pemuka agama bilang kami ini wakil umat kok malah dibiarin antri sementara yang orang setengah mabuk duluan masuk. Terus malaikat menyaut, oh yang tadi itu, coba Anda-anda ini kalau ceramah umatnya pada ngapain? Sementara dia supir Kopaja yang membuat orang ngedekat sama Tuhan. Buat Gus Dur ya gitu menyampaikan sesuatu yang berat diterima lebih santai. Kedua, humor sebagai alat *self critic, don't take yourself seriously*. Itu pembelaan dari kita sendiri sebagai *big shoot*, merasa penting..”

4.12. Prinsip Kepemimpinan Gus Dur

Prinsip dasar dalam pemikiran politik Gus Dur ada 4 yaitu selalu mengedepankan demokrasi yang memiliki 4 tipologi yaitu kebebasan, persamaan, keadilan serta pengambilan keputusan secara musyawarah, lalu prinsip dasar selanjutnya adalah *civil society* sebagai penyeimbang atas rezim yang berkuasa yang ketiga adalah mengedepankan pluralisme dan toleransi dan terakhir adalah selalu mengedepankan humanisme. Keempat hal tersebut dapat dihubungkan dalam kaitan agama dengan negara, agama dengan politik, agama dengan sosial. Hal tersebut diutarakan Ali Masykur Musa (dalam wawancara 24 Agustus 2017).

“..Gus Dur itu semua prinsip demokra... *eeeh*. semua pemikiran-pemikiran politik Gus Dur itu sebetulnya hanya di empat arah, empat matra yah. Yang pertama selalu mengedepankan pada demokrasi, sejak dulu pikiran-pikiran Gus Dur selalu mengembangkan prinsip demokrasi.. menjadi basis dari *eeeh* hubungan antar manusia di negara demokratis, gitu... karna itu beliau mendirikan forum demokrasi dan sebagainya tuh wujud dari komitmen dengan bangsa. Nah demokrasi menurut beliau hanya tipologinya hanya empat, substansi dalam demokrasi tuh, satu kebebasan. dua persamaan, kesamaan itu Bahasa Arabnya al musawa, Em – U – Es – A – We - A. Musawa, kemudian perjuangannya itu adalah Al-Adalah, yahh... *eeeh* keadilan ya, dan cara pengambil keputusannya itu.. musyawarah.. itu prinsip Gus Dur, selalu bicara demokrasi tuh yang empat itu, yang pertama demokrasi, yang kedua *civil society*. karna itu Gus Dur selalu menjadi penyeimbang atas totalitarian rezim yang terlalu kuat ndak boleh. harus muncul kelompok yang disebut dengan NGO, *civil society* atau ormas-ormas harus kuat, untuk menjadi pengontrol negara. nah itu kan mengapa beliau, dengan Pak Harto selalu bertentangan, bukan pribadi pertentangannya tapi karna gaboleh *eeh the power can do not wrong* gitu, apa kekuatan tidak boleh disalahkan atau *the leader, the government, the king* itu gaboleh yah tidak bisa disalahkan, di buat... yang ketiga beliau selalu mengedepankan apa yang disebut dengan pluralisme, pluralisme, dan toleransi. itu pikiran besar Gus Dur, jadi tidak boleh terjadi kekerasan yaa... atas nama kelompok karna faktanya bangsa ini selalu mengedepankan pluralis yaitu dia slelau menyetir suratnya saya lupa, *inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja alnakum syu ubawwaqaba ila lita arafu* jadi memang faktanya Tuhan menciptakan manusia itu bersuku-suku berbangsa-bangsa bertabillah, dan itu untuk ta’arof... okei, itu yang ketiga, yang keempat selalu mengedepankan *humanisme*, karna kan ada perkataan beliau yang sangat terkenal dan orang tidak akan ditanya apa agamamu selain kamu berbuat baik, nah itu. Itu artinya agama itu humanis, kemanusiaan, prinsipnya semua agama khususnya Islam ya humanisme, jadi membangun humanisme

itu sangat penting menjadikan agar manusia.. sesama manusia itu bisa berhubungan dengan baik, itu pikiran Gus Dur yang empat itu, mau apa saja dihubungkan agama dan negara, agama dan politik, agama dan sosial, kepentingan ekonomi apa saja kalo diiii... tarik selalu bermuara pada empat arus pemikiran Gus Dur..”

Dalam memimpin baik itu organisasi maupun negara, Gus Dur menjadikan 4 prinsip tersebut sebagai dasar pemikiran sehingga gaya kepemimpinannya menjadi sangat nonformal. ciri kepemimpinan non-formal Gus Dur lainnya adalah pesan yang disampaikan dilakukan secara lugas dan sederhana, walaupun terkadang dalam menyampaikan pesannya, Gus Dur tidak menyaring yang membuat banyak orang tidak suka dengan cara penyampaian beliau. Dan yang ketiga pesan yang disampaikan oleh Gus Dur disampaikan dengan langgap budaya yang artinya dalam melakukan penyelesaian masalah, budaya setempat tidak ditinggalkan namun tetap digunakan. Dalam wawancara, AMM memberikan contoh penyelesaian masalah Papua dan Aceh menggunakan pendekatan langgap budaya. selain tiga prinsip tersebut, Gus Dur juga selalu mengedepankan nilai-nilai keagamaan dengan memadukan nilai-nilai lama dengan nilai-nilai baru. 4 hal monumental yang menjadi warisan pasca kepemimpinan Gus Dur yaitu Demokrasi, toleransi dengan menjaga kaum minoritas, berani untuk berekspresi dan terakhir adalah berhasil merubah istana yang angker menjadi istana yang terbuka untuk rakyat. Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh Ali Masykur Musa (dalam wawancara 24 Agustus 2017).

“..Cukup empat aja yah yang menjadi monumental eeee kepemimpinan Gus Dur,, eeh yaitu demokrasi, apapun demokrasi itu menjadi pilihan, yang kedua toleransi dan menjaga kaum minoritas, jadi bisa dicek dimana saja kaum minoritas dari segi etnik maupun budaya dan agama selalu merindukan Gus Dur itu siapa, yang ketiga warisan beliau itu berani untuk berekspresi. Orang mengatakan toleransi orang mengatakan berjuang kemanusiaan kan ya, tapi yang mau *action* untuk melakukan apa *action* untuk melakukan membela betul-betul tuh ya

Gus Dur, dan yang keempat warisan beliau itu adalah mendekonstruksi istana yang angker, dan itu diteruskan oleh Pak Jokowi..”

K.H. Arifin Junaidi (dalam wawancara 23 Agustus 2013) mengatakan Konsistensi dalam bertindak, komitmen pada satu hal, demokrasi dan kesederhanaan menjadi hal yang dipelajari oleh Arifin Junaidi selama mengenal Gus Dur. Konsistensi maksudnya adalah lurus dalam bertindak dan memegang teguh prinsip yang sudah lama dipegang oleh Gus Dur, begitu juga dengan demokrasi bagaimana Gus Dur memberikan kebebasan berpendapat kepada masyarakat.

“.. ya banyak sekali mengenai komitmen, mengenai konsistensi, mengenai apa namanya demokrasi mengenai kesederhanaan Gus Dur banyak sekali yang dapat saya pelajari. Saya apa namanya ya saya hanya 24 tahun menemani Gus Dur..”

Sosok Gus Dur yang percaya diri tanpa terlihat arogan membuat banyak kalangan kagum. Selain itu daya tahan fisiknya yang mampu bekerja tanpa mengenal lelah. Selain itu relasinya yang sangat luas bahkan sampai bersahabat dengan lintas agama dan lintas negara. Gus Dur juga memiliki ketegasan dan keberanian dalam mengambil sebuah keputusan, hal tersebut disampaikan oleh Wahyu Muryadi (dalam wawancara 03 Agustus 2017).

“..Sosok Gus Dur yang percaya diri tanpa terlihat arogan membuat banyak kalangan kagum. Selain itu daya tahan fisiknya yang mampu bekerja tanpa mengenal lelah. Selain itu relasinya yang sangat luas bahkan sampai bersahabat dengan lintas agama dan lintas negara. Gus Dur juga memiliki ketegasan dan keberanian dalam mengambil sebuah keputusan..”

Sementara itu Rizal Ramli (dalam wawancara 16 Agustus 2017) bercerita ada beberapa pelajaran yang ia petik dari sosok Gus Dur yang beliau kenal selama ini, pertama beliau merupakan sosok yang humanis, Gus Dur melihat manusia dengan kasih, kedua beliau merupakan sosok

yang demokratis hal tersebut dibuktikan dengan sosok Gus Dur yang selalu menerima orang tanpa memandang status sosial, ketiga Gus Dur merupakan sosok yang cerdas, Gus Dur memiliki kemampuan menguasai bahasa Arab, Inggris, Prancis dan Belanda. Rizal Ramli juga menilai sosok Gus Dur sebagai sosok yang supel dengan mudah mengajak bercanda semua orang, dalam memberikan perintah pun, Gus Dur hanya menyampaikan garis besarnya lewat misi-misi kepada menterinya, hal tersebut menurut Rizal Ramli memang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, untuk detailnya itu merupakan tugas menteri terkait.



BAB V

DISKUSI

5.1. Komunikasi Kepresidenan K.H. Abdurrahman Wahid

Komunikasi Politik merupakan salah satu bidang kajian dalam ilmu komunikasi. Dalam komunikasi politik, terdapat beberapa penelitian misalnya saja marketing politik, branding politik, opini publik menjelang pemilihan umum hingga agenda politik media massa, dari beberapa kajian populer tentang komunikasi politik terdapat salah satu bidang kajian lain yaitu Komunikasi Kepresidenan yang juga merupakan bagian dari Komunikasi Politik. Komunikasi kepresidenan berkembang pesat di Amerika Serikat terutama di era presiden JF Kennedy yang mulai melakukan konferensi pers dengan media massa di Amerika Serikat sebagai wujud keterbukaan pemerintah Amerika Serikat kepada publiknya.

Menurut Cohen (2014) dua pertanyaan besar yang selalu muncul dalam penelitian kajian komunikasi kepresidenan adalah (1). Faktor apa yang mempengaruhi gaya komunikasi kepresidenan?, (2). Seefektif apa komunikasi kepresidenan yang dilakukan?. Dalam komunikasi kepresidenan yang dijalankan oleh K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur selama rentang waktu 1999-2001, dua pertanyaan tersebut dapat dijawab bahwa gaya komunikasi kepresidenan Gus Dur yang terkesan informal dipengaruhi oleh latar belakangnya yang berasal dari keluarga besar pesantren dan organisasi kemasyarakatan Islam Nahdlatul Ulama

(NU), sementara untuk menjawab efektif atau tidak, berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan orang-orang terdekat Gus Dur mulai dari keluarga hingga staf pribadinya mereka menjawab bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Gus Dur selama menjabat sebagai Presiden efektif dan berhasil membangun suasana yang harmonis baik di lingkungan Istana maupun di lingkungan masyarakat.

Dalam tesis Rendro Dhani dari Universitas Indonesia mengenai manajemen komunikasi kepresiden Gus Dur, terdapat beberapa temuan yang berbeda dengan temuan yang didapatkan peneliti dalam proses wawancara. Pertama terkait hubungan Gus Dur dengan awak media, menurut Dhani, hubungan Gus Dur dengan media menjadi renggang karena Gus Dur sering melontarkan ucapan-ucapan kontroversial yang menyinggung wartawan, seperti ucapan Gus Dur yang merasa kata-katanya sering diplintir dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, namun dalam temuan peneliti, Gus Dur membuka akses seluas-luasnya kepada wartawan untuk melakukan peliputan di Istana, Gus Dur melonggarkan aturan pendaftaran peliputan bagi wartawan Istana yang membuat melonjaknya jumlah wartawan di Istana, selain itu Gus Dur juga merupakan presiden pertama yang di *doorstop* oleh awak media, bahkan menurut Alissa Wahid, banyak wartawan yang meminta maaf kepada Gus Dur karena merasa berkontribusi terhadap turunnya Gus Dur, hal tersebut diutarakan oleh Alissa (dalam wawancara 25 Juli 2017)

“,,Kalau kepada wartawan sih tetep baik-baik aja. Makanya waktu Beliau keluar dari Istana kan banyak sekali wartawan yang nangis karena mereka ngerasa bahwa ikut bersalah, ikut menyumbang, berkontribusi, jadi pada minta maaf. Tapi ya setelah itu biasa aja.,”

Bahkan ketika ada masyarakat yang bertanya terkait seringnya media massa yang sering melontarkan kritik-kritik tajam kepada Gus Dur, menurut Gus Dur media massa adalah pilar penting dalam demokrasi, ketika ada yang bertanya mengapa Gus Dur diam saja melihat media massa “menggebuk” Gus Dur pada saat krisis pemerintahannya, Gus Dur menjawab bahwa apabila “menggebuk” media massa maka 3 pilar lain dalam demokrasi yaitu Yudikatif, Eksekutif dan legilsatif akan runtuh dan demokrasi juga akan runtuh. Bahkan setiap minggu ada saja pemimpin redaksi yang diajak sarapan bersama untuk membicarakan banyak hal mulai dari isu-isu yang sedang menjadi *trending topic* sampai dengan rencana-rencana program kerja pemerintahan Gus Dur kedepan. Sarapan tersebut dilakukan secara santai dan informal, bahkan saat masa krisis pemerintahan Gus Dur pun hubungannya tetap berlangsung dengan baik, hal tersebut membuktikan bagaimana eratnya hubungan Gus Dur dengan awak media meskipun suasana diluar istana pada saat itu sangat tidak kondusif. Sehingga pernyataan dalam penelitian Dhani bahwa hubungan Gus Dur dengan media tidak harmonis di akhir jabatan Gus Dur dapat terjawab dengan pernyataan K.H. Arifin Junaidi bahwa para wartawan sampai akhir jabatan Gus Dur masih diundang sarapan bersama, pernyataan Alissa Wahid juga menguatkan hubungan harmonis Gus Dur dengan media yang terus terjalin sampai akhir jabatan bahwa banyak wartawan yang menangiis turunya Gus Dur dari jabatannya sebagai Presiden.

Hubungan pemerintahan Gus Dur dengan awak media juga terjalin dengan harmonis karena peran dari para stafnya dalam hal ini kepala biro protocol, Wahyu Muryadi dan juru bicara kepresidenan Gus Dur, Wimar Witoelar

dan Adhie Massardi. Ketiganya memiliki latar belakang sebagai seorang wartawan sehingga mudah bagi mereka untuk membangun hubungan harmonis dengan para awak media. Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada Wahyu Muryadi dan Adhie Massardi, mereka menyatakan bahwa hubungan mereka dengan awak media terus berjalan dengan baik. Wahyu Muryadi mengatakan bahwa salah satu latar belakang Gus Dur mengajaknya untuk menjadi kepala biro protokol adalah untuk mengayomi awak media di Istana. Sementara itu Adhie Massardi mengatakan bahwa ia membuka akses yang luas kepada wartawan, seperti kutipan berikut ini (dalam Wawancara 18 Agustus 2017).

“..komunikasi saya dengan media wartawan itu 24 jam. Jadi kapan saja mereka minta informasi ya saya layani. Sementara yang lain karena berbagai pertimbangan tidak banyak komunikasi dengan wartawan. Jadi kalau lihat di *library* itu yang banyak bicara ya saya karena menyediakan waktu lebih. Jadi hubungan saya baik dengan wartawan..”

Namun dalam penelitian Dhani juga terdapat beberapa aspek yang sama dengan temuan peneliti dalam proses wawancara peneliti dengan 15 informan, misalnya saja kemampuan Gus Dur membangun hubungan yang baik dengan internasional lewat lawatan-lawatannya ke berbagai negara, Alwi Shihab sebagai Menteri Luar Negeri pada saat itu mengatakan bahwa tujuan Gus Dur melakukan kunjungan-kunjungan tersebut adalah untuk membangun keakraban secara personal dengan para pemimpin negara di dunia sehingga hal-hal diplomatic dapat berjalan lebih lancar. Selain itu Gus Dur juga dinilai Dhani sebagai sosok yang pandai melakukan negosiasi, hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Gus Dur meredam gerakan separatisme di Papua dengan melakukan negosiasi lewat pendekatan kebudayaan.

Penelitian lain dilakukan oleh Novieta Hardeani Sari dalam bentuk tesis dari Universitas Indonesia mengenai juru bicara kepresidenan Gus Dur, dalam tesisnya tersebut, Sari menyatakan bahwa Terdapat kesamaan dalam proses penyeleksian menjadi juru bicara kepresidenan antara presiden Amerika dan Gus Dur. Titik kesamaan yaitu pemilihan juru bicara berdasarkan asas kedekatan dengan Presiden dalam keseharian rutin ataupun dalam lingkungan sosial. Namun perbedaannya, pada zaman Gus Dur faktor kedekatan lebih difokuskan berdasarkan hubungan pribadi yang memiliki kedekatan emosional dari pada faktor pendidikan dan pengalaman kerja. Namun dalam penemuan peneliti lewat proses wawancara dengan anggota tim juru bicara Abdulrahman Wahid, Adhie Massardi menyatakan bahwa ia tidak pernah memiliki kontak langsung dengan Gus Dur sebelum penunjukkan dirinya sebagai juru bicara. Ia hanya sering menulis tentang Gus Dur dalam beberapa artikel di beberapa media cetak tentang Gus Dur, sehingga pernyataan Sari bahwa penunjukan juru bicara kepresidenan yang hanya berdasarkan kedekatan personal merupakan sesuatu yang keliru.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari kelemahan didalam Tim Media/ Juru Bicara Kepresidenan pada zaman pemerintahan Gus Dur, dikarenakan pengetahuan dan pengalaman kerja yang tidak sesuai dengan bidang yang akan dikerjakan (Tim media/ Juru bicara) menyebabkan manajemen komunikasi Tim Media/Juru Bicara Kepresidenan masih belum efektif dan efisien. Tetapi menurut peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan justru sebaliknya. Perbedaan latar belakang dan pendidikan yang dimiliki oleh Adhie Massardi, Wimar Witoelar dan Yahya Staquf justru saling

melengkapi satu dengan yang lainnya. Adimassardi fokus dengan masalah politik dalam negeri dengan latar belakangnya sebagai jurnalis yang fokus dalam masalah sosial dan politik dalam negeri, Wimar Witoelar yang fokus dengan masalah politik luar negeri dengan latar belakangnya sebagai jurnalis media-media asing dan Yahya Staquf yang fokus terhadap masalah sosial dan keagamaan yang latarbelakangnya merupakan seorang santri. Bahkan menurut Inayah Wahid Juru Bicara Presiden berjalan dengan efektif dalam menjelaskan dan meelaborasi setiap pernyataan Gus Dur bahkan Alisa Wahid mengapresiasi juru bicara yang berhasil menjadi intrepreter dari setiap pernyataan-pernyataan Gus Dur

Ketimpangan pengalaman antara Wimar Witoelar dan Yahya C Staquf yang dipilih karena kedekatannya dengan presiden menjadi faktor kendala dalam memutuskan langkah-langkah komunikasi yang strategis. Wimar Witoelar sebagai ketua tim tidak tegas dalam mengkoordinasi organisasi untuk membuat suatu kesepakatan. Menurut hasil peneliti yang dilakukan oleh peneliti memang tidak ada koordinasi tertulis tentang tugas pokok dan fungsi dari juru bicara kepresidenan tetapi, koordinasi yang dilakukan dalam tim juru bicara kepresidenan bersifat informal lewat saling berbagi informasi serta berdiskusi langsung dengan Gus Dur sebagai seorang Presiden. Bahkan menurut Wahyu Muryadi tidak ada pembagian tugas secara tertulis yang jelas membuat tim juru kepresidenan bertugas secara fleksibel.

Jimmy Carter menjadi salah satu presiden yang memiliki program komunikasi paling ambisius dari presiden-presiden Amerika lainnya, Carter mengatakan bahwa bagian dari komunikasi yang dijalankan oleh Presiden adalah

mendengarkan dan menanggapi masalah publik. Keaslian informasi serta adanya organisasi komunikasi dalam gedung putih juga merupakan hal penting yang Carter sampaikan mengenai operasi komunikasi kepresidenan. Gus Dur merupakan presiden pertama Indonesia yang menunjuk juru bicara kepresidenan, jika melihat penunjukkan juru bicara tersebut, bukan tidak mungkin jika Gus Dur merujuk pada sistem komunikasi kepresidenan di Amerika, melihat hasil penelitian Martha Joynt Kumar (2007) tentang komunikasi kepresidenan Jimmy Carter yang mengemukakan tiga hal penting dalam komunikasi kepresidenan yang dibangun Jimmy Carter yaitu Pertama, penting bagi Presiden untuk mendengarkan dan menanggapi kekhawatiran publik; komunikasi yang berfokus pada perhatian publik. Kedua, pengembangan jaringan berita kabel dan Internet; keaslian informasi sangat penting untuk operasi komunikasi Gedung Putih. Ketiga, presiden harus memiliki organisasi komunikasi untuk operasi pers harian mereka, Carter dinilai tidak hanya terbuka untuk berbicara di depan umum, tetapi juga dia terbuka untuk mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Tidak masalah apakah itu positif atau negatif, begitu pula dengan Gus Dur yang begitu terbuka dengan publik, meskipun seringkali sikap terbukanya itu menimbulkan kontroversial, selain itu Gus Dur juga mendengarkan pendapat banyak pihak sebelum mengambil sebuah keputusan, misalnya saja ia menerima perwakilan gerakan-gerakan separatis dan mendengarkan keinginan mereka.

Melakukan safari ke daerah-daerah ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia, sebelum istilah *blusukan* terkenal di Indonesia, di Amerika Serikat, Presiden Jimmy Carter sudah melakukan safari keliling negeri untuk berbicara

isu-isu yang menjadi perhatian publik, Gus Dur juga melakukan hal yang sama, bahkan tidak hanya keliling Indonesia, Gus Dur juga berkunjung ke berbagai negara untuk mengatasi krisis kepercayaan dunia terhadap Indonesia pasca krisis 1998. Yang berbeda antara pemerintahan Jimmy Carter dan Gus Dur adalah, Presiden Carter menjawab kekecewaannya terhadap pers dengan melakukan konferensi pers, sedangkan Gus Dur lebih melakukan pendekatan informal tanpa melalui konferensi pers resmi, selain itu Gus Dur juga menjawab pemberitaan di media massa dengan melakukan klarifikasi langsung pada masyarakat lewat forum setelah ibadah Jumat yang rutin ia lakukan, meskipun forum tersebut bertujuan untuk melakukan diskusi dengan masyarakat, namun tak jarang Gus Dur memberikan kritikan terbuka kepada pers dan mengklarifikasi pemberitaan yang ada mengenai pemerintahan Gus Dur.

Studi komunikasi kepresidenan berkembang pesat di Amerika Serikat, kebanyakan penelitian komunikasi kepresidenan fokus pada retorika presiden. Scacco, Coe & Hearit (2018) menyatakan bahwa perubahan yang mencolok dalam komunikasi kepresidenan memiliki potensi dramatis yang bersifat implikasi untuk fungsi demokrasi. Salah satunya adalah akuntabilitas, Buchanan (dalam Scacco, Coe & Hearit, 2018) bahwa media menjalankan dua pengaruh pada presiden, yakni memungkinkan membagi informasi dengan akuntabilitas lain dan mengecilkan perilaku yang dinilai salah dari para eksekutif. Akuntabilitas ini dapat diakses lewat pemberitaan mengenai kepresidenan lewat media, namun hal ini memiliki resiko dan keuntungannya tersendiri, bagi beberapa kasus jika media memiliki pov yang sama dengan presiden maka ia akan melindungi presiden

tersebut dan memberikan gambaran yang transparan. Sehingga pers kepresidenan berjalan dengan baik. Namun ketika media tidak setuju dengan pemikiran presiden, maka media dapat memberikan gambaran yang menyesatkan. Dalam komunikasi kepresidenan yang dilakukan oleh Gus Dur, ia menjalankan akuntabilitas dengan bersikap terbuka kepada pers, hal ini dibuktikan dengan seringnya Gus Dur mengundang pemimpin redaksi media-media massa, menjawab pertanyaan langsung wartawan (*doorstop*), serta membuka seluas-luasnya peluang media untuk melakukan wawancara, Wimar Witoelar, juru bicara kepresidenan Gus Dur mengatakan bahwa tidak hanya media nasional, media asing juga diberikan kesempatan untuk mewawancarai Gus Dur secara langsung, bahkan mengikuti kegiatan Gus Dur satu hari penuh.

Dalam jurnalnya, Scacco, Coe & Hearit (2018) memberikan contoh Donald Trump yang lebih memilih media sosial untuk memberikan pernyataan kepada masyarakat, pada masa pemerintahan Gus Dur, media sosial belum semasif saat ini, sehingga Gus Dur lebih memilih tatap muka langsung dengan masyarakat untuk menyampaikan pernyataan, misalnya lewat forum diskusi setelah ibadah shalat Jumat, namun hal tersebut bukan berarti Gus Dur jauh dengan media di masa-masa krisis pemerintahannya, dalam pernyataan informan-informan peneliti, hubungan Gus Dur dengan media tetap berjalan dengan baik hingga akhir jabatan Gus Dur, meskipun dalam beberapa kesempatan Gus Dur sempat menyinggung media karena merasa beberapa pernyataan *diplintir* oleh media.

Scacco, Coe & Hearit (2018) juga mengemukakan bahwa era saat ini di Amerika Serikat, presiden harus mencerminkan nilai pluralism dengan mengakui masyarakat dari kelompok yang berbeda. Dalam jurnalnya, mereka memberikan contoh bagaimana Ronald Reagan membuat sebuah pameran tentang pahlawan dalam kehidupan di Amerika Serikat, dalam pameran tersebut menggambarkan pluralisme di Amerika Serikat. Gus Dur, yang dikenal sebagai tokoh pluralis tidak mengadakan pameran serupa, namun menunjukkannya dengan kebijakan-kebijakan penting yang berkaitan dengan pluralis, misalnya menjadikan hari raya imlek sebagai hari libur nasional serta mengizinkan pertunjukkan barongsai serta meminta pencabutan TAP MPRS yang berkaitan dengan PKI. Etnis tionghoa dan mantan PKI merupakan dua kelompok yang dipinggirkan di masa pemerintahan sebelumnya, Gus Dur mengeluarkan dua kebijakan tersebut dengan tujuan mewujudkan pluralisme dan menghilangkan diskriminas.

Komunikasi internasional yang dijalankan oleh presiden memainkan peran sentral untuk menggerakkan arah kebijakan kepresidenan, Scacco, Coe & Hearit (2018) memberikan contoh George Bush yang memiliki hubungan kuat dengan dunia internasional, terutama untuk mendapatkan dukungan dunia pasca peristiwa 9/11. Dalam kaitan Gus Dur, ia melakukan perjalanan keliling dunia untuk mendapatkan kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia setelah peristiwa krisis 1998. Dalam masa pemerintahan Gus Dur, hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara sahabat berlangsung dengan harmonis, hal ini didukung oleh hubungan pribadi Gus Dur dengan kepala negara-negara sahabat yang berlangsung dengan sangat baik.

Eisenhower, Nixon, Reagan, dan Clinton memiliki orang-orang dan organisasi yang membantu presiden mereka mengkoordinasikan informasi di cabang eksekutif, mengembangkan pesan-pesan yang ditargetkan ditujukan pada publik yang diidentifikasi, dan kemudian memperkuat pesan-pesan tersebut, koordinasi tersebut dijalankan oleh kantor komunikasi kepresidenan. (Kumar, 2001). Dalam pemerintahan Gus Dur, hadirnya juru bicara memberikan gambaran bahwa Gus Dur ingin memberikan sebuah bentuk komunikasi kepresidenan yang baru di Indonesia. Mengembangkan dan memperkuat pesan pemerintah dalam masa kepresidenan Gus Dur dijalankan salah satunya oleh tim juru bicara yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Juru bicara kepresidenan pada pemerintahan Gus Dur diharuskan memahami pemikiran Gus Dur sehingga dapat menjawab pertanyaan publik sesuai dengan prinsip-prinsip Gus Dur.

Dalam konteks Asia Tenggara, Filipina menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki kantor komunikasi kepresidenan yang berdiri sebagai lembaga sendiri, di Indonesia khususnya dalam pemerintahan Gus Dur tim juru bicara bertanggung jawab langsung kepada presiden, kepala biro pers & media serta kepala biro protokoler terpisah dan berada dibawah Kementerian Sekretariat Negara, sedangkan di Filipina, tim juru bicara kepresidenan menjadi bagian dari grup komunikasi kepresidenan, namun tanggung jawab juru bicara sama seperti pemerintahan Gus Dur, bertanggung jawab langsung kepada presiden, selain itu juru bicara kepresidenan di Filipina juga tidak memiliki template spesifik dalam pemerintahan.

Dalam struktur Kantor Operasi Komunikasi Kepresidenan di Filipina, terdapat biro-biro asisten sekretaris yang berkaitan dengan komunikasi kepresidenan misalnya biro pelayanan komunikasi, biro percetakan nasional, biro radio malacanang, biro televisi malacanangm asisten sekretaris bidang akreditasi media dan relasi media, asisten sekretaris bidang *new media* dan hubungan eksternal serta asisten sekretaris bidang konten dan pesan publik. Biro serta asisten sekretaris yang berada dibawah komando kantor komunikasi kepresidenan Filipina memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan komunikasi presiden.

Hadirnya kantor khusus untuk bidang komunikasi kepresidenan merupakan salah satu wujud akuntabilitas institusi kepresidenan kepada publik untuk mendekatkan diri dengan publik, selain itu hal-hal yang bersifat pribadi seperti keluarga di era saat ini sudah menjadi konsumsi publik, berbeda dengan era sebelumnya saat kehidupan pribadi presiden dapat diatasi secara diam-diam sehingga dibutuhkan strategi komunikasi khusus untuk menghadapi berkembangnya isu-isu tersebut.

5.2. Nilai-nilai Nahdlatul Ulama dalam Komunikasi Kepresidenan K.H.

Abdurrahman Wahid

Kajian *non-western* merupakan kajian yang muncul untuk mengkaji berbagai peristiwa komunikasi yang tidak dapat dikaji oleh kajian *western*. Dalam komunikasi kepresidenan yang dilakukan oleh Gus Dur, banyak praktik komunikasi yang mengandung unsur perspektif *non-western*, hal ini karena latar belakang Gus Dur yang berasal dari kalangan pesantren, sehingga dalam memimpin Indonesia, Gus Dur menggunakan gaya pesantren dalam

berkomunikasi. Dimata keluarga, Gus Dur merupakan sosok yang egaliter atau terbuka, Gus Dur membebaskan anak-anaknya untuk bertindak asal tetap bertanggung jawab misalnya saja saat Inayah Wahid di ulang tahunnya mewarnai rambutnya dengan warna kuning, Gus Dur tidak menegur Inayah, Gus Dur hanya meminta Inayah siap dengan segala konsekuensi dari keputusannya tersebut

Kebiasaan Gus Dur sebagai keturunan pendiri Nahdlatul Ulama untuk bertatap muka dengan umatnya terbawa sampai saat Gus Dur menduduki posisi Presiden Indonesia, untuk melakukan tatap muka langsung dengan rakyat Gus Dur mengadakan *open house* di Istana Negara, kegiatan *open house* ini menjadi yang pertama di Indonesia dan tradisi ini terus berlanjut hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Open house* diselenggarakan selain untuk lebih mendekatkan diri kepada rakyat, *open house* di Istana juga untuk menghilangkan kesan anger dan sacral Istana, hal ini diungkapkan Pramono Anung (dalam Dyatmika dkk, 2009) bahwa pelajaran utama dari sosok Gus Dur adalah usahanya untuk melakukan desakralisasi istana. Bentuk desakralisasi Istana lain yang dilakukan Gus Dur misalnya dengan tidak membatasi jam datang tamu ke Istana dan tidak ada regulasi khusus terkait cara berpakaian, sehingga tidak mengherankan bila ada saja tamu di Istana yang hanya mengenakan celana pendek dan sandal jepit (Zaini, 2009).

Begitupula dengan cara Gus Dur dalam membangun komunikasi dengan masyarakat, dengan latar belakangnya yang berasal dari kalangan religius, Gus Dur pada waktu pemerintahannya, melakukan komunikasi tatap muka lewat sebuah forum setelah selesai ibadah Shalat Jumat, Pada masa Gus Dur, selain

keterbukaan informasi dibuka selebar-lebarnya, interaksi antara Presiden dengan rakyat juga dibuka seluas-luasnya, sesi tanya jawab yang dilakukan setelah Jumatan dilakukan secara terbuka dan tanpa batasan. Kegiatan tersebut pertama kali dilakukan di Masjid Baiturrahman di Istana Negara kemudian berpindah-pindah sesuai lokasi Gus Dur pada saat itu. Gus Dur juga biasanya mempersilahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya di sebuah rumah di Jalan Irian setelah jam kerja Presiden di Istana. Gus Dur beralasan bahwa di Istana ada beberapa prosedur protokoler yang harus dilalui apabila ingin bertemu Presiden, namun di rumah Irian tersebut, masyarakat bebas tanpa melalui protokoler Istana.

Latar belakang Gus Dur yang berasal dari keluarga pesantren membuatnya selalu dekat dengan ulama, sehingga tidak mengherankan apabila saat beliau menjabat sebagai Presiden banyak kyai yang berkunjung ke Istana, pada pemerintahan sebelumnya memang kalangan ulama dan kyai banyak juga yang datang ke istana, namun yang berbeda pada masa pemerintahan Gus Dur adalah, para kyai ini datang ke Istana menggunakan sarung tidak menggunakan pakaian formal seperti tamu pada umumnya. Hal ini pula yang membuat suasana Istana menjadi lebih santai dan jauh dari kesan kaku. Dalam lawatannya ke berbagai daerah pun, Gus Dur selalu menyempatkan diri hadir ke pesantren-pesantren untuk bertemu para kyai, sehingga terkadang paspampres cukup kewalahan pada waktu itu karena banyak agenda tak terduga yang sering Gus Dur lakukan. Priyo Sambodho bahkan mengatakan bahwa seringkali jadwal kunjungan Gus Dur ke daerah *molor* dari waktu yang sudah ditentukan karena Gus Dur sering

berkunjung ke pelosok-pelosok untuk mengunjungi (*sowan*) kyai-kyai sepuh atau untuk *nyekar* ke makam-makam leluhurnya, sehingga setelah dikunjungi Gus Dur biasanya makam-makam tersebut akan ramai dikunjungi oleh masyarakat.

Dalam kajian komunikasi presiden yang dilakukan oleh Peter Siavelis tahun 2016 mengenai penasihat informal dalam kabinet di negara multi partai dengan menggunakan studi kasus di Chile didapatkan bahwa presiden memiliki hubungan yang lebih dekat dengan para penasihat informalnya, hal ini karena para penasihat informal tersebut merupakan orang-orang terdekat presiden yang dipercaya penuh dapat menjadi pelindung presiden demi mewujudkan tujuan presiden, orang-orang terdekat presiden juga dinilai lebih mudah mengakses informasi dari presiden secara langsung. Dalam komunikasi kepresidenan yang dilakukan oleh Gus Dur, para kyai dan ulama menjadi salah satu penasihat informal untuk pemerintahan Gus Dur, hal ini tidak mengherankan, bahkan orang-orang terdekat Gus Dur menyatakan bahwa Gus Dur tidak pernah terlepas dari para ulama dan kyai. Seperti pernyataan Alwi Shihab berikut ini:

“saya kira kyai tidak pernah lepas dari kehidupan Gus Dur, dan selalu membuka istana untuk kyai dan terkadang nasehat pak kyai ada yang diterima ada juga yang dianggap belum waktunya, jadi hubungan beliau dengan kyai tidak pernah terputus, sampai setelah turun pun demikian.”

Dari pernyataan Alwi Shihab diatas menunjukkan bahwa Gus Dur selalu bertemu dengan para kyai, bahkan hubungan Gus Dur dengan para ulama tersebut

tidak hanya dalam konteks resmi kenegaraan saja, tetapi juga lewat kunjungan-kunjungan langsung ke pesantren disela-sela waktu kunjungan kerja, hal tersebut sebagai sebuah tradisi spiritual dari kalangan santri seperti pernyataan Wahyu Muryadi berikut ini:

“..Gus Dur selalu koleksi kyai-kyai antik, nyeleneh, eksentrik. Dia selalu punya, di sini kyai ini. Yang hidup yang mati, dia pasti tahu loh. Kyai-kyai keramat, nah itu pasti ada. Kalau ke daerah-daerah biasanya abis undangan resmi, malam-malam biasanya dia *blusukan* ke kuburan-kuburan untuk mendoakan almarhum, almarhumah. Ada semacam perasaan sambung spiritual lah. Nah itu hanya dia sendiri yang tau..”

Namun dalam temuan Siavelis, para penasihat informal tersebut disebutkan mendapatkan posisi yang paling dekat dengan presiden, sedangkan dalam temuan peneliti terkait komunikasi kepresidenan Gus Dur, para penasihat informal dalam hal ini para kyai dan ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama tidak mendapat posisi penting dalam konteks kenegaraan, para kyai dan ulama tersebut hanya diberikan kemudahan akses untuk berkunjung ke Istana bahkan tanpa adanya aturan protokoler pakaian seperti tamu-tamu lainnya.

Jurnal lain ditulis oleh John Tomas McGuire (2015) yang mengkaji tentang peran Anna Rosenberg dalam pemerintahan Franklin Delano Roosevelt, dalam penelitiannya, McGuire mengatakan bahwa Roosevelt tercatat menggunakan jaringan penyampaian formal dan informal dengan yurisdiksi yang tumpang tindih dan badan eksekutif yang baru dibentuk untuk memberinya informasi yang luas dan memungkinkannya untuk memegang otoritas pembuat keputusan akhir. Dalam jalannya pemerintahan Gus Dur, Kyai dan ulama tidak memiliki otoritas dalam membuat keputusan akhir, namun karena Gus Dur terlahir dari keluarga pesantren yang menghormati para kyai dan ulama membuat

masuk-masukan kyai dan ulama menjadi pertimbangan utama Gus Dur dalam mengambil sebuah keputusan.

Dalam temuan McGuire (2015), Anna Rosenberg menjadi salah satu penasihat penting Roosevelt selama masa perang. Dari musim semi tahun 1941 sampai kematian Roosevelt pada bulan April 1945, dia memahami beragam tugas untuk Gedung Putih, termasuk menyampaikan tuntutan dari masyarakat Afrika Amerika mengenai pembentukan badan baru yang mengatur persamaan ras di bidang penempatan kerja pertahanan. Walaupun nama Anna Rosenberg tidak diketahui oleh para ahli kepresidenan, tetapi sumber dari makalah pribadinya dan arsip kepresidenan menunjukkan pentingnya dirinya bagi kepresidenan Roosevelt antara musim semi tahun 1941 dan kematian Roosevelt pada bulan April 1945. Dia membantu memperlancar hubungan dengan para pemimpin Afrika Amerika. Jika kita melihat peran Anna Rosenberg dalam pemerintahan Roosevelt, peran tersebut juga dijalankan oleh orang-orang terdekat Gus Dur dari kalangan pesantren, Gus Dur bahkan secara terang-terangan dalam tayangan Kick Andy! Menyebutkan bahwa saran dari lima kyai sepuh tidak bisa ditolak olehnya, hal ini menandakan betapa besar peran kyai dan ulama sebagai seorang penasihat kepresidenan dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid, meskipun dalam pemerintahan Roosevelt, peran penasihat informal yang tidak masuk dalam struktur kenegaraan pemerintahan hanya dimiliki oleh satu orang, yaitu Anna Rosenberg sedangkan dalam pemerintahan Gus Dur dimiliki oleh kyai dan ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama.

Kebiasaan Gus Dur untuk terus menjalin silaturahmi dengan para kyai dan ulama yang terbawa hingga Gus Dur menjadi presiden merupakan salah satu contoh bagaimana karakter budaya pesantren mengakar dalam diri Gus Dur. Melakukan kunjungan kepada para kyai dan ulama disebut sowan. Ubudiyah (dalam Zuliansyah, 2015) menyebutkan bahwa sowan kyai adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh santri dengan melakukan kunjungan kepada kyai. Harapan dari kunjungan tersebut adalah untuk mendapatkan petunjuk atas sebuah permasalahan yang diajukannya, atau mengharapkan doa dari kyai atau sekedar bertatap muka untuk menjaga silaturahmi. Dibesarkan dari kalangan keluarga pesantren dan menempuh pendidikan di pesantren membuat Gus Dur sangat menghormati kyai, dalam budaya Jawa khususnya budaya di pesantren, seorang kyai memiliki posisi serta peran sentral yang dituakan oleh masyarakat sehingga pendapatnya selalu dihormati dan dipatuhi, tidak heran jika Gus Dur selalu mengundang para kyai ke Istana dan menyempatkan hadir ke pesantren-pesantren untuk menemui kyai-kyai kampung.

Kajian perspektif barat menitikberatkan pada hal-hal individualis, sedangkan dalam kajian non-barat menekankan pada kolektifitas, mengunjungi kyai atau ziarah ke makam leluhur merupakan salah satu peristiwa komunikasi yang tidak dapat dikaji dengan perspektif barat, karena perspektif barat dinilai mengesampingkan nilai, norma, dan budaya yang ada di masyarakat (Chu dalam Kaid, 2015, h.480). Komunikasi yang terus Gus Dur bangun dengan kalangan kyai dan ulama bila dilihat dari konteks budaya pesantren dan budaya Jawa merupakan salah satu bentuk penghormatan Gus Dur kepada para kyai yang lebih

tua dan memiliki ilmu yang lebih tinggi dari seorang Gus Dur, sehingga seringkali Gus Dur membuat keputusan berdasarkan pada saran dari kyai-kyai *sepuh* yang Gus Dur hormati, meskipun ada beberapa saran yang tidak Gus Dur ikuti namun tetap dengan cara yang sopan untuk menolak menjalankan saran tersebut, misalnya terkait mobilisasi massa dari Jawa Timur ke Jakarta untuk mempertahankan posisi Gus Dur sebagai presiden.

Melihat sikap Gus Dur yang menghormati para kyai dan ulama serta menjadikannya sebagai penasihat dalam pemerintahan Gus Dur maka akan terhubung dengan kebiasaan masyarakat Jawa yang menghormati pemuka agama. Bila dilihat dalam perspektif sejarah kerajaan Islam, ulama selalu menempati posisi penting dalam kerajaan, dalam masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma menempatkan ulama sebagai *Dewan Parampara* yang bertindak sebagai penasihat tinggi kerajaan, ulama pada masa pemerintahan Sultan Agung tidak hanya berperan sebagai penasihat agama melainkan juga sebagai penasihat di bidang politik dan militer (Darban, 2004).

Nilai-nilai dalam Nahdlatul Ulama (NU) yang menjadi pegangan hidup Gus Dur tercermin dalam prinsip kepemimpinan Gus Dur. Prinsip kepemimpinan tersebut Gus Dur implementasikan dalam komunikasi yang ia lakukan saat Gus Dur memimpin Indonesia selama 1999-2001. Menurut Ali Masykur Musa (dalam wawancara 24 Agustus 2017) terdapat empat prinsip kepemimpinan Gus Dur yaitu mengedepankan demokrasi, *civil society* sebagai penyeimbang rezim yang berkuasa, pluralisme dan toleransi serta humanisme. Dalam prinsip mengedepankan demokrasi Gus Dur memiliki empat tipologi, keempatnya adalah

kebebasan, persamaan, keadilan serta pengambilan keputusan secara musyawarah. Prinsip kepemimpinan Gus Dur tersebut bersumber pada ajaran Nahdlatul Ulama yaitu *Ahlus Sunnah Wal Jamaah* (Aswaja).

Pada tipologi mengedepankan demokrasi pertama yaitu kebebasan, Kebebasan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh suatu negara menurut pandangan Aswaja, kebebasan dalam pandangan Aswaja yaitu adanya sebuah jaminan untuk rakyat mendapatkan hak-hak mereka. Gus Dur implementasikan misalnya dalam sidang kabinet, siapapun bebas mengeluarkan pendapatnya selama tidak menyinggung SARA dan tetap sesuai dengan konteks pembicaraan dalam sidang kabinet. Hal tersebut seperti diungkapkan Rizal Ramli yang menyatakan bahwa Gus Dur merupakan sosok yang demokratis dan selalu menghargai perbedaan pendapat. Salah satu kebijakan Gus Dur yang dinilai oleh orang-orang terdekatnya sebagai upaya untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat menyuarakan pendapatnya adalah kebijakannya yang membubarkan Departemen Penerangan serta Badan Sensor, alasan Gus Dur pada saat itu karena Departemen Penerangan dinilai membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat lewat pembredelan surat-surat kabar yang dilakukan oleh rezim pemerintahan sebelumnya, sehingga dinilai Gus Dur hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam demokrasi. Sementara terkait pembubaran Badan Sensor menurut Inayah Wahid karena apabila informasi terus disensor masyarakat tidak akan pintar dan biarkan masyarakat yang melakukan pemilahan terhadap informasi yang mereka dapat, berikut kutipan lengkap Inayah Wahid terkait pembubaran Badan Sensor (dalam wawancara 13 Juli, 2017).

..”Termasuk misal Gus Dur membubarkan badan sensor. Itu kan orang nggak bisa melihat. Waktu itu Bapak cerita ke saya , kalau masyarakat itu di sensor informasinya, kapan mau pinter, nggak bisa dipaksakan oh ini aja yang mau dikasih. Nggak boleh kita gitu, nantinya masyarakat sendiri aja yang mau sensor..”

Gus Dur dikenal sebagai seorang pejuang kesetaraan dan hak azasi manusia, hal tersebut tidak pernah lepas dari diri Gus Dur. Kesetaraan derajat juga tertuang dalam ajaran Aswaja Nahdlatul Ulama, artinya bahwa semua warga negara haruslah mendapat perlakuan yang sama. Dalam konteks komunikasi kepresidenan, aspek yang dilihat tidak hanya dalam kaitan kebijakan dan kegiatan kenegaraan saja tetapi juga bagaimana seorang presiden membangun hubungan dengan para stafnya di lingkungan kepresidenan, sebagai seorang pejuang kesetaraan dan hak azasi manusia, Gus Dur berusaha untuk tidak memberi jarak dengan para stafnya di lingkungan Istana Negara, hal itu ia lakukan mulai dari hal-hal kecil misalnya saja menggunakan celana pendek untuk melakukan lari pagi, hal-hal kecil tersebut yang membuat suasana Istana menjadi cair dan membuat hubungan Gus Dur dengan staf-stafnya di Istana menjadi dekat, seperti yang diutarakan Inayah Wahid (dalam wawancara 13 Juli 2017) berikut ini:

“..Bapak kalau jalan-jalan pagi itu lama-lama ya pake celana pendek juga akhirnya. Dan itu jadi kayak kedekatan banget. Bapak itu kan pejuang kesetaraan, keadilan. Memperlakukan orang itu apapun jabatannya, sama semua sih disaat Bapak dilengserin itu tuh, orang yang di Istana, baik pengawal sampai juru masak tuh nangis gitu karena mereka paham betul apa yang dibawa Bapak, apa yang diperjuangkan dan mereka ngerasa deket banget gitu. Jadi Bapak itu bukan sosok yang menakutkan, tapi bener-bener orang yang deket sama mereka, dan itu buat mereka besar banget artinya..”

Karakter Gus Dur yang selalu menjunjung tinggi persamaan menurut Priyo Sambodho dikarenakan latar belakang Gus Dur yang berasal dari keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU), menurut Priyo Sambodho hubungan Gus Dur dengan staff di Istana berlangsung sangat cair hal ini dibuktikan dengan mudahnya akses bicara dengan Gus Dur oleh para staff di Istana, bahkan tak jarang banyak staf yang bercerita tentang kehidupannya kepada Gus Dur, Gus Dur pun menanggapi para stafnya dengan terbuka dan tidak membedakan mereka karena pangkatnya dalam lingkungan Istana, mulai dari juru masak hingga ajudan pernah bercengkrama dengan Gus Dur.

Dalam proses pengambilan keputusan, Gus Dur menggunakan pendekatan *non-western* berupa musyawarah untuk mufakat. Musyawarah merupakan salah satu nilai kearifan lokal Indonesia yang diserap oleh NU, prinsip musyawarah merupakan sebuah nilai esensial dalam organisasi Nahdlatul Ulama, musyawarah sendiri memiliki tujuan untuk mendapatkan kebenaran bukan mencari kekuatan. NU sendiri dalam sudah memutuskan bahwa Pancasila sebagai dasar ideologi organisasi Nahdlatul Ulama (NU), NU menegaskan bahwa Pancasila merupakan hasil akhir perjuangan umat Islam. Sebuah keputusan monumental yang meneguhkan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa. Dengan demikian NU memiliki kewajiban untuk mengamankan pengertian Pancasila serta mengimplementasikannya secara murni dan konsekuen oleh semua pihak (Nasayakin & Yani, 2016, salah satu nilai dalam Pancasila adalah musyawarah. Musyawarah Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang presiden, Gus Dur selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat sebelum mengambil sebuah

keputusan, Gus Dur selalu mendengarkan pendapat banyak pihak sebelum akhirnya mengeluarkan keputusan yang bersifat independen yang artinya tidak ada pengaruh dari pihak manapun, walaupun banyak pihak yang mengatakan bahwa Gus Dur dikelilingi oleh banyak pembisik, Priyo Sambodho selaku staf Gus Dur di Istana menyatakan bahwa tidak ada pembisik yang mempengaruhi keputusan Gus Dur bahkan sekalipun istrinya, Shinta Nuriyah Wahid.

Prinsip kepemimpinan pluralisme dan toleransi yang Gus Dur pegang teguh juga masih bersumber pada ajaran Aswaja Nahdlatul Ulama (NU), ajaran Aswaja memiliki sifat plural, toleran serta multicultural. Doktrin Aswaja yang terkait toleransi dan pluralisme adalah “bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu” serta “bagimu agamamu, bagiku agamaku”, sebuah doktrin yang kental dengan wawasan pluralistik. Aswaja sendiri memiliki tri ukwuwah, yaitu hubungan berdasarkan kesamaan agama, hubungan kesamaan bangsa, serta hubungan sesama manusia. Tujuan dari ajaran tri ukwuwah tersebut adalah untuk mewujudkan kerukunan yang berdasarkan saling menghargai serta saling menghormati (Fahmi, 2013).

Gus Dur dikenal sebagai seorang tokoh pluralisme, dalam masa pemerintahannya, masyarakat tionghoa mulai mendapatkan pengakuan dimulai dengan ditetapkannya hari raya imlek sebagai hari libur nasional. Selain itu Gus Dur juga aktif membangun forum demokrasi yang didirikan dengan tujuan untuk selalu mengedepankan konstitusi yang berpegang teguh pada prinsip Pancasila tanpa mengenal batasan suku, identitas, yang terpenting adalah kemanusiaan. Hubungan Gus Dur dengan kelompok agama diluar Islam juga sangat cair karena

Gus Dur dalam memimpin memiliki bersifat mengayomi, melindungi dan selalu berpendapat bahwa agama merupakan rahmat bagi semua umat manusia. Gus Dur juga

Prinsip kepemimpinan yang Gus Dur pegang terakhir adalah humanisme. Dalam ajaran Aswaja Nahdlatul Ulama, hakikat utamanya adalah memanusiakan manusia (Fahmi, 2013). Menurut Arif (2013) prinsip dasar dalam humanisme Gus Dur adalah perlindungan atas hak dasar manusia serta mengembangkan masyarakat yang berkeadilan. Hal ini Gus Dur wujudkan misalnya dalam penanganan gerakan separatis di Papua, Gus Dur melihat sisi kemanusiaan dengan memahami kondisi emosional komunikan sesuai konteks dan kebatinan mereka, Gus Dur memberikan izin pengibaran bendera bintang kejora di Papua dengan syarat bendera bintang kejora dikibarkan dibawah bendera merah putih, karena menurut Gus Dur bendera bintang kejora merupakan bendera budaya masyarakat papua yang sama dengan bendera milik NU dan Muhammadiyah, dengan menggunakan pendekatan kemanusiaan kebudayaan tersebut, Gus Dur berhasil meredam gerakan separatis di Papua, begitu juga dengan penanganan konflik di Aceh, Gus Dur menggunakan sisi kemanusiaan dengan meniadakan daerah operasi militer (DOM) di Aceh.

Prinsip-prinsip kepemimpinan Gus Dur yang telah peneliti jabarkan diatas bersumber pada ajaran *Ahlusunna Wal Jamaah* (Aswaja) yang menjadi pokok ajaran Nahdlatul Ulama, tempat Gus Dur dibesarkan. Dissanayake (2003) mengatakan bahwa salah satu hal yang dapat dikaji menggunakan perspektif *non-western* adalah perilaku sehari-hari masyarakat yang menjunjung tinggi budaya

adat istiadatnya. Dalam hal ini Gus Dur menjunjung tinggi nilai-nilai budaya istiadat NU yang bersumber dari ajaran Al-Quran yang dipadukan dengan budaya Indonesia.

Penanganan di wilayah-wilayah konflik baik di konflik separatist maupun konflik antar suku dan agama juga dilakukan Gus Dur dengan menggunakan pendekatan kebudayaan, yaitu dengan tidak menyingkirkan kebudayaan setempat sebagai sebuah solusi penyelesaian konflik. Gus Dur juga memadukan nilai-nilai lama dengan nilai-nilai baru dengan menyertakan nilai-nilai keagamaan sebagai prinsip penyelesaian konflik, misalnya konflik di Maluku, Gus Dur menggunakan pendekatan kultural lewat penonjolan aspek budaya dan religi dengan melakukan koordinasi dengan pemuka-pemuka agama dan tokoh masyarakat setempat, sehingga tidak perlu menggunakan tindakan oleh militer untuk mewujudkan keamanan dan ketenteraman di lingkungan masyarakat yang berkonflik.

Jika ditinjau dalam perspektif *non-western*, terdapat dua hal yang paling mempengaruhi gaya kepemimpinan Gus Dur yaitu budaya pesantren dan organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU), dua hal tersebut mempengaruhi cara berpikir Gus Dur tentang Islam, sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang berdampak pada caranya berkomunikasi dengan publik dan lawan politiknya serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Gus Dur saat menjabat sebagai Presiden. Karena dalam kajian non-barat khususnya Asia, sebuah peristiwa atau fenomena komunikasi berdasarkan pada kearifan dan kebudayaan setempat, dalam hal ini budaya pesantren sebagai tempat Gus Dur menempuh pendidikan dan budaya Nahdlatul Ulama tempat Gus Dur dibesarkan.

5.3. *Jokes* Sebagai Komunikasi Kepresidenan K.H. Abdurrahman Wahid

(Gus Dur)

Gus Dur merupakan tokoh yang dikenal memiliki selera humor tinggi, Gus Dur sering melemparkan humor-humornya dalam berbagai kesempatan, humor merupakan salah satu strategi Gus Dur agar pesan yang ia sampaikan dapat diterima dengan mudah oleh publik, hal tersebut sesuai dengan pendapat Graham, Papa dan Brooks (dalam Waisanen 2015) Humor politik merupakan strategi untuk menyampaikan pesan-pesan politik agar mudah dipahami oleh publik dan membuat komunikasi menjadi lebih interaktif. Dalam jurnal Don Waisanen (2015) disebutkan bahwa humor merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh presiden Amerika Serikat untuk mengatasi sebuah krisis, dalam temuannya, humor-humor yang disisipkan dalam pidato presiden Amerika saat *White House Correspondent Dinner* (WHDC) efektif untuk menjawab isu-isu serta kritikan terhadap pemerintah, dalam konteks komunikasi kepresidenan, humor yang disampaikan oleh Gus Dur tidak hanya untuk mengatasi krisis serta menjawab isu-isu yang menerpa pemerintahan Gus Dur saja, tetapi juga digunakan dalam diplomasi serta komunikasi politik yang Gus Dur lakukan.

Dalam konteks diplomasi, Gus Dur menggunakan humor untuk mencairkan suasana, humor merupakan salah satu strategi Gus Dur dengan pendekatan informal sebagai pembuka untuk kemudian Gus Dur akan menyampaikan pesan-pesan diplomatik Indonesia dengan negara-negara sahabat misalnya kerjasama dalam bidang ekonomi atau pendidikan. Pendekatan informal Gus Dur lewat pemberian humor-humor kepada para kepala negara sahabat

membuat kunjungan diplomatik menjadi lebih produktif. Seringnya Gus Dur melemparkan humor-humor dalam kunjungan diplomatik membuat hubungan Gus Dur dengan para kepala negara sahabat secara pribadi menjadi sangat baik, misalnya saja dengan Raja Fahd dari Arab Saudi, Bill Clinton dari Amerika Serikat dan John Howard dari Australia.

Menurut Nilsen (1990) seorang politisi dapat menggunakan humor untuk mendefinisikan konsep politik, melucuti kritik, membangun identitas, menetapkan posisi, meredakan ketegangan serta sebagai pengganti konfrontasi fisik atau militer yang sebenarnya, dalam konteks komunikasi kepresidenan Gus Dur, ia menggunakan humor untuk meredakan ketegangan, misalnya saja dalam sidang tahunan MPR tahun 2000, Gus Dur melemparkan guyon kepada seluruh peserta sidang majelis, hal ini ia lakukan untuk membangun suasana harmonis antara pemerintah dan parlemen di awal pemerintahannya. Nilsen juga menyebutkan fungsi-gungsi sosial dari humor politik, humor politik yang Gus Dur berikan menurut pandangan peneliti disesuaikan dengan kondisinya, misalnya saja humor terkait parlemen yang seperti taman kanak-kanak tergolong pada fungsi untuk mengkritik para kritikus dalam hal ini parlemen yang terus mengkritik pemerintahan Gus Dur, sementara itu dalam fungsi mengurangi ketegangan, humor politik yang Gus Dur berikan dalam konteks diplomasi termasuk dalam fungsi mengurangi ketegangan antar kedua kepala negara yang bertemu dalam sebuah pertemuan diplomatik. Penggunaan humor dalam diplomasi juga diutarakan oleh Perelman & Olbrechts-Tyteca (dalam Waisanen, 2015) bahwa humor dapat digunakan dalam konteks diplomasi.

Sementara itu jika merujuk pada pembagian jenis humor politik menurut Raskin (dalam Hammoud, 2014) humor yang Gus Dur berikan dalam konteks kepresidenan termasuk dalam humor *exposure* karena humor yang ia berikan merupakan pemaparan yang sifatnya situasi politik, misalnya saat konflik dengan parlemen, Gus Dur mengatakan bahwa parlemen seperti taman kanak-kanak. Dalam menyampaikan humor-humornya, Gus Dur akan menyesuaikan humornya dengan budaya lawan bicara ini, hal ini menjadi perhatian Gus Dur untuk mencapai tujuan dari dilemparkannya humor tersebut, karena menurut pemaparan Inayah, setiap negara memiliki konteks humor yang berbeda, sehingga Gus Dur akan selalu menyesuaikan dengan konteks budaya setempat dalam memberikan humornya, hal ini didukung pengetahuan Gus Dur yang luas serta pengalaman Gus Dur tinggal di berbagai negara, selain itu Gus Dur juga akan menyesuaikan humor dengan konteks pertemuan serta ‘siapa’ lawan bicaranya.

Humor dapat digunakan oleh aktor politik untuk mempengaruhi pemrosesan kognitif dan persuasi publik, publik cenderung lebih suka dan termotivasi untuk memproses humor sebagai sebuah pesan politik (Nabi, Moyer-Guse, dan Byrne, dalam Waisanen, 2015). Humor politik yang disampaikan oleh seorang presiden dapat memperluas batas diskursif untuk pribadi presiden, dengan menggunakan humor, seorang presiden dapat menggabungkan antara garis fakta dengan fiksi. Humor-humor yang disampaikan Gus Dur sangat cerdas karena disetiap humor yang disampaikannya terdapat makna dari realitas publik sehingga yang tadinya sulit menjadi mudah dicerna oleh masyarakat. *Jokes* bagi Gus Dur sebagai narasi atau pengantar untuk melontarkan sebuah gagasan. Ketika sebuah

gagasan dibungkus dengan *jokes* maka pesan akan tersampaikan lewat bahasa yang mudah dimengerti.

5.4. Temuan Menarik dalam Penelitian Komunikasi Kepresidenan K.H.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Dalam proses penelitian yang dilakukan lewat proses wawancara kepada 15 informan yang memiliki keterkaitan dengan Gus Dur dalam pemerintahan Gus Dur selama periode 1999-2001 banyak hal-hal menarik yang peneliti dapatkan dari para informan tersebut. Pertama adalah terkait dekrit presiden yang dikeluarkan Gus Dur yang dinilai menjadi penyebab diturunkannya Gus Dur dari posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2001 silam. Dekrit presiden yang berisi tentang pembubaran parlemen serta pembekuan Partai Golongan Karya tersebut menurut K.H. Arifin Junaidi merupakan usul dari para kyai dan ulama NU yang berkumpul di Batu Ceper hal ini menjadi menarik karena pendapat K.H. Arifin Junaidi tersebut dibantah oleh Menteri Luar Negeri pada saat itu, Alwi Shihab yang menyatakan bahwa usulan dekrit presiden berasal dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Dalam tayangan Kick Andy! Yang disiarkan oleh Metro TV, Gus Dur menyatakan bahwa sebenarnya masyarakat Jawa Timur siap membela Gus Dur agar Gus Dur tetap menjadi Presiden Indonesia pada saat itu, namun Gus Dur menolak dan meminta masyarakat Jawa Timur yang kebanyakan berasal dari kalangan NU tersebut untuk mengurungkan niatnya, menurut K.H. Arifin Junaidi, mobilisasi massa dari Jawa Timur ke Jakarta pada waktu itu merupakan usul para

kyai dan ulama yang berkumpul di Batu Ceper, namun usulan tersebut ditolak Gus Dur karena dinilai akan memicu pertumpahan darah.

Temuan menarik lainnya adalah terkait pemakzulan yang dilakukan oleh parlemen terhadap Gus Dur, Ali Masykur Musa menyatakan bahwa ada komunikasi antara Gus Dur dengan parlemen lewat wakil-wakil rakyat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, menurut Wimar Witoelar juga ada komunikasi antara Gus Dur dengan pimpinan parlemen lewat perantara beberapa orang salah satunya lewat juru bicara, namun Ketua DPR-RI pada waktu itu, Akbar Tandjung menyatakan bahwa tidak ada komunikasi sama sekali dengan Gus Dur pada saat krisis hubungan parlemen dengan institusi kepresidenan, terutama setelah keluarnya memorandum I & II, namun dalam kesempatan yang sama Akbar Tandjung juga memberikan apresiasi terhadap Gus Dur karena sempat hadir dalam rapat panitia khusus Bulog *Gate* di gedung MPR/DPR-RI. Menurut Akbar Tandjung, penyebab Gus Dur dimakzulkan adalah karena mengeluarkan dekrit presiden yang dinilai menyalahi konstitusi, namun menurut orang-orang terdekat Gus Dur, pemakzulan disebabkan tidak adanya kesepakatan antara Gus Dur dengan partai koalisi terkait komposisi menteri di kabinet. Hal ini menarik karena terjadi perbedaan pendapat antara pihak Gus Dur dengan pihak parlemen pada waktu itu yang diwakili oleh Akbar Tandjung.

Hal menarik lainnya adalah karakter Gus Dur yang dinilai Akbar Tanjung tidak pernah merubah sikap kemanusiannya secara pribadi antara Akbar Tanjung dan Gus Dur meskipun institusi yang mereka pimpin tidak memiliki hubungan yang harmonis. Terkait dengan hadirnya juru bicara dalam pemerintahan Gus

Dur, dalam wawancara peneliti dengan K.H. Yahya Cholil Staquf ditemukan bahwa hadirnya juru bicara kepresidenan merupakan permintaan dari parlemen dalam hal ini DPR-RI, pada waktu itu menurut Yahya Staquf, DPR meminta adanya tim juru bicara dalam pemerintahan Gus Dur karena pimpinan DPR menilai pernyataan Gus Dur pada saat itu banyak menimbulkan konotasi.

Temuan menarik lain adalah terkait kemampuan Gus Dur yang dinilai banyak kalangan diluar batas kemampuan manusia biasa. Alwi Shihab misalnya, ia mengatakan bahwa setahun sebelum Gus Dur menjadi Presiden, ia bertemu Gus Dur di Amerika Serikat, dalam pertemuan itu, Alwi Shihab diminta pulang ke Indonesia tahun depan untuk menjadi Menteri Luar Negeri, dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Australia setahun sebelum pemilihan presiden 1999, Gus Dur juga berkata kepada Menteri Luar Negeri Australia bahwa tahun depan Alwi Shihab akan menjadi *partner* Menteri Luar Negeri Australia dalam hubungan diplomatik Indonesia dan Australia. Dr. Zastrouw, orang dekat Gus Dur yang selalu menemani Gus Dur sebelum menjadi presiden juga mengatakan bahwa setahun sebelum Gus Dur terpilih, Gus Dur sempat bergurau kepadanya bahwa tahun depan Gus Dur akan menjadi presiden.

1.5. Limitasi Penelitian

Penelitian ini sudah dapat mengakses orang-orang terdekat Gus Dur serta mengungkap beberapa hal yang belum banyak diketahui publik seperti besarnya peran kyai dan ulama dalam pemerintahan Gus Dur termasuk dalam pengambilan keputusan keluarnya dekrit presiden, selain itu pembentukan tim juru bicara yang ternyata diinisiasi oleh MPR/DPR lewat Akbar Tandjung dan Amien Rais.

Penelitian ini secara umum sudah menjelaskan bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Gus Dur sebagai Presiden pada masa pemerintahannya, baik dengan kabinet, hubungan luar negeri, maupun hubungan dalam negeri misalnya dengan media dan masyarakat. Namun penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya:

1. Penelitian ini tidak dapat mengakses Marsilam Simanjuntak, Menteri Sekretaris Kabinet pada Kabinet Persatuan Nasional, Marsilam Simanjuntak menurut beberapa informan penelitian ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pemerintahan Gus Dur dan paling memahami kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Gus Dur.
2. Penelitian ini tidak menyertakan unsur militer dan Polri sehingga tidak dapat mengungkap secara langsung hubungan Gus Dur dengan Militer.
3. Penelitian ini hanya menyertakan satu unsur dari kalangan lawan politik Gus Dur pada saat itu yaitu Akbar Tandjung.
4. Terdapat beberapa informasi yang tidak dapat ditulis dalam penelitian ini atas permintaan informan.

BAB VI

SIMPULAN & SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya yang sudah penulis berikan, berikut adalah beberapa hal yang menjadi simpulan penelitian ini. pertama yaitu dapat disimpulkan bahwa komunikasi kepresidenan yang dijalankan oleh Gus Dur dipengaruhi oleh latar belakangnya yang berasal dari kalangan pesantren dan budaya organisasi di Nahdlatul Ulama. Dalam menjalankan proses komunikasi kepresidenan di masa pemerintahannya, banyak dipengaruhi oleh ajaran Ahlusunnah Wal Jamaah yang diimplementasikan dalam prinsip kepemimpinan Gus Dur yaitu mengedepankan demokrasi, civil society sebagai penyeimbang rezim yang berkuasa, pluralisme dan toleransi serta humanisme Selain itu kebiasaan Gus Dur yang menjadikan kyai dan ulama sebagai salah satu penasihat informal merupakan sebuah ciri khas yang menjadi karakter budaya di Indonesia, dalam sejarah kerajaan Mataram Islam, Sultan Agung menjadikan ulama sebagai penasihat tinggi kerajaan. Gus Dur menjadikan ulama memiliki peran sentral dalam pemerintahan Gus Dur. Dalam melakukan penanganan konflik separatist di berbagai daerah seperti Papua dan Aceh, Gus Dur mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan pendekatan kebudayaan, hal ini dinilai efektif untuk meredakan keinginan dua daerah tersebut untuk merdeka dari Indonesia.

Kajian komunikasi kepresidenan berkembang pesat di Amerika Serikat, kajian komunikasi kepresidenan sendiri lebih banyak fokus pada retorika presiden dan penggunaan new media sebagai media komunikasi presiden. Gus Dur tidak hanya menggunakan pendekatan non-barat pada komunikasi kepresidenannya, Gus Dur juga menggunakan pendekatan barat untuk mendukung proses komunikasinya saat menjadi presiden, salah satunya dengan menghadirkan juru bicara kepresidenan yang merupakan juru bicara pertama dalam institusi kepresidenan Indonesia. Juru bicara kepresidenan dinilai orang-orang terdekat Gus Dur efektif untuk membantu Gus Dur dalam mengkomunikasikan berbagai isu, dalam menjalankan tugas sebagai juru bicara, juru bicara kepresidenan diharuskan memahami pemikiran-pemikiran Gus Dur sehingga pernyataan juru bicara tidak bertentangan dengan pendapat Gus Dur. Media dinilai Gus Dur merupakan pilar penting dalam demokrasi, sehingga Gus Dur berupaya membangun hubungan baik dengan media dengan memberikan kelonggaran untuk izin peliputan di Istana dan mengundang pemimpin redaksi untuk sarapan bersama, selain itu Gus Dur juga presiden Indonesia pertama yang bisa di *doorstop* oleh wartawan.

Gus Dur dikenal sebagai seorang yang humoris, hal itu ia bawa dalam diplomasi yang ia lakukan saat ia menjabat sebagai Presiden. Humor-humor yang Gus Dur lemparkan merupakan salah satu strategi untuk mencairkan suasana agar tercipta suasana keakraban sehingga lebih mudah untuk menyampaikan tujuan diplomatik. Humor yang Gus Dur berikan tidak selamanya dapat membangun suasana yang cair, dalam humor yang Gus Dur lemparkan tentang parlemen

seperti taman kanak-kanak malah membuat hubungan Gus Dur dengan parlemen menjadi memburuk.

Secara garis besar, komunikasi yang dilakukan oleh Gus Dur selama menjabat sebagai Presiden efektif dan berhasil membangun suasana yang harmonis baik di lingkungan Istana maupun di lingkungan masyarakat. Gus Dur memberikan pelajaran betapa pentingnya komunikasi kepresidenan dengan menghadirkan juru bicara sebagai salah satu instrument dalam pemerintahannya.

6.2 Proposisi

- Gus Dur merupakan presiden Indonesia pertama yang menunjuk juru bicara kepresidenan dengan mengadopsi komunikasi kepresidenan di Amerika Serikat sebagai tempat berkembangnya kajian komunikasi kepresidenan.
- Dalam perspektif *non-western*, Gaya komunikasi kepresidenan Gus Dur banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai kearifan lokal lewat praktik tradisi budaya dan perilaku sehari-hari dalam lingkup pesantren dan organisasi Nahdlatul Ulama.
- Humor menjadi strategi efektif Gus Dur untuk membangun suasana keakraban dengan tujuan mencairkan suasana, dalam konteks diplomasi, Gus Dur menggunakan humor untuk membangun hubungan secara pribadi yang baik dengan kepala negara-negara sahabat.

6.3 Saran

Terdapat beberapa saran akademis maupun praktis yang dapat dilakukan para peneliti selanjutnya yang memiliki kesamaan minat penelitian.

6.3.1 Saran Akademis

Perlu adanya pengembangan kajian komunikasi kepresidenan di Indonesia terutama pada era sebelum orde lama pada masa demokrasi terpimpin dan masa orde baru saat sekretariat negara memiliki pengaruh yang sangat besar dalam institusi kepresidenan. Pengembangan kajian komunikasi kepresidenan di Indonesia dapat digunakan untuk mengetahui bentuk komunikasi yang dilakukan seorang presiden dan kepresidenan sebagai sebuah institusi.

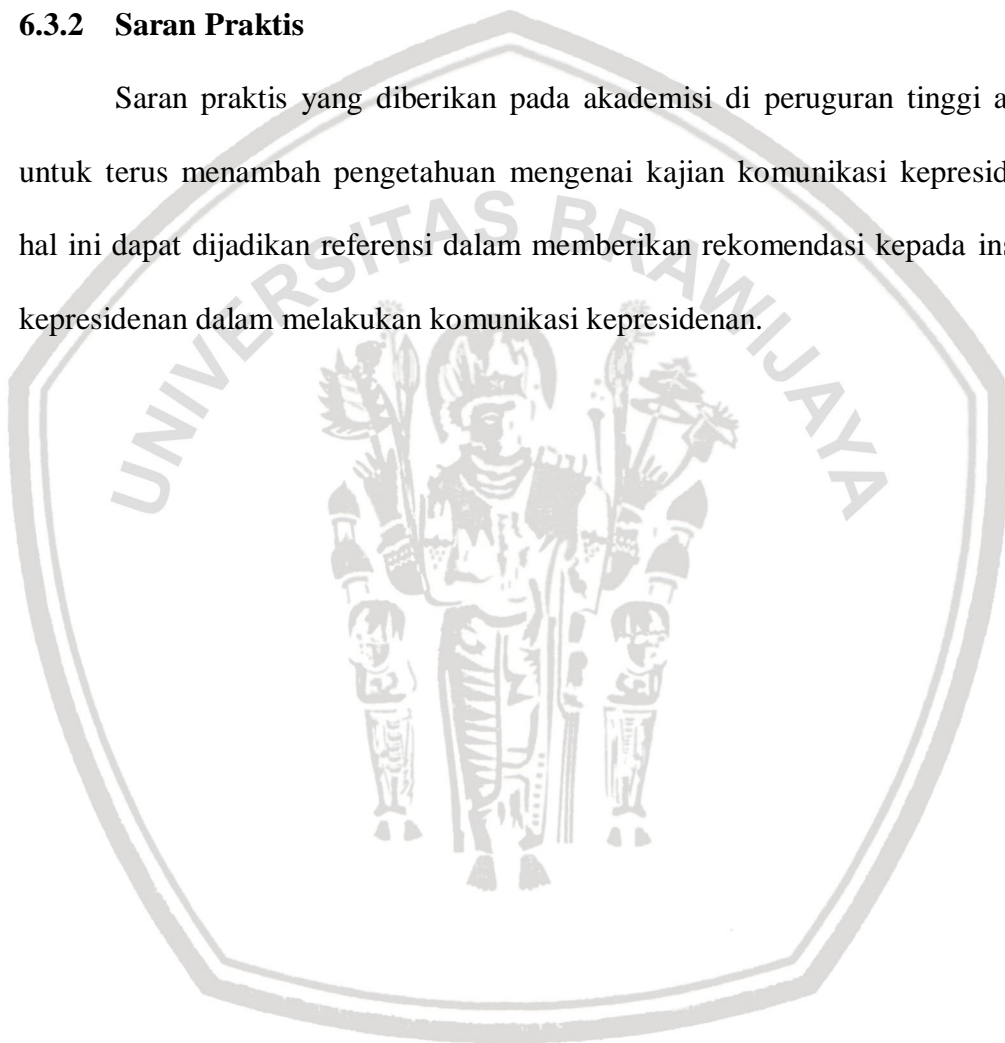
Gus Dur merupakan presiden Indonesia pertama yang berasal dari kalangan agama dalam hal ini pesantren, sehingga komunikasi kepresidenannya dipengaruhi oleh budaya pesantren khususnya pesantren Nahdlatul Ulama, sosoknya yang kontroversial menjadi menarik untuk dikaji bagaimana komunikasi yang Gus Dur lakukan dalam menghadapi krisis pada kasus tertentu, misalnya komunikasi yang dilakukan dalam menghadapi krisis saat kasus pencopotan Kapolri Bimantoro, hal tersebut dapat dijadikan tema dalam penelitian selanjutnya. Peran sekretariat negara sebagai institusi yang berada dalam area kepresidenan juga menarik untuk dikaji, karena sekretariat negara memiliki peran kuat dalam masa kepresidenan Soeharto namun kemudian dilemahkan pada masa presiden Gus Dur, hal tersebut ditandai dengan hadirnya sekretariat kabinet yang memiliki peran lebih besar pada masa pemerintahan Gus Dur.

Kajian komunikasi kepresidenan tidak hanya berpusat pada presiden dan lembaga yang berkaitan dengan institusi kepresidenan saja seperti Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet maupun Kantor Staf Kepresidenan tetapi juga unsur-unsur terdekat presiden misalnya saja peran ibu negara dalam institusi

kepresidenan di Indonesia, hal ini menarik untuk dikaji karena dalam wawancara peneliti dengan Priyo Sambodho salah satu orang terdekat Gus Dur yang menjadi informan dalam penelitian ini, ia menyatakan bahwa *first lady* atau ibu negara memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pemerintahan di Indonesia.

6.3.2 Saran Praktis

Saran praktis yang diberikan pada akademisi di perguruan tinggi adalah untuk terus menambah pengetahuan mengenai kajian komunikasi kepresidenan, hal ini dapat dijadikan referensi dalam memberikan rekomendasi kepada institusi kepresidenan dalam melakukan komunikasi kepresidenan.



Daftar Pustaka

- Antoni. (2017). Komunikasi kepresidenan di Indonesia (studi eksploratif praktik komunikasi kepresidenan di Indonesia), *Laporan Penelitian Rumpun Ilmu Komunikasi* (1-61). Malang, Jawa Timur: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.
- Arif, S. (2013). Gus dur dan humanisme islam. Diakses dari <http://www.nu.or.id/post/read/41529/gus-dur-dan-humanisme-islam>
- Briscoe, R. (2013). *Apologia, antapologia, and political power in congressional candidate sex scandals* (Master Thesis) Available from Soutern Utah University Database.
- Bryman, A. (2012). *Social research methods 4th edition*. New York: Oxfod University Press
- Cohen, J. (2014). *Presidential communication from hustings to twitter*. New York: Oxford University Press.
- Darban, A. (2004). Ulama jawa dalam perspektif sejarah. *Humaniora*. Vol. 16. (01). h. 27-34.
- Department of Budget and Management. (2015). *Presidential Communications Operations Office (PCOO)*. Retreived from <http://www.dbm.gov.ph/wp-content/uploads/GAA/GAA2015/GAA%202015%20Volume%20I/PCOO/PCOO.pdf>
- Denzin, N., Lincoln, Y. (2009). *Handbook of qualitative research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dhani, S. (2002). *Manajemen komunikasi kepresidenan ri (studi kasus: manajemen komunikasi presiden k.h. Abdurrahman wahid)* (Master Thesis) Available from lib.ui.ac.id
- Dhani, R. (2004). *Centang perenang manajemen komunikasi kepresidenan dari soekarno sampai megawati*. Jakarta: LP3ES
- Dyatmika, W., Wijaya, A., Evans., Daryanto, E., & Purwanto. (2009, Desember 31). Kiai orisinal, kiai kontroversial. *Koran Tempo*, h. A4.
- Dissanayake, W. (2003). Asian approaches to human communication: retrospect and prospect. *Intercultural Communication Studies*. XII (4). h. 17-38
- Djelantik, S. (2016). Political communication and international public opinion: a study of jokowi's Indonesia. *Journal of Media Critiques (JMC)*. Vol 02 (08). h. 147-160. DOI: 10.17349/jmc116210

- Fahmi, M. (2013). Pendidikan aswaja nu dalam konteks pluralisme. *Jurnal PAI. Vol. 01. (01).* h. 165-183.
- Firmanzah. (2008). *Marketing politik, antara pemahaman dan realitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Foss, K., & Littlejohn, S. (2005). *Theories of human communication 8th edition*. Canada: Wadsworth.
- Gazali, E. (2004). *Communication of politics and politics of communication in indonesia: a study on media performance, responsibility and accountability* (Doctoral Thesis) Radboud University, Nijmegen.
- Ginting, S. (2014, September 05). Zig-zag gus dur vs tni. *Republika.co.id*. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/14/09/05/nbewk727-zigzag-gus-dur-vs-tni>
- Grabber, D. (2005). Political communication faces the 21st century. *Journal of Communication. Vol. 55 (03).* h. 479-507.
- Hair, A. (2014). *Taqqiyah, strategi komunikasi dalam penghindaran isolasi* (Bachelor Thesis) Universitas Brawijaya, Malang.
- Hammoud, D. (2014). Egyptianising politics/politicizing egyptians: an analysis of political jokes. *IOSR Journal Of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS). Vol. 19 (06).* h. 20-31
- Haramain, A. (2004). *Gus dur, militer dan politik*. Yogyakarta: LKiS
- Harahap, H. (2013). *Strategi komunikasi presiden dengan rakyat melalui po box & sms 9949 (studi kasus komunikasi politik presiden sby)* (Master Thesis) Available from lib.ui.ac.id
- Kaban, R. (2009). Komunikasi politik presiden ri: dari soekarno sampai susilo bambang yudhoyono (perspektif karakteristik tokoh). *ObserVasi. Vol. 07 (02).* h. 49-65
- Kaid, L. (2015). *Handbook penelitian komunikasi politik* (Terj. Ahmad Asnawi). Bandung: Nusa Media. (Original work published 2011).
- Kumar, M. (2007). The contemporary presidency: the carter white house communications operation: lesson for his successors. *Presidential Studies Quarterly. Vol. 37 (04).* h. 717-736
- Kuswandari, A. (2005). *Bahasa militer dalam komunikasi politik sby* (Master Thesis) Available from lib.ui.ac.id.

- Kuswarno, E. (2007). Tradisi fenomenologi pada penelitian komunikasi kualitatif, sebuah pedoman penelitian dari pengalaman penelitian. *Sosiohumaniora*. Vol. 09 (02). h. 161-176.
- Laracey, M. (2009). The rhetorical presidency today: how does it stand up?. *Presidential Studies Quarterly*. Vol. 39 (04). h. 908-931.
- Littlejohn, S. (1996). *Theories of human communication*. California: Wadsworth Publishing.
- Littlejohn, S., & Foss, K. (2009). *Encyclopedia of communication theory*. California: Sage Publication
- Lee, T., Ryan, W., Wanta, W., & Chang, K. (2004). Looking presidential: a comparison of newspaper photographs of candidates in the united states and taiwan. *Asian Journal of Communication*. Vol. 14 (02). h. 121-139.
- McGuire, J. (2015). The historical presidency: in the inner circle: anna Rosenberg and franklin d. Roosevelt's presidency, 1941-1945. *Presidential Studies Quarterly*. Vol. 45. (02). h. 396-406. DOI: 10.1111/psq.12193.
- McNair, B. (2003). *An introduction to political communication 3rd edition*. London: Routledge
- McNair, B. (2011). *An introduction to political communication 5th edition*. London: Routledge.
- Melinda, D. (2016). *Tokoh berpengaruh dunia versi majalah time tahun 1958(kajian komunikasi politik genre political actor and rhetoric tentang presiden soekarno)*. (Unpublished bachelor thesis), Universitas Brawijaya, Malang.
- Miike, Y. (2002). Theorizing culture and communication in the Asian context: an assumptive foundation. *Intercultural Communication Studies*. Vol. XI (01). h. 1-22.
- Mietzner, M. (2006). *The politics of military reform in post-suharto Indonesia: elite conflict, nationalism and institutional resistance*. Washington: East-west Center.
- Moleong, L. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moran, M. (2012). Image restoration in political sex scandals: what to do (and what not to do) when you're caught with your pants down. *The Elon Journal of Undergraduate Research in Communication*. Vol. 3 (02). h. 43-61.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. London: Sage Publications Ltd.

- Mulyana, D., Arifin, A., & Changara, H. (2011). *Ilmu komunikasi sekarang dan tantangan masa depan*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Mulyana, D. (2013). *Komunikasi politik, politik komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D., & Solatun. (2013). *Metode penelitian komunikasi: contoh-contoh penelitian kualitatif dengan pendekatan praktis*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nilsen, D. (1990). The social functions of political humor. *The Journal of Popular Culture*. Vol. XXIV (03). h. 35-47
- Neuman, W. (2013). *Social research methods: qualitative and quantitative approaches*. London: Pearson Education.
- Pawito. (2007). *Penelitian komunikasi kualitatif*. Yogyakarta: LKiS
- Ryfe, D. (2005). *Presidents in culture, the meaning of presidential communication*. New York: Peter Lang Publishing Inc.
- Pratiwi, D. (2016). *Astrid soesanto dan ilmu komunikasi di indonesia: studi eksploratif pada pemikiran prof. astrid soesanto terhadap ilmu komunikasi di indonesia*. (Unpublished bachelor thesis), Universitas Brawijaya, Malang.
- Presidential Communications Operations Office. (2017). *About PCOO*. Manila, Filipina: Author.
- Sari, N. (2001). *Manajemen komunikasi strategic kejuru bicaraan presiden* (Master Thesis) Available from lib.ui.ac.id.
- Scacco, J., Coe, K., & Hearit, L. (2018). Presidential communication in tumultuous times: insight into key shifts, normative implications, and research opportunities. *Annals of the International Communication Association*. Vol. 42. (01). h. 21-37. DOI: 10.1080/23808985.2018.1433962
- Siavelis, P. (2016). Cabinets and informal advisory networks in multiparty presidential systems. *Presidential Studies Quarterly*. Vol. 46 (03). h. 569-591. DOI: 10.1111/psq.12295
- Sulaiman, A. (2013). Komunikasi politik dalam demokratisasi. *Observasi*. Vol. 11 (02). h.119-132.
- Suzanna, N. (2016). *Pelaksanaan politik mercusuar di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959-1965* (Bachelor Thesis) Available from digilib.unila.ac.id.

- Waisanen, D. (2015). Comedian-in-chief: presidential jokes as enthymematic crisis rhetoric. *Presidential Studies Quarterly*. Vol. 45 (02). h. 335-360
- Wang, G. (2011). *De-westernizing communication research. altering questions and changing frameworks*. New York: Routledge.
- Wejak, J. (2000). Soekarno: his mannerism and method of communication. *Kata*. Vol 02 (02). h. 54-59.
- Zaini, A. (2009, Desember 31). Setan pun boleh bertamu. *Jawa Pos*, h. 2.
- Zuliansyah, M. (2015). *Budaya sowan kyai, sebuah strategi dalam komunikasi politik (komunikasi politik calon legislative di jawa timur) (studi kualitatif eksploratif perilaku sowan kyai para calon legislatif menjelang pemilu)*. (Unpublished Bachelor Thesis), Universitas Brawijaya, Malang.

